

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Laporan Hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 telah dapat diselesaikan. Dalam laporan ini dimunculkan gambaran fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung, khususnya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pelaksanaan pengumpulan data Rifaskes 2011 dilakukan pada bulan Mei-Desember 2011, di 33 Provinsi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) mengerahkan sekitar 4000 enumerator yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, seluruh peneliti Balitbangkes, dosen Poltekkes, Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi.

Proses manajemen data mulai dari data dikumpulkan, kemudian dientri ke komputer, selanjutnya data *cleaning* dilakukan di Badan Litbangkes. Proses pengumpulan data dan manajemen data ini sungguh memakan waktu, stamina dan pikiran, sehingga tidaklah mengherankan bila diwarnai dengan dinamika kehidupan yang indah dalam dunia ilmiah.

Perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tulus atas semua kerja cerdas dan penuh dedikasi dari seluruh peneliti, litkayasa dan staf Balitbangkes, rekan sekerja dari BPS, para pakar dari Perguruan Tinggi, Penanggung Jawab Operasional dari jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh enumerator serta semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Rifaskes. Simpati mendalam disertai doa kami haturkan kepada mereka yang mengalami kecelakaan sewaktu melaksanakan Rifaskes.

Secara khusus, perkenankan ucapan terima kasih kami dan para peneliti kepada Ibu Menteri Kesehatan yang telah memberi kepercayaan kepada kita semua, anak bangsa, dalam menunjukkan karya baktinya.

Kami telah berupaya maksimal, namun pasti masih banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Untuk itu kami mohon kritik, masukan dan saran, demi penyempurnaan Rifaskes dimasa yang akan datang.

Billahit taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 25 Juli 2012

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

DR. dr. Trihono, MSc.

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL RISET FASILITAS KESEHATAN (RIFASKES) PUSKESMAS 2011 BADAN LITBANGKES, KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kemkes RI, disamping Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan (Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda), Puskesmas dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). *Supply* tersebut termasuk gedung, persediaan air bersih, listrik, kendaraan, peralatan, obat, Sumber Daya Manusia (SDM), pedoman, pelatihan, anggaran dan sebagainya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan di RSU Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 melakukan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder untuk mengetahui situasi terkini kecukupan dan ketepatan *supply* pada institusi-institusi pelaksana upaya kesehatan tersebut diatas.

Kerangka pikir riset ini dikembangkan atas dasar konsep *Blum* (1974), *Donabedian* (2002), *Jacob* dan *WHO* 2000. Pada prinsipnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini dilakukan didalam dan diluar gedung institusi pelayanan kesehatan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Semua kegiatan tersebut mempunyai komponen asupan (*input*), proses, luaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Komponen asupan inilah yang menjadi fokus utama Rifaskes 2011. Disamping itu, dalam Rifaskes 2011 ini dikumpulkan pula data esensial yang berhubungan dengan komponen proses dan luaran dari berbagai jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan baik oleh Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda maupun LKM.

Dengan demikian, Rifaskes 2011 memberikan gambaran/potret dan pemetaan ketersediaan *supply* di Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda dan LKM, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Gambaran/potret dan pemetaan ketersediaan *supply* tersebut tentunya disesuaikan dengan fungsi yang diemban oleh ke tiga institusi pelaksana upaya kesehatan tersebut. Diharapkan riset ini juga akan menghasilkan Indeks Fasilitas dan Indeks Kinerja RSU Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 mulai dilaksanakan sejak 2010. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2011 dan dilanjutkan dengan sosialisasi hasil dan analisis lanjut pada tahun 2012. Rifaskes 2011 dilaksanakan dengan menggunakan dana yang berasal dari DIPA Badan Litbangkes Kementerian kesehatan RI.

Laporan ini merupakan laporan hasil dari data fasilitas Puskesmas yang telah dikumpulkan melalui Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Puskesmas 2011. Sedangkan hasil Rifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah/Pemda dan LKM dilaporkan secara tersendiri.

Laporan Povinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Rancangan Rifaskes Puskesmas 2011 adalah studi potong lintang (*cross sectional*). Dilakukan secara sensus terhadap 9005 Puskesmas (berdasarkan data Ditjen BUK dan Pusdatin tahun 2010). Rancangan ini merupakan salah satu bagian dari rancangan Rifaskes 2011 secara keseluruhan.

Data yang dikumpulkan meliputi data input, proses, dan output upaya kesehatan di Puskesmas yang antara lain terdiri dari data fasilitas, Sumber Daya Manusia (SDM), alat kesehatan, organisasi dan manajemen, pelayanan kesehatan yang berjalan, output esensial dan pelayanan kesehatan, fungsi serta Indikator Mutu Esensial Puskesmas tahun 2010. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner Rifaskes Puskesmas 2011 yang terdiri dari 16 Blok. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penilaian terhadap data sekunder.

Pengumpul data adalah peneliti Badan Litbangkes, politeknik kesehatan (Poltekkes), universitas (perguruan tinggi), organisasi profesi, ataupun institusi penelitian kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilakukan : 1. Telaah dokumen (*document review*), 2. Pertemuan konsinyasi lintas program dan organisasi profesi, 3. Pertemuan pakar, 4. Penyusunan draft instrumen Rifaskes 2011, 5. Uji coba Instrumen, 6. Perbaikan dan finalisasi instrumen Rifaskes Puskesmas 2011, 7. Penyusunan *Plan of Action* (POA) pelaksanaan Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), 8. Penyusunan pedoman instrumen Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), 9. Pertemuan Tim Manajemen Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), 10. Rapat Koordinasi tingkat Provinsi, 11. Workshop/Pelatihan Fasilitator (*Master of Trainers/MOT*) Rifaskes 2011 tingkat Pusat (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), 12. Workshop/Pelatihan Penanggung Jawab Teknis/PJT (*Training of Trainers/ TOT*) Kabupaten/Kota Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), 13. Workshop/Pelatihan Rifaskes Puskesmas 2011 untuk enumerator, 14. Pengumpulan data Rifaskes Puskesmas 2011, 15. Validasi studi, 16. Data RB/Editing/Cleaning, 17. Analisa data, 18. Penulisan laporan akhir, 19. Diseminasi hasil Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), dan 20. Analisis lanjut

Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi tingkat Pusat, tingkat Koordinator Wilayah I – IV (1 Korwil bertanggung jawab atas 8-9 Provinsi), tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Rifaskes2011 tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Manajemen, Tim Teknis RS Pemerintah, Puskesmas, LKM, Manajemen Data (Mandat) dan Analisis Data (Andat).

Validasi studi ini dilaksanakan oleh tiga Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) terkemuka di Indonesia yaitu FKM UI, FKM Unair dan FKM Unhas. Proses validasi dilaksanakan 1-2 minggu setelah enumerator mengumpulkan data. Hasilnya baik proses pengumpulan data dan data yang dikumpulkan mempunyai validitas rata 80% lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengumpulan data dan data yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 adalah valid.

Laporan Povinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Dari kuesioner Puskesmas di Provinsi Lampung yang telah terkumpul sebanyak 305, sebanyak 265 merupakan kuesioner Puskesmas yang memenuhi kriteria Rifaskes 2011 dan dipergunakan untuk analisis data dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Kurang lebih tiga perempat dari Puskesmas di Provinsi Lampung yang dianalisis oleh Rifaskes 2011 (203 Puskesmas) tercatat sebagai Puskesmas wilayah perdesaan dan sekitar 60 Puskesmas merupakan Puskesmas perawatan. Hanya 12,5 persen Puskesmas yang merupakan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar).
- Analisis deskriptif menunjukkan bahwa hampir seluruh Puskesmas di Provinsi Lampung memiliki sumber daya tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan bidan. Sementara untuk tenaga dokter gigi hanya 44,5% persen dan tenaga promkes hanya 28,7 persen. Untuk tenaga sanitarian dan gizi masing-masing sebesar 82,3 persen dan 58,5 persen.
- Analisis diskriptif juga menunjukkan bahwa 96 persen bangunan Puskesmas merupakan bangunan permanen dengan kondisi semua bangunan baik atau rusak ringan 77 persen. Sebanyak 71,9 persen Puskesmas memiliki listrik 24 jam dan 72,5 persen Puskesmas memiliki air bersih. Untuk ketersediaan alat transportasi sebanyak 86 persen Puskesmas memiliki kendaraan roda 2, 77 persen Puskesmas memiliki pusling/ambulans dan 77 persen Puskesmas memiliki pusling/ambulan/perahu bermotor. Sementara hanya 67,5 persen Puskesmas memiliki pusling, 0 persen Puskesmas memiliki perahu bermotor dan 58,5 persen Puskesmas memiliki 3 roda 2 dan pusling/perahu bermotor.
- Sebesar 93,2 persen Puskesmas mempunyai dokumen perencanaan tahunan. Sedangkan sebanyak 92,3 persen Puskesmas memiliki dokumen RUK (Rencana Usulan Kegiatan) dan 93,1 persen Puskesmas memiliki dokumen RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan). Kegiatan Lokakarya Mini bulanan yang dilakukan Puskesmas adalah sebesar 87,2 persen dan hanya 41,5 persen Puskesmas yang melakukan Lokakarya Mini Triwulan.
- Untuk sistem informasi Puskesmas, hanya 11,7 persen Puskesmas yang memiliki jaringan antar ruang, 30,9 persen Puskesmas memiliki komputer tetapi tidak ada jaringan antar ruang, dan 58,5 persen Puskesmas menggunakan ICD X.
- Di dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Kepmenkes No. 128/2004 Puskesmas diwajibkan melaksanakan Upaya Kesehatan Wajib yang terdiri dari Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA/KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Pengobatan. Untuk kesesuaian penanggungjawab program sebanyak 20,4 persen Puskesmas memiliki penanggung jawab program promkes, 78,1 persen penanggungjawab program kesling, 98,9 persen penanggungjawab KIA/KB, 57 persen penanggungjawab perbaikan gizi masyarakat, 72,5 persen penanggungjawab pencegahan dan pemberantasan penyakit dan 68,7 persen penanggungjawab pengobatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

- Pada kegiatan Program Promosi Kesehatan, kegiatan Penyuluhan PHBS merupakan presentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (97%) dan disusul oleh kegiatan Pembinaan di Poskesdes (93,6%), Pembinaan Program Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) (88,3%) dan Pembinaan Forum Desa Siaga (78,5%).
- Pada kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) merupakan prosentase tertinggi yang dilakukan puskesmas (92,1%) kemudian disusul oleh Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan/Minuman (TPM) (89,8%), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga (89,4%) dan disusul oleh Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah (86,4%), Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk (86%), Pelayanan sanitasi (55,8%) dan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (19,2%).
- Pada kegiatan Program kesehatan ibu, kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (92,5%) dan diikuti oleh Pelayanan Antenatal Terintegrasi (84,5%) Kemitraan Bidan dan Dukun (81,5%), dan Kelas Ibu Hamil dan Nifas (74,7%).
- Pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (90,2%) dan disusul oleh Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) (83,8%), Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) (75,1%), Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat (72,5%), Manajemen Asfiksia (65,7%), Kelas Ibu Balita (57%), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (44,2%) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) (13,6%)
- Pada kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, Konsultasi KB merupakan persentase tertinggi sebesar 96,6 persen, diikuti, Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) sebesar 85,7persen, dan 59,6 persen Penanganan Komplikasi Kontrasepsi.
- Pada kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, persentase tertinggi adalah kegiatan penimbangan balita (99,2%) kemudian pemberian kapsul vitamin A pada Balita (98,9%), dan pemberian tablet besi pada ibu hamil (97,4%), peningkatan pemberian ASI eksklusif (81,5%), pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan (71,7%) dan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin (61,1%).
- Pada kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular, persentase tertinggi adalah TB Paru (100%) diikuti oleh Diare (98,1%), kemudian ISPA/Pneumonia (97,7%), DBD (95,1%), Malaria (90,6%), Surveilans terpadu (90,6%), Kusta (82,3%), Rabies (79,6%), Filariasis (36,2%), HIV/AIDS (34,3%), dan Schistosomiasis (6,8%).
- Pada kegiatan Program Imunisasi, kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas tertinggi adalah dengan frekuensi seminggu sekali (55,1), setiap hari (28,3%), diikuti frekuensi dua hari dalam seminggu (7,5%), dan tiga hari dalam seminggu (4,2%).
- Pada Puskesmas PONED, 90,9 persen melakukan pelayanan PONED 24 jam.

- Persentase keberadaan UKBM yang terbanyak adalah Posyandu (97%), diikuti Posyandu Lansia (80%), Poskestren (52,5%), SBH (40%), Peduli TB Paru (24,2%), Peduli Lansia (20,4%), Dana Sehat (18,1%), POD/WOD (17,4%) dan Peduli HIV-AIDS (7,2%).
- Sekitar 39,2% Puskesmas memiliki kelengkapan alat kesehatan poliklinik umum kurang dari 60% jumlah standard alat poliklinik umum (56 alat). Untuk poliklinik KIA sebanyak 37,7% Puskesmas memiliki alat kesehatan kurang dari 80%. Pada Puskesmas PONEB sebanyak 36,4% Puskesmas PONEB memiliki alat kesehatan kurang dari 80%.
- Untuk ketersediaan obat umum di Poliklinik Umum, sebanyak 68,7% Puskesmas memiliki ketersediaan pelayanan obat umum kurang dari 80%. Sementara untuk pelayanan obat PONEB, 39,4% Puskesmas PONEB memiliki ketersediaan pelayanan obat PONEB kurang dari 40%. Sementara untuk Pelayanan Obat KB, sebanyak 38,5% Puskesmas memiliki ketersediaan pelayanan obat KB kurang dari 40%.

Dari hasil-hasil diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Rifaskes Puskesmas 2011 khususnya di Provinsi Lampung telah menghasilkan gambaran input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang sangat kaya, rinci dan cukup valid untuk membuat potret fasilitas kesehatan di Puskesmas mulai dari tingkat Provinsi, kabupaten/kota maupun individual Puskesmas; 2. Baik input, dan proses upaya kesehatan di Puskesmas antara lain fasilitas, SDM, alat kesehatan, organisasi dan manajemen, pelayanan kesehatan yang berjalan, fungsi serta Indikator Mutu Esensial Puskesmas tahun 2010 diketemukan masih banyak berada dibawah standar yang telah ditentukan dalam buku Pedoman Puskesmas dan kebijakan Kementerian Kesehatan lainnya; 3. Dilihat dari input dan proses yang menunjang tiga fungsi Puskesmas, maka input dan proses yang mendukung keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan fungsi Puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan masih jauh dari harapan; 4. Dari sudut program wajib upaya kesehatan Puskesmas, maka input dan proses program wajib kesehatan ibu dan anak, terutama program PONEB, masih jauh dibandingkan standar minimal yang harus dipenuhi; dan 5. Terdapat disparitas input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang cukup tajam berdasarkan geografi, kota/desa dan regional.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah: 1. Perlu dilakukan analisis lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh Rifaskes Puskesmas 2011 khususnya di Provinsi Lampung; 2. Perlu pemenuhan dan pengembangan segera dan secara prioritas terhadap input dan proses upaya kesehatan Puskesmas; 3. Pemenuhan dan pengembangan input dan proses upaya Puskesmas yang menunjang fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan perlu mendapatkan prioritas tinggi; 4. Pemenuhan dan penyempurnaan input dan proses pada program PONEB pada seluruh Puskesmas perawatan harus segera dilaksanakan guna pencapaian RPJMN dan MDG; dan 5. Kesenjangan geografi, kota/desa dan regional dari input dan proses upaya kesehatan Puskesmas harus segera dipikirkan pemecahannya dengan meningkatkan integritas dan kejelasan peran Kementerian Kesehatan, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

DAFTAR SINGKATAN

AC	: Air Conditioner
AFP	: Acute Flaccid Paralysis
AIDS	: Acquired Immunodeficiency Syndrome
Akbid	: Akademi Kebidanan
AKL	: Akademi Kesehatan Lingkungan
Akper	: Akademi Keperawatan
Akzi	: Akademi Gizi
Alkes	: Alat Kesehatan
AMP	: Audit Maternal Perinatal
ANC	: Antenatal Care
APN	: Asuhan Persalinan Normal
Askes	: Asuransi Kesehatan
Astek	: Asuransi Tenaga Kerja
Balita	: Bawah Lima Tahun
Balkesmas	: Balai Kesehatan Masyarakat
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BCG	: Bacille Calmete Guerin
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Binfar	: Bina Farmasi
BLU	: Badan Layanan Umum
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BOR	: Bed Occupancy Rate
BP	: Balai Pengobatan
BPP	: Badan Penyantun Puskesmas
BSL	: Bio Safety Level
BTA	: Basil Tahan Asam
CMHN	: Community Mental Health Nursing
D1 Keb	: Diploma-1 Kebidanan
DIII	: Diploma-3
D-IV	: Diploma-4
DBD	: Demam Berdarah Dengue
DHF	: Dengue Hemorrhagic Fever
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DP3	: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
DPT	: Difteri Pertusis Tetanus
DTP	: Dengan Tempat Perawatan

EKG	: Elektro Kardiogram
Email	: Electronic Mail
FIFO	: First In First Out
FEFO	: First Expired First Out
FK	: Fakultas Kedokteran
FKG	: Fakultas Kedokteran Gigi
FKM	: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Gakin	: Keluarga Miskin
GKM	: Gugus Kendali Mutu
HB	: Hepatitis B
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
HP	: Handphone
ID	: Identitas
IMD	: Insiasi Menyusu Dini
ISO	: International Standard Organization
ISPA	: Infeksi Saluran Pernafasan Akut
IUD	: Intrauterine Device
Jamkesda	: Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal	: Jaminan Persalinan
Jamsostek	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	: Petunjuk Teknis
KB	: Keluarga Berencana
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kepmenkes	: Keputusan Menteri Kesehatan
Kesling	: Kesehatan Lingkungan
Kesmas	: Kesehatan Masyarakat
KN	: Kunjungan Neonatus
Keswa	: Kesehatan Jiwa
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIPI	: Kejadian Ikutan Paska Imunisasi
KLB	: Kejadian Luar Biasa
KMS	: Kartu Menuju Sehat
Korwil	: Koordinator Wilayah
KTA	: Kekerasan Terhadap Anak

Laporan Povinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Lansia	: Lanjut Usia
LB	: Laporan Bulanan
Lokmin	: Lokakarya Mini
LOS	:Length of Stay
LP LPO	: Laporan Penerimaan dan Lembar Permintaan Obat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: Millennium Development Goals
MMD	: Musyawarah Masyarakat Desa
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
MP ASI	: Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MTBM	: Manajemen Terpadu Bayi Muda
MTBS	: Manajemen Terpadu Balita Sakit
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Ormas	: Organisasi Massa
P2M	: Pengendalian Penyakit Menular
P4K	: Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
PA	: Pembantu Administrasi
PAH	: Penampungan Air Hujan
PAM	: Perusahaan Air Minum
PE	: Penyelidikan Epidemiologis
Perkesmas	: Perawatan Kesehatan Masyarakat
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
PGPS	: Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHN	: Public Health Nursing
PINERE	: Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
PJO	: Penanggungjawab Operasional
PJT	: Penanggungjawab Teknis
PKPR	: Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
PMK	: Pengembangan Manajemen Kinerja
PMTCT	: Prevention of Mother to Child Transmission
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POA	: Plan of Action
POD	: Pos Obat Desa
Podes	: Potensi Desa
Polindes	: Pondok Bersalin Desa
PONED	: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif
Posbindu	: Pos Pembinaan Terpadu

Poskesdes	: Pos Kesehatan Desa
Poskestren	: Pos Kesehatan Pesantren
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
Promkes	: Promosi Kesehatan
Protap	: Prosedur Tetap
PTT	: Pegawai Tidak Tetap
PUS	: Pasangan Usia Subur
Pusdatin	: Pusat Data dan Informasi
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pusling	: Puskesmas Keliling
Pustu	: Puskesmas Pembantu
PWS	: Pemantauan Wilayah Setempat
QA	: Quality Assurance
Rekmed	: Rekam Medik
Renstra	: Rencana Strategis
RI	: Rawat Inap
Rifas	: Riset Fasilitas
Rifaskes	: Riset Fasilitas Kesehatan
Rikhus	: Riset Khusus
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RJ	: Rawat Jalan
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPK	: Rencana Pelaksanaan Kegiatan
RS	: Rumah Sakit
RUK	: Rencana Usulan Kegiatan
RW	: Rukun Warga
S1 Kes	: Sarjana Strata-1 Kesehatan
S2 Kes	: Sarjana Strata-2 Kesehatan
SAA	: Sekolah Asisten Apoteker
SBH	: Saka Bhakti Husada
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDIDTK	: Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SIMPUS	: Sistem Manajemen Puskesmas
SK	: Surat Keputusan
SKp	: Sarjana Keperawatan
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMD	: Survei Mawas Diri
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SOP	: Standard Operational Procedures

Laporan Povinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

SP2TP	: Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
SPAG	: Sekolah Pembantu Ahli Gizi
SPAL	: Sistem Pembuangan Air Limbah
SPK	: Sekolah Perawat Kesehatan
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPM-BK	: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
SPPH	: Sekolah Pembantu Penilik Hygiene
SPR	: Sekolah Pengatur Rawat
SPRG	: Sekolah Pengatur Rawat Gigi
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
Tb	: Tuberkulosis
THT	: Telinga, Hidung, Tenggorokan
TOGA	: Tanaman Obat Keluarga
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
TPM	: Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman
TT	: Tetanus Toksoid
TTU	: Tempat-tempat Umum
UCI	: Universal Child Immunization
UKBM	: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UKGS	: Usaha Kesehatan Gigi Sekolah
UKGMD	: Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa
UKK	: Usaha Kesehatan Kerja
UKS	: Usaha Kesehatan Sekolah
UKP	: Upaya Kesehatan Pengembangan
UKW	: Upaya Kesehatan Wajib
USG	: Ultrasonografi
Usila	: Usia Lanjut
VCCM	: Vaccine Cold Chain Monitor
VCT	: Voluntary Counseling and Testing
Vit-A	: Vitamin A
VVM	: Vaccine Vial Monitor
WOD	: Warung Obat Desa
Yankes	: Pelayanan Kesehatan
Yankespro	: Pelayanan Kesehatan Reproduksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PERTANYAAN KEBIJAKAN	2
1.3. PERTANYAAN PENELITIAN	3
1.4. TUJUAN PENELITIAN	3
1.5. MANFAAT PENELITIAN	3
1.6. RUANG LINGKUP	3

BAB II KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR

2.1. BATASAN	5
2.2. KERANGKA KONSEP	5
2.3. PENGEMBANGAN INDIKATOR PUSKESMAS	
2.3.1. Indikator Input	7
2.3.2. Indikator Proses	8
2.3.3. Indikator Output	9

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN	11
3.2. POPULASI dan SAMPEL	
3.2.1. Populasi Penelitian	11
3.2.2. Sampel Penelitian	11
3.3. RESPONDEN	11
3.4. PENGUMPULAN DATA	
3.4.1. Jenis Data yang Dikumpulkan	12
3.4.2. Pengumpul Data	13
3.4.3. Cara Pengumpulan Data	13
3.5. PENGOLAHAN DATA	14
3.6. RINCIAN KEGIATAN	
3.6.1. Tahap Persiapan	14
3.6.1.1. Telaah Dokumen (document review)	14
3.6.1.2. Pertemuan Konsinyasi Lintas Program dan Organisasi Profesi	15
3.6.1.3. Pertemuan Pakar	15
3.6.1.4. Penyusunan Instrumen	15
3.6.1.5. Uji coba instrumen	15
3.6.1.6. Penyusunan Plan of Action (POA) Pelaksanaan.....	16

3.6.2. Tahap Pelaksanaan	16
3.6.2.1. Pengorganisasian Lapangan	16
3.6.2.2. Penyusunan Pedoman Instrumen	16
3.6.2.3. Pertemuan Tim Manajemen	17
3.6.2.4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	17
3.6.2.5. Workshop Fasilitator Tingkat Pusat	18
3.6.2.6. Workshop Penanggungjawab Teknis Kabupaten/Kota	18
3.6.2.7. Workshop Enumerator	18
3.6.2.8. Pengumpulan Data	19
3.6.2.9. Validasi Studi	19
3.6.2.10. Pengolahan Data	19
3.6.2.11. Analisa Data	19

BAB IV HASIL

4.1. JUMLAH PUSKESMAS	21
4.2. FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS	23
4.3. SUMBER DAYA MANUSIA	23
4.4. SARANA DAN PRASARANA	25
4.5. ALAT TRANSPORTASI	27
4.6. MANAJEMEN PUSKESMAS	28
4.6.1. Perencanaan Tahunan dan Lokakarya Mini.....	28
4.6.2. Sistem Informasi Puskesmas.....	30
4.7. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	31
4.8. PELAYANAN KESEHATAN	34
4.8.1. Program Promosi Kesehatan.....	34
4.8.1.1. Kegiatan Program Promosi Kesehatan.....	34
4.8.1.2. Pelatihan Program Promosi Kesehatan.....	35
4.8.1.3. Pedoman Program Promosi Kesehatan.....	36
4.8.1.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan....	37
4.8.2. Program Kesehatan Lingkungan.....	39
4.8.2.1. Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan.....	39
4.8.2.2. Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan.....	41
4.8.2.3. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan.....	42
4.8.2.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan	43
4.8.3. Program Kesehatan Ibu.....	45
4.8.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu.....	45
4.8.3.2. Pelatihan Program Kesehatan Ibu.....	45
4.8.3.3. Pedoman Program Kesehatan Ibu	47
4.8.3.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu.....	50
4.8.4. Program Kesehatan Bayi dan Anak	51
4.8.4.1. Kegiatan Program Kesehatan Bayi dan Anak.....	51
4.8.4.2. Pelatihan Program Kesehatan Bayi dan Anak.....	54

4.8.4.3. Pedoman Program Kesehatan Bayi dan Anak.....	55
4.8.4.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan..... Bayi dan Anak	58
4.8.5. Program Keluarga Berencana	59
4.8.5.1. Kegiatan Program Keluarga Berencana.....	59
4.8.5.2. Pelatihan Program Keluarga Berencana.....	60
4.8.5.3. Pedoman Program Keluarga Berencana.....	61
4.8.5.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Keluarga Berencana	63
4.8.6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....	65
4.8.6.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....	65
4.8.6.2. Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....	67
4.8.6.3. Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....	69
4.8.6.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi	72
Masyarakat	
4.8.7. Program Pengendalian Penyakit Menular.....	73
4.8.7.1. Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular.....	73
4.8.7.2. Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular.....	76
4.8.7.3. Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular.....	80
4.8.7.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Pengendalian	84
Penyakit Menular	
4.8.8. Program Imunisasi	85
4.7.8.1. Program Imunisasi di Puskesmas.....	85
4.7.8.2. Pelatihan Program Imunisasi.....	87
4.7.8.3. Pedoman Program Imunisasi.....	88
4.7.8.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi.....	90
4.9. PELAYANAN PONED	91
4.10. PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	92
4.11. ALAT KESEHATAN DAN OBAT	99
4.11.1. Poliklinik Umum.....	99
4.11.2. Poliklinik KIA.....	100
4.11.3. Alat-alat Puskesmas PONED.....	102
4.11.4. Alat-alat Imunisasi	103
4.11.5. Obat Umum.....	103
4.11.6. Obat PONED.....	104
4.11.7. Obat/Alat KB.....	106
BAB V. KESIMPULAN	107
BAB VI. SARAN-SARAN	109

Laporan Povinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN SK TIM RIFASKES 2011 PROVINSI LAMPUNG	113
LAMPIRAN KUESIONER PUSKESMAS RIFASKES 2011.....	114

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 3.1.	Jumlah Puskesmas per Kabupaten/Kota	12
Tabel 4.1.1.	Jumlah Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	21
Tabel 4.1.2.	Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Lokasi di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	22
Tabel 4.1.3.	Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Jenis Puskesmas, Rifaskes 2011	22
<u>FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS</u>		
Tabel 4.2.1.	Persentase Puskesmas dengan Fasilitas PONEB Menurut Jenis Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	23
<u>SUMBER DAYA MANUSIA</u>		
Tabel 4.3.1.a.	Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	24
Tabel 4.3.1.b.	Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	25
<u>SARANA DAN PRASARANA</u>		
Tabel 4.4.1.	Persentase Puskesmas dengan menurut Jenis dan Kondisi Seluruh Bangunan Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	26
Tabel 4.4.2.	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Listrik 24 Jam dan Air Bersih Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	26
<u>ALAT TRANSPORTASI</u>		
Tabel 4.5.1	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Alat Transportasi Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	27
<u>MANAJEMEN PUSKESMAS</u>		
Tabel 4.6.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Perencanaan dan Penggerakan Pelaksanaan Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	29
Tabel 4.6.1.2.	Persentase Puskesmas Menurut Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan di Provinsi Lampung Rifaskes 2011	29
Tabel 4.6.1.3	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Dokumen dan Keterlibatan PJ Program dalam menyusun RKT di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	30

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.6.2.1	Persentase Puskesmas Menurut Sistem Informasi Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	31
<u>PENANGGUNG JAWAB PROGRAM</u>		
Tabel 4.7.1.a.	Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	32
Tabel 4.7.1.b.	Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	33
<u>PELAYANAN KESEHATAN</u>		
Tabel 4.8.1.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	34
Tabel 4.8.1.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Program Promosi Kesehatan pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	35
Tabel 4.8.1.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman Program Promosi Kesehatan di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	37
Tabel 4.8.1.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Penerimaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	38
Tabel 4.8.2.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	39
Tabel 4.8.2.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	40
Tabel 4.8.2.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	42
Tabel 4.8.2.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	43
Tabel 4.8.2.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	44
Tabel 4.8.3.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	46
Tabel 4.8.3.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Program Kesehatan Ibu pada Tahun 2009-2010, Rifaskes 2011	47

Laporan Povinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.8.3.4.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	48
Tabel 4.8.3.4.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	48
Tabel 4.8.3.5.1.	Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	50
Tabel 4.8.4.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	52
Tabel 4.8.4.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	52
Tabel 4.8.4.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	54
Tabel 4.8.4.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	57
Tabel 4.8.4.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	57
Tabel 4.8.4.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	58
Tabel 4.8.5.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	60
Tabel 4.8.5.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Pelayanan KB Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	61
Tabel 4.8.5.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	62
Tabel 4.8.5.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	63
Tabel 4.8.5.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	65
Tabel 4.8.6.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	66
Tabel 4.8.6.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	67

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.8.6.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	68
Tabel 4.8.6.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	69
Tabel 4.8.6.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	71
Tabel 4.8.6.3.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	71
Tabel 4.8.6.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	73
Tabel 4.8.7.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	74
Tabel 4.8.7.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	75
Tabel 4.8.7.1.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	76
Tabel 4.8.7.2.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	78
Tabel 4.8.7.2.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	79
Tabel 4.8.7.2.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	80
Tabel 4.8.7.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	81
Tabel 4.8.7.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	82
Tabel 4.8.7.3.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	83

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.8.7.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	85
Tabel 4.8.8.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam dan Luar Gedung di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	86
Tabel 4.8.8.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Imunisasi Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	88
Tabel 4.8.8.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	89
Tabel 4.8.8.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Imunisasi di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	91
<u>PELAYANAN PONED</u>		
Tabel 4.9.1.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan PONED, Rifaskes 2011	92
<u>PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		
Tabel 4.10.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Petugas Khusus dan Petugas yang dilatih Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	93
Tabel 4.10.2.	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pedoman, SOP dan Peraturan tentang pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	93
Tabel 4.10.3.	Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Alokasi Dana Khusus Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	94
Tabel 4.10.4.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	95
Tabel 4.10.4.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	95
Tabel 4.10.5.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan pembinaan dan Pemantauan Kegiatan UKBM di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	96
Tabel 4.10.6.	Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Input dan Proses Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	97
Tabel 4.10.7.a.	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	98

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.10.7.b.	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	99

ALAT KESEHATAN DAN OBAT DALAM GEDUNG

Tabel 4.11.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Skor Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik Umum di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	100
Tabel 4.11.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Skor Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik KIA di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	101
Tabel 4.11.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Skor Ketersediaan Alat Kesehatan PONE D di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	102
Tabel 4.11.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alkes Imunisasi di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	103
Tabel 4.11.5.1	Persentase Puskesmas menurut Skor Ketersediaan Obat Umum di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	104
Tabel 4.11.6.1.	Persentase Puskesmas menurut Skor Ketersediaan Obat PONE D di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	105
Tabel 4.11.7.1.	Persentase Puskesmas Menurut Skor Ketersediaan Pelayanan Obat KB Di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011	106

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal.
Gambar 2.1.	Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hak atas kesehatan setiap warga negara dijamin oleh konstitusi. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A menyatakan bahwa, *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Selanjutnya, dalam pasal 28 H ayat 1, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*, pasal 34 ayat 1, *"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara"*, dan pasal 34 ayat 3, *"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"*.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 (pasal 10) dan PP Nomor 38 tahun 2007, penyelenggaraan urusan kesehatan di Indonesia merupakan sinergi antara peran pemerintah daerah dan pusat. Sistem Kesehatan Nasional menetapkan Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan (Kepmenkes 274 tahun 2009). Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan bagian dari pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keberadaan Rumah Sakit dan Puskesmas juga menjadi bagian dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setidaknya terkait dengan Bab V (Bagian Kedua) mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Bab VI mengenai Upaya Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas mengatur hal yang esensial tentang Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas **Kesehatan Kabupaten /Kota** yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu Kecamatan, tapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah desa/kelurahan/RW. Masing masing Puskesmas tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling. Untuk daerah yang jauh dari sarana pelayanan rujukan puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap

Fungsi puskesmas :

1. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan.

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah kerjanya.

2. Pusat pemberdayaan Masyarakat

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat , keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif

dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan berdayaan masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.

3. Pusat Pelayanan kesehatan Strata pertama, yang meliputi:
 - Pelayanan kesehatan perorangan
 - Pelayanan kesehatan masyarakat

Dalam upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra – Kemenkes) 2010 -2014, maka dukungan kebijakan yang tepat dalam hal Upaya Kesehatan menjadi suatu hal yang penting. Kebijakan yang tepat hanya akan diperoleh bila didasarkan pada bukti yang kuat dan sah (*evidence based policy*). Melalui kebijakan yang tepat maka perencanaan program secara konkuren di setiap tingkat administrasi Pemerintahan dan intervensi yang dilakukan akan lebih efektif.

Informasi yang dibutuhkan agar penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilakukan secara tepat, belum tersedia secara akurat, *up to date* dan memadai. Selain itu, saat ini belum tersedia peta status terkini tentang fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas dan Laboratorium) dan kinerjanya pada pada tingkat wilayah dan nasional. Penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan di masa datang yang kompleks (Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Jamkesmas) memerlukan informasi tentang *supply* pelayanan kesehatan agar tujuan tercapai optimal.

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI, disamping Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan (Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu pada fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). Buku ini membahas secara khusus mengenai pelaksanaan dan hasil Riset Fasilitas Kesehatan pada fasilitas kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan tahun 2011.

1.2. PERTANYAAN KEBIJAKAN

Supply apa yang dibutuhkan (fasilitas, SDM, peralatan kesehatan dan pelayanan kesehatan) agar institusi pelayanan kesehatan baik pusat maupun daerah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan RPJMN Bidang Kesehatan 2010-2014, MDGs 2015, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK), *Universal Coverage*, dan akselerasi pencapaian pembangunan kesehatan.

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu Puskesmas, termasuk SDM, alat kesehatan (alkes) penting dan canggih dan penyediaan pelayanannya pada pada tingkat wilayah dan nasional
2. Bagaimana distribusi *supply* pelayanan kesehatan di berbagai wilayah

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1. Diperolehnya informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas (puskesmas), termasuk Sumber Daya Manusia, peralatan kesehatan penting dan penyediaan pelayanannya pada tingkat wilayah dan nasional (*stock opname*).
2. Diperolehnya peta ketersediaan *supply* fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) di berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi)
3. Diperolehnya Indeks Kinerja Puskesmas

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1. Mendukung pencapaian Universal Coverage Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan menyediakan data fasilitas (puskesmas) terkait dengan paket pelayanan kesehatan yang dapat diberikan (*benefit package*).
2. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan revitalisasi Puskesmas.
3. Memungkinkan Pemerintah Pusat/provinsi mengalokasi bantuan/peran kepada daerah berdasar evidens secara optimal.
4. Memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan *supply* pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
5. Dapat digunakan dasar bagi perencanaan fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai tingkat administrasi pemerintahan.
6. Menghasilkan peta yang terintegrasi antara masalah kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan berdasarkan berbagai riset/informasi yang relevan (riskesdas, Rifaskes, Podes, Susenas dll)
7. Mendorong kegiatan riset *follow up* yang lebih tajam dan terarah

1.6. RUANG LINGKUP

Secara keseluruhan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) ini dilakukan di seluruh Rumah Sakit Umum Pemerintah, di seluruh Puskesmas, dan di seluruh Laboratorium Klinik Mandiri di Indonesia. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2011.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR

2.1. BATASAN

Riset Fasilitas Kesehatan merupakan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder tentang kecukupan (adekuasi) dan ketepatan (*appropriateness*) penyediaan fasilitas kesehatan dan kinerjanya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta yang dilakukan secara berkala.

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan, baik yang ditujukan untuk memberikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), rawat jalan, rawat inap, serta melingkupi strata I, II, dan III. Fasilitas kesehatan strata pertama meliputi antara lain puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan serta fasilitas laboratorium Pelayanan Mandiri. Termasuk fasilitas kesehatan strata kedua dan ketiga antara lain Balai kesehatan mata masyarakat, Balai pengobatan penyakit paru, Balai kesehatan indera masyarakat, Balai besar kesehatan paru masyarakat, RS Pemerintah dan swasta.

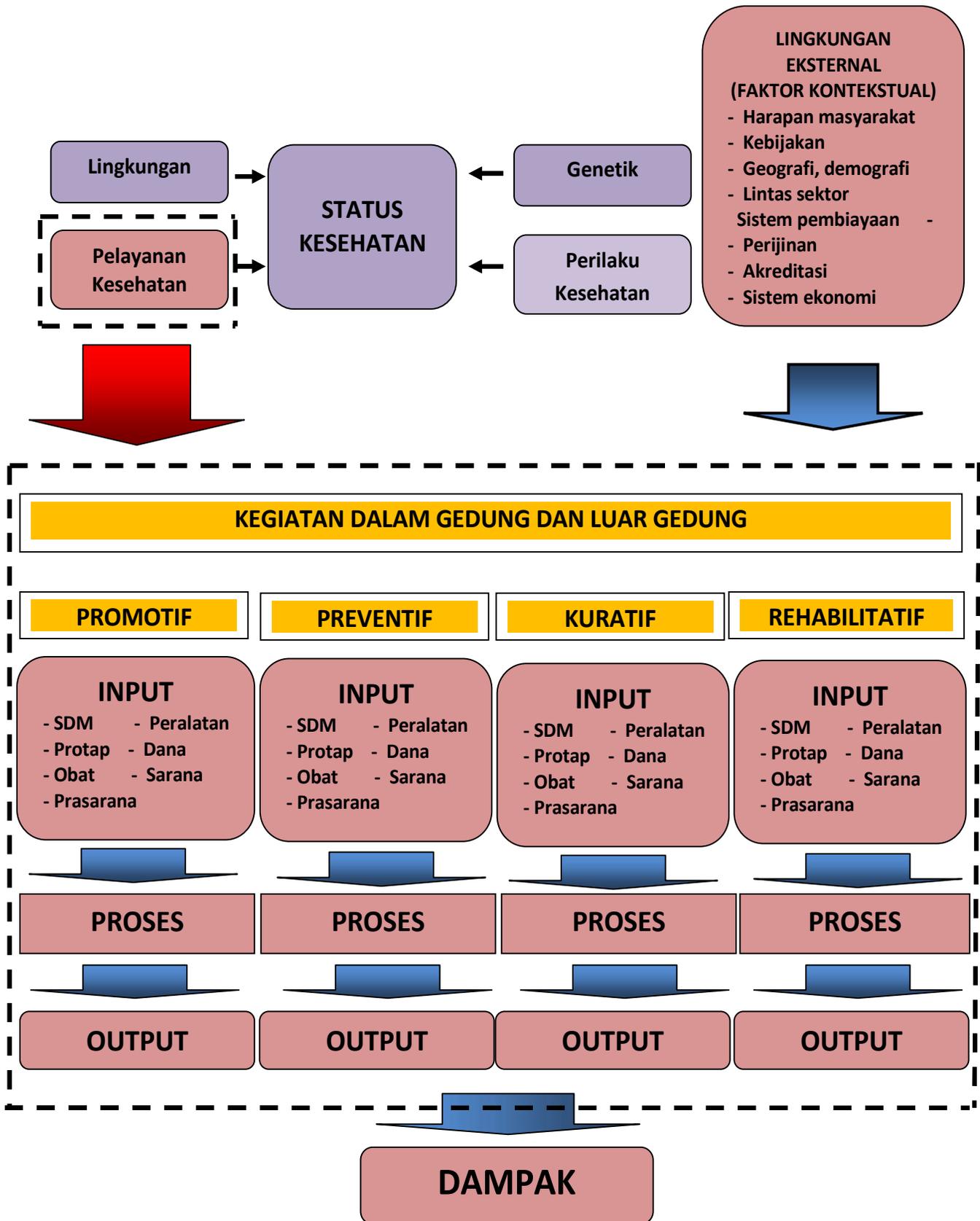
Berdasarkan tingkat kepentingannya (urgensi), maka Riset Fasilitas Kesehatan pertama ini ditujukan untuk Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium pelayanan kesehatan mandiri.

2.2. KERANGKA KONSEP

Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan mengacu pada Konsep HL. Blum mengenai "*Health Determinant*", Konsep "*Organization System*" Donabedian dan Konsep Jakab mengenai "*Organizational Reform*".

Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan kerangka konsep seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011.

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011



Dimodifikasi dari : *Blum, Donabedian, dan Jakab*

HL. Blum menyebutkan bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4 (empat) determinan kesehatan, yakni Perilaku Kesehatan, Genetik, Lingkungan, dan Pelayanan Kesehatan. Riset Fasilitas terkait erat dengan determinan pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud oleh Blum. Konsep ini dipadukan dengan pendekatan kesisteman organisasi yang dikemukakan oleh Donabedian, yang meliputi Input (Masukan), Proses, Output (Luaran), dan *Outcome* (Dampak). Secara khusus, Jakab menjabarkan komponen kesisteman organisasi Donabedian dalam konteks elemen-elemen yang mempengaruhi Fasilitas Kesehatan.

2.3. PENGEMBANGAN INDIKATOR PUSKESMAS

2.3.1. INDIKATOR INPUT

Indikator-indikator Input untuk puskesmas diklasifikasikan ke dalam kelompok:

A. Organisasi, meliputi:

1. Struktur
2. Fungsi
3. Jejaring
4. Luas wilayah
5. Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa

B. Peraturan/kebijakan, meliputi:

1. SPO/Protap pelayanan
2. Surat Edaran, Pedoman, Surat Keputusan

C. Sumber Daya Puskesmas, meliputi:

1. Sumber Daya Manusia: jumlah, kualifikasi, status kepegawaian, pendidikan, pelatihan
2. Fasilitas bangunan: kondisi bangunan, jenis ruang pelayanan, jenis ruang non pelayanan, sarana air, toilet, listrik, jaringan telepon, internet
3. Alat transportasi: kendaraan roda empat, roda dua, perahu bermotor, dan lain-lain. Penilaian mengenai alat transportasi ini termasuk jumlah dan kondisi dari alat transportasi tersebut.
4. Alat kesehatan: jenis, jumlah, dan kondisi
5. Obat-obatan: jenis dan jumlah
6. Buku Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Standar Prosedur Operasional untuk Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan
7. Dana operasional Puskesmas: Alokasi dan Realisasi

2.3.2. INDIKATOR PROSES

Indikator-indikator proses untuk Puskesmas diklasifikasikan ke dalam kelompok:

- A. Perencanaan (P1), meliputi keberadaan dokumen perencanaan:
 - 1. Bulanan,
 - 2. Tribulanan, dan
 - 3. Tahunan

- B. Penggerakan dan Pelaksanaan, meliputi:
 - 1. Dokumen pencatatan dan pelaporan, Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) dan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)
 - 2. Pembagian tugas/pekerjaan jelas dan tertulis
 - 3. Pembagian daerah binaan
 - 4. Penetapan penanggung jawab Program

- C. Pembinaan dan pengawasan penilaian, meliputi:
 - 1. Bimbingan
 - 2. Monitoring: Terencana, Insidental, metode
 - 3. Evaluasi: Penilaian Kinerja

- D. Manajemen operasional Puskesmas, meliputi:
 - 1. Membuat data pencapaian/cakupan kegiatan pokok tahun lalu
 - 2. Menyusun RUK melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas
 - 3. Menyusun RPK secara rinci dan lengkap
 - 4. Melaksanakan lokakarya mini bulanan
 - 5. Melaksanakan lokakarya mini tribulanan (lintas sektoral)
 - 6. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan ke Kabupaten/kota
 - 7. Program Jaminan Mutu
 - 8. Penilaian kepuasan pasien

- E. Manajemen alat dan obat, meliputi:
 - 1. Membuat kartu inventarisasi dan menempatkan di masing-masing ruangan
 - 2. Melaksanakan up dating daftar inventaris alat
 - 3. Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat/bahan di gudang secara rutin
 - 4. Menerapkan pendekatan *First In First Out* (FIFO) dan FEFO

2.3.3. INDIKATOR OUTPUT

A. Utilisasi (*outreach*)

1. Dalam gedung, artinya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan yang dilakukan didalam gedung, misalnya pemeriksaan gigi.
2. Luar gedung, artinya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan di masyarakat, misalnya puskesmas keliling, imunisasi.

B. Target cakupan pelayanan kesehatan

1. Upaya kesehatan wajib

- (1) Promosi Kesehatan,
- (2) Kesehatan lingkungan,
- (3) KIA,
- (4) Upaya perbaikan gizi masyarakat,
- (5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular,
- (6) Upaya pengobatan.

2. Upaya kesehatan pengembangan (penambahan atau inovasi) :

- (1) Rawat inap dan PONEB
- (2) Usaha Kesehatan Sekolah
- (3) Kesehatan Gigi dan Mulut
- (4) Kesehatan usia lanjut,
- (5) Upaya kesehatan mata,
- (6) Kesehatan jiwa,
- (7) Kesehatan olah raga,
- (8) Perawatan Kesehatan Masyarakat,
- (9) Pembinaan Pengobatan Tradisional,
- (10) Kesehatan kerja
- (11) Kesehatan haji

3. Layanan Penunjang, meliputi:

- (1) Laboratorium
- (2) Farmasi
- (3) Gawat darurat bencana
- (4) Puskesmas keliling

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan Riset Fasilitas Kesehatan adalah studi potong lintang (*cross sectional*).

3.2. POPULASI dan SAMPEL

3.2.1. POPULASI PENELITIAN

Populasi penelitian adalah puskesmas di seluruh Provinsi Lampung.

3.2.2. SAMPEL PENELITIAN

Pada perencanaan awal, sampel penelitian adalah seluruh puskesmas yang terdaftar di Pusdatin seperti terlihat pada tabel 3.1. Namun sesudah dilaksanakan rapat koordinasi teknis dengan dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disepakati sampel Puskesmas adalah semua Puskesmas yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Sensus). Puskesmas yang akan didatangi hanya Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum bulan Februari 2010, sedangkan puskesmas lainnya informasinya diambil di Dinas kesehatan Kabupaten/Kota saja. Hasil pengumpulan data dari 267 puskesmas, 265 puskesmas yang dianalisis yaitu Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010.

3.3. RESPONDEN

Responden di puskesmas meliputi :

1. Kepala Puskesmas
2. Staf puskesmas terkait
3. Pengelola informasi puskesmas

Tabel 3.1. Jumlah Puskesmas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

NO	Kabupaten/Kota	JUMLAH PUSKESMAS
1	Lampung Barat	18
2	Tanggamus	22
3	Lampung Selatan	24
4	Lampung Timur	31
5	Lampung Tengah	36
6	Lampung Utara	25
7	Way Kanan	18
8	Tulang Bawang	15
9	Pesawaran	12
10	Pringsewu	10
11	Mesuji	8
12	Tulangbawang Barat	9
13	Kota Bandar Lampung	27
14	Kota Metro	10
	JUMLAH	265

Sumber: Pusdatin, 2010

3.4. PENGUMPULAN DATA

3.4.1. JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Secara umum data yang dikumpulkan meliputi: Identitas tempat, karakteristik, Input (sumber daya manusia, fasilitas fisik, peralatan, pedoman dan ketatausahaan), proses (perencanaan, pergerakan-pelaksanaan, pengawasan penilaian dan pengendalian), dan out kegiatan.

Kuesioner Puskesmas terdiri dari 16 Blok sebagai berikut :

- Blok I : Pengenalan Tempat
- Blok II : Keterangan Pengumpul Data
- Blok III : Karakteristik Puskesmas
- Blok IV : Sumber Daya Manusia
- Blok V : Fasilitas Fisik
- Blok VI : Ketatausahaan (Tu)
- Blok VII : Manajemen
- Blok VIII : Pelayanan Kesehatan

Blok IX	:	Pelayanan Rawat Inap
Blok X	:	Puskesmas Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat A. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat B. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Blok XI	:	Puskesmas Sebagai Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Blok XII	:	Pustu Dan Bidan Desa
Blok XIII	:	Jaringan Pelayanan Kesehatan Dasar
Blok XIV	:	Rumah Dinas
Blok XV	:	Alat Kesehatan Dalam Gedung
Blok XVI	:	Alat Kesehatan Luar Gedung

3.4.2. PENGUMPUL DATA

Pengumpul data adalah petugas yang direkrut Badan Litbangkes, yang berasal dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes), kalangan Universitas (perguruan tinggi), Dinas kesehatan Kabupaten/Kota ataupun masyarakat umum yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik di tingkat Pusat maupun daerah. Petugas pengumpul data di Puskesmas harus memenuhi kualifikasi latar belakang pendidikan D3 di bidang kesehatan. Sebelum melakukan pengumpulan data, setiap petugas mendapat pelatihan terlebih dahulu.

3.4.3. CARA PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan faktor penentu dan bagian penting dari rangkaian kegiatan survei sehingga data yang dikumpulkan terhindar dari bias, akurat, valid dan dapat diandalkan. Pengumpulan data dilakukan melalui :

1. *Interview* (wawancara) dengan menggunakan kuesioner
2. Pengamatan/ observasi langsung
3. Data sekunder, dikumpulkan dengan memperhatikan/ *check* dokumen yang ada di puskesmas.

Pada pengumpulan data, enumerator/ pengumpul data diharuskan memperhatikan etika sebagai berikut

1. Tim pengumpul data harus menghormati norma sosial setempat. Upayakan agar kunjungan ke Puskesmas dapat diatur sedemikian rupa sehingga seluruh responden sedang berada di tempat. Oleh karena itu, enumerator harus membuat perjanjian waktu terlebih dahulu sebelum berkunjung.
2. Pada waktu menggali informasi dari responden, pewawancara harus menciptakan suasana yang baik. memperhatikan dan bersikap netral terhadap respons dari responden, tidak memberi kesan memaksa. tidak emosi, tidak mengarahkan, dapat menghindari percakapan yang menyimpang atau bertele-tele. meminta izin sebelumnya untuk pertanyaan yang sensitif.
3. Setelah selesai melakukan wawancara, mengucapkan terima kasih pada saat berpamitan.

Untuk mengendalikan mutu hasil wawancara dilakukan hal seperti berikut:

1. Tim pewawancara harus bekerjasama dengan baik selama melaksanakan tugas di lapangan. Ketua Tim (Katim) harus dapat membagi tugas lapangan (dalam proses pengumpulan data) secara seimbang, baik untuk dirinya sendiri dan maupun untuk anggota tim pengumpul data yang lain.
2. Semua enumerator bertanggung jawab melakukan editing terhadap hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan harus diverifikasi oleh Katim, segera setelah pengumpulan data dianggap selesai. Ketua tim meneliti **kelengkapan dan konsistensi** jawaban pada kuesioner yang telah diisi, segera setelah diserahkan oleh pewawancara.
3. Kualitas yang tinggi dari data yang dikumpulkan dapat dicapai apabila wawancara sudah diverifikasi dengan observasi yang cermat dan dilakukan mengikuti prosedur yang benar.
4. Apabila dalam hal-hal tertentu ada permasalahan dalam pengisian kuesioner yang tidak bisa diselesaikan oleh tim, maka tim segera menghubungi Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten/Kota dan akan didiskusikan bersama dengan PJO Kabupaten/Kota, jika perlu berkoordinasi dengan PJT dan atau PJO Provinsi.

Kuesioner yang sudah selesai diedit oleh Ka Tim, diserahkan pada PJT Kab/Kota untuk selanjutnya dibawa ke Tim Manajemen Data. Sementara kuesioner yang belum terisi lengkap saat PJT Kab/Kota kembali ke Pusat, dilengkapi dan diserahkan kepada PJT Kab/Kota. Untuk selanjutnya dikirim via pos/paket ke Tim Manajemen Data.

3.5. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data yang direncanakan meliputi:

1. Deskriptif nasional dan provinsi
2. Peta wilayah
3. Analisis untuk menghasilkan berbagai indikator adekuasi, *apropriateness*, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu.
4. Penyusunan Indeks Kinerja Puskesmas

Buku ini hanya memuat hasil analisis deskriptif.

3.6. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan di dalam Riset Fasilitas Kesehatan ini meliputi:

3.6.1. TAHAP PERSIAPAN

3.6.1.1. Telaah Dokumen (*document review*)

Kegiatan ini diperlukan untuk menyusun protokol pelaksanaan penelitian, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3.6.1.2. Pertemuan Konsinyasi Lintas Program dan Organisasi Profesi

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan lintas program dalam persiapan dan pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011. Pada pertemuan ini antara lain menghasilkan:

- a. Indikator-indikator kinerja Puskesmas dari unit-unit utama Kementerian Kesehatan yang terkait dan Organisasi Profesi
- b. Tersosialisasinya rencana kegiatan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011
- c. Adanya pemahaman tentang perlu dan manfaat dari kegiatan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011

3.6.1.3. Pertemuan Pakar

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan dari para pakar dalam pengembangan indikator RIFAS 2011.

Pada pertemuan ini dihasilkan antara lain:

- a. Perumusan indikator Rifas 2011 untuk Puskesmas
- b. Sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- c. Pengembangan jejaring dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- d. Masukan pakar dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011

3.6.1.4. Penyusunan Instrumen

Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun instrumen penelitian Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011, meliputi instrumen RIFAS Puskesmas. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan dan berbagai masukan yang diterima melalui serangkaian pertemuan (diskusi). Kuesioner Puskesmas dikembangkan dengan mempertimbangkan jenis (Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan non rawat inap) dan lokasi (perkotaan dan perifer) Puskesmas.

3.6.1.5. Uji coba instrumen

Uji coba instrumen dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai validitas dan reliabilitas draft instrumen Riset Fasilitas 2011. Tujuan kegiatan uji coba instrumen adalah:

- a. Diperoleh hasil uji coba instrumen riset fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Diperolehnya gambaran untuk manajemen data hasil penelitian
- c. Diperolehnya masukan-masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan instrumen

Uji coba kuesioner Puskesmas dilakukan di 21 Puskesmas yang berbeda dengan mempertimbangkan keterwakilan Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap (dengan tempat tidur) dan Puskesmas non rawat inap (non tempat tidur), daerah perkotaan (urban) dan daerah perifer (*remote*). Puskesmas yang menjadi sampel dalam uji coba instrumen untuk masing-masing provinsi: 1 Puskesmas perawatan dan 2 *non*perawatan (1 di perkotaan dan 1 di *remote area*) di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur.

3.6.1.6. Penyusunan *Plan of Action (POA)* Pelaksanaan

Tujuan pertemuan ini adalah tersusunnya perencanaan pelaksanaan (*plan of action*) Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011.

3.6.2. TAHAP PELAKSANAAN

Riset Fasilitas dilaksanakan pada tahun 2011. Pengumpulan data dilakukan antara bulan Juli sampai dengan pertengahan Oktober 2011. Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi tingkat Pusat, tingkat Wilayah, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Rifaskes tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Manajemen, Tim Teknis, Tim Manajemen Data (Mandat) dan Tim Analisis Data (Andat).

3.6.2.1. Pengorganisasian Lapangan

Untuk memudahkan pengumpulan data dan menjaga kualitas data pelaksanaan pengumpulan dibagi dalam 4 wilayah. Setiap koordinator wilayah bertanggung jawab pada 8-9 propinsi. Koordinator Wilayah (korwil) terdiri dari Ketua, 1-2 orang Wakil Ketua, Penanggung Jawab Teknis Provinsi (PJT) dan Penanggung Jawab Administrasi.

- Korwil 1. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (Pusat 1) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Papua.
- Korwil 2. Pusat Teknologi Kesehatan Terapan dan Epidemiologi Klinik (Pusat 2) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Papua Barat.
- Korwil 3. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat (Pusat 3) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di Sembilan (9) provinsi, yaitu: Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.
- Korwil 4. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusat 4) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.

3.6.2.2. Penyusunan Pedoman Instrumen

Sebagai perlengkapan pengumpulan data terlebih dahulu disiapkan formulir yang akan diisi oleh petugas. Sebagai pedoman cara pengisian formulir dibuat pedoman teknis instrumen Riset Fasilitas 2011. Pada pengumpulan data ini dibuat 4 pedoman teknis yaitu: pedoman teknis instrumen Puskesmas Riset Fasilitas 2011, serta pedoman teknis pertanggungjawaban keuangan Riset Fasilitas 2011. Pedoman Instrumen Riset fasilitas 2011 diperlukan sebagai acuan agar terjadi kesamaan di dalam definisi operasional dan pemaknaan dari instrumen yang sudah disusun.

Penyusunan pedoman instrumen dimaksudkan sebagai bagian dari upaya jaga mutu yang dilakukan agar data yang dikumpulkan didasarkan pada kesamaan pemahaman dari enumerator yang akan menghasilkan data yang valid. Penyusunan pedoman instrumen dilakukan melalui serangkaian diskusi yang melibatkan narasumber terkait dan kerja tim sehingga menghasilkan pedoman instrumen yang meliputi instrumen untuk pengambilan data Puskesmas.

3.6.2.3. Pertemuan Tim Manajemen

Tujuan dari kegiatan ini adalah menjamin pelaksanaan Riset Fasilitas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pertemuan ini dihasilkan yaitu :

- a. Rencana teknis pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.
- b. Identifikasinya potensi permasalahan dan masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.
- c. Identifikasinya alternatif-alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.

Pertemuan tim manajemen merupakan salah satu bentuk dari upaya jaga mutu pelaksanaan Riset Fasilitas 2011. Pada tahap-tahap awal, pertemuan tim manajemen dilakukan untuk mematangkan perencanaan dan mempersiapkan penunjang pelaksanaan Rifas. Ketika Rifas berjalan, pertemuan tim manajemen dilakukan dengan maksud melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan Riset Fasilitas 2011 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pertemuan tim internal manajemen melibatkan tim inti, tim manajemen data, dan tim administrasi. Pelaksana kegiatan adalah Tim Riset Fasilitas 2011

3.6.2.4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi

Rapat koordinasi tingkat provinsi bertujuan untuk koordinasi persiapan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa tujuan khusus rapat Koordinasi antara lain :

- a. Sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- b. Teridentifikasinya faktor penghambat dalam pelaksanaan Rifas 2011
- c. Teridentifikasinya faktor penunjang dan potensi untuk pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- d. Tersusunnya alternatif pemecahan untuk mengatasi faktor penghambat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- e. Tersusunnya rencana pelaksanaan dan mekanisme kerja Riset Fasilitas 2011 di setiap daerah
- f. Tersedianya tenaga penanggungjawab operasional Rifas 2011 di setiap daerah.

Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 tingkat Provinsi dilaksanakan di seluruh provinsi dan dilakukan di ibukota provinsi. Rapat ini diikuti oleh pelaksana Riset Fasilitas 2011 (tim pusat yang terdiri dari ketua dan wakil penanggungjawab provinsi, tim administrasi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi).

Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 diikuti oleh pimpinan instansi terkait dengan harapan akan dilakukan sosialisasi dan persiapan pelaksanaan Riset Fasilitas di masing-masing fasilitas kesehatan yang dipimpinnya atau di setiap puskesmas yang berada di

wilayah kerjanya. Kegiatan Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 dilakukan di ibukota 33 provinsi di Indonesia. Sebagai pelaksana kegiatan adalah seluruh Satuan kerja (satker) di lingkungan Badan Litbang Kesehatan.

3.6.2.5. *Workshop* Fasilitator Tingkat Pusat

Workshop fasilitator Riset Fasilitas dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya pendelegasian dan penyebaran pemahaman substansi Riset Fasilitas 2011 mengingat rentang kendali (*span of control*) kegiatan Rifas 2011 yang cukup lebar. Tujuan dari kegiatan ini agar peserta *workshop* mampu untuk memberikan materi dan arahan mengenai Riset Fasilitas pada Penanggungjawab Teknis (PJT) kabupaten/kota dan enumerator Riset Fasilitas 2011, dan memahami substansi, instrumen yang digunakan, serta mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011. Melalui kegiatan ini peserta mampu memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi.

Workshop diikuti oleh seluruh Penanggungjawab Teknis (PJT) Provinsi Riset Fasilitas 2011, Koordinator Wilayah, dan panitia. Pelatihan dilakukan selama 5 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum Puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

3.6.2.6. *Workshop* Penanggung jawab Teknis Kabupaten/Kota

Tujuan *workshop* agar peserta *workshop* mampu untuk memberikan pemahaman mengenai substansi dan pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011 pada enumerator. Melalui kegiatan ini, peserta *workshop* mampu memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011

Workshop penanggungjawab teknis kabupaten/kota diikuti oleh seluruh Penanggungjawab Teknis (PJT) kabupaten/kota, Koordinator Wilayah, pembantu administrasi (PA) dan panitia. Pelatihan dilakukan selama 7 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Workshop ini khususnya ditujukan untuk PJT kabupaten/kota dan tenaga Pembantu Administrasi (PA). *Workshop* untuk PJT kabupaten/kota dilakukan oleh fasilitator tingkat pusat dengan dukungan dari Tim Manajemen Rifas 2011. Peserta *workshop* dapat memberikan pengarahan dan pemahaman untuk enumerator. Hal ini dilakukan mengingat akan ada sekitar 3352 enumerator Riset Fasilitas 2011 yang direkrut sehingga perlu adanya penyebaran pemahaman pelaksanaan Riset Fasilitas kepada PJT kabupaten/kota yang selanjutnya akan terlibat di dalam pelaksanaan *workshop* untuk enumerator.

3.6.2.7. **Workshop Enumerator**

Workshop untuk enumerator dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya penyebarluasan pemahaman substansi Riset Fasilitas 2011 kepada enumerator Rifas 2011. Dengan pemahaman yang baik, enumerator dapat mengumpulkan data dengan benar sehingga akan menghasilkan kualitas data yang baik. Tujuan umum dari *workshop* ini agar peserta *workshop* mampu untuk melakukan pengumpulan data Riset Fasilitas 2011 dengan baik, memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011

Workshop enumerator diikuti oleh seluruh enumerator Riset Fasilitas, enumerator untuk Puskesmas. *Workshop* dilakukan selama 5 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggung jawaban keuangan.

Workshop enumerator dilakukan terhadap 3352 enumerator Rifas 2011, dengan rincian 2186 enumerator puskesmas dan 498 orang tim entri data. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi paparan/presentasi dan tanya jawab, diskusi, dan praktek lapangan. *Workshop* dilakukan di ibukota propinsi. Pelaksanaan *workshop* dilakukan sesuai dengan kesediaan waktu masing-masing propinsi.

3.6.2.8. **Pengumpulan Data**

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data Riset Fasilitas di Puskesmas yang meliputi data input, proses, dan output. Kegiatan pengumpulan data riset fasilitas kesehatan, dilaksanakan di seluruh Puskesmas sebanyak 9.188 buah.

Riset fasilitas kesehatan untuk Puskesmas dilakukan secara total *coverage*. Ruang lingkup kegiatan meliputi: input, proses, output dan outcome pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan di setiap Puskesmas dengan cara mendatangi langsung fasilitas kesehatan tersebut dan melakukan wawancara terhadap responden terkait, pengamatan (observasi) dan telaah terhadap data sekunder yang ada.

3.6.2.9. **Validasi Studi**

Kegiatan validasi studi merupakan salah satu bentuk dari upaya jaga mutu pelaksanaan Riset Fasilitas 2011. Dilakukan oleh Akademisi dari beberapa universitas (perguruan tinggi), untuk melihat gambaran seberapa valid hasil Riset Fasilitas Kesehatan 2011. Validasi studi dilakukan oleh tim khusus dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.

3.6.2.10. **Pengolahan Data**

Pengolahan data meliputi *data editing*, *data entry*, *data cleaning*, dan *data processing*. Pelaksanaan pengolahan data dilakukan oleh 2 tim yaitu tim manajemen data dan tim analisis data. Tim manajemen data (mandat) bertanggung jawab pada data sejak diterima dari enumerator hingga data siap dianalisa. Sedangkan tim analisis data bertanggung jawab pada pembuatan *syntax*, *dummy table* dan mengeluarkan hasil.

3.6.2.11. Analisa Data

Analisa data meliputi: deskriptif nasional dan wilayah, Peta wilayah, analisis untuk menghasilkan berbagai indikator adekuasi, appropriateness, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu, dan penyusunan Indeks Kinerja Puskesmas.

BAB IV HASIL

4.1. JUMLAH PUSKESMAS

Analisis deskriptif hasil Rifaskes 2011 untuk Puskesmas dilakukan berdasarkan seluruh Puskesmas yang ada di Provinsi Lampung. Jumlah Puskesmas yang berhasil dikunjungi dan dilakukan pengumpulan data adalah sejumlah 265 Puskesmas yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Pada tabel 4.1.1. disajikan distribusi Puskesmas tersebut.

Tabel 4.1.1
Jumlah Puskesmas di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Puskesmas beroperasi sebelum Februari 2010 dan dikunjungi	Puskesmas tidak dikunjungi karena beroperasi setelah Januari 2010	Puskesmas tidak dikunjungi karena merupakan daerah sulit	Total Jumlah Puskesmas
1	Lampung Barat	18	1	0	19
2	Tanggamus	22	0	0	22
3	Lampung Selatan	24	0	0	24
4	Lampung Timur	31	0	0	31
5	Lampung Tengah	36	0	0	36
6	Lampung Utara	25	0	0	25
7	Way Kanan	18	0	0	18
8	Tulang Bawang	14	1	0	15
9	Pesawaran	12	0	0	12
10	Pringsewu	10	0	0	10
11	Mesuji	8	0	0	8
12	Tulangbawang Barat	9	0	0	9
13	Kota Bandar Lampung	27	0	0	27
14	Kota Metro	11	0	0	11
LAMPUNG		265	2	0	267

Dari total jumlah puskesmas, didapatkan bahwa ada 265 puskesmas yang dikunjungi, 2 Puskesmas tidak dikunjungi karena beroperasi setelah Januari 2010, tidak ada Puskesmas yang tidak dikunjungi karena akses yang sulit dan sebagainya. Analisis disepakati hanya pada Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010 (ada di daftar sampel ataupun tidak), yaitu sejumlah 265 Puskesmas.

Tabel 4.1.2.
Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Lokasi di Provinsi Lampung,
Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lokasi			
			Perkotaan		Perdesaan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Lampung Barat	18	2	11.1	16	88.9
2	Tanggamus	22	2	9.1	20.0	90.9
3	Lampung Selatan	24	2	8.3	22	91.7
4	Lampung Timur	31	2	6.5	29	93.5
5	Lampung Tengah	36	2	5.6	34	94.4
6	Lampung Utara	25	2	8.0	23	92.0
7	Way Kanan	18	2	11.1	16	88.9
8	Tulang Bawang	14	1	7.1	13	92.9
9	Pesawaran	12	2	16.7	10.0	83.3
10	Pringsewu	10	2	20.0	8	80.0
11	Mesuji	8	2	25.0	6	75.0
12	Tulangbawang Barat	9	3	33.3	6	66.7
13	Kota Bandar Lampung	27	27	100.0	0	0
14	Kota Metro	11	11	100.0	0	0
LAMPUNG		265	62	23.4	203	76.6

Jenis Puskesmas diklasifikasikan menjadi dua: Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non-Perawatan. Yang dimaksud dengan Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang menjalankan fungsi perawatan. Untuk menjalankan fungsinya biasanya Puskesmas diberikan tambahan ruangan dan fasilitas rawat inap yang merupakan pusat rujukan antara. Dari tabel 4.1.3 dapat dilihat sebaran Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non-Perawatan di 14 Kabupaten/Kota yang dianalisis dari 265 Puskesmas.

Pada tabel 4.1.3. dapat dilihat bahwa secara keseluruhan terdapat 60 Puskesmas Perawatan (22,6%) dan 205 Puskesmas Non Perawatan (77,4%) di Provinsi Lampung. Jumlah Puskesmas Perawatan terbanyak yang melebihi 50 persen dari total Puskesmas hanya ada di Kabupaten Lampung Barat (50,0%) dan yang terendah ada di Kabupaten Lampung Selatan (4,2%).

Tabel 4.1.3.
Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Jenis Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jenis			
			Perawatan		Non Perawatan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Lampung Barat	18	9	50.0	9	50.0
2	Tanggamus	22	3	13.6	19	86.4
3	Lampung Selatan	24	1	4.2	23	95.8
4	Lampung Timur	31	8	25.8	23	74.2
5	Lampung Tengah	36	6	16.7	30	83.3
6	Lampung Utara	25	5	20.0	20	80.0
7	Way Kanan	18	7	38.9	11	61.1
8	Tulang Bawang	14	3	21.4	11	78.6
9	Pesawaran	12	2	16.7	10	83.3
10	Pringsewu	10	2	20.0	8	80.0
11	Mesuji	8	2	25.0	6	75.0
12	Tulangbawang Barat	9	2	22.2	7	77.8
13	Kota Bandar Lampung	27	8	29.6	19	70.4
14	Kota Metro	11	2	18.2	9	81.8
LAMPUNG		265	60	22.6	205	77.4

4.2. FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan, selain mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dasar/wajib dan pengembangan, juga diperkenankan untuk memberikan fasilitas pelayanan lainnya. Fasilitas tersebut yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011, antara lain ditanyakan tentang ada/tidak ada PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar).

Tabel 4.2.1
Persentase Puskesmas dengan Fasilitas PONED Menurut Jenis Puskesmas di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Perawatan		Puskesmas Non Perawatan	
			% PONED	% Non PONED	% PONED	% Non PONED
1	Lampung Barat	18	44.4	5.6	0	50
2	Tanggamus	22	4.5	9.1	0	86.4
3	Lampung Selatan	24	4.2	0	0	95.8
4	Lampung Timur	31	6.5	19.4	0	74.2
5	Lampung Tengah	36	2.8	13.9	0	83.3
6	Lampung Utara	25	20.0	0	24.0	56.0
7	Way Kanan	18	11.1	27.8	5.6	55.6
8	Tulang Bawang	14	14.3	7.1	0	78.6
9	Pesawaran	12	16.7	0	0	83.3
10	Pringsewu	10	10	10	20.0	60.0
11	Mesuji	8	25.0	0	0	75.0
12	Tulangbawang Barat	9	0	22.2	0	77.8
13	Kota Bandar Lampung	27	18.5	11.1	0	70.4
14	Kota Metro	11	9.1	9.1	0	81.8
LAMPUNG		265	12.5	10.2	3.4	74.0

Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar. Pada umumnya, Puskesmas dimaksud mempunyai fasilitas rawat inap. Dari Rifaskes 2011, terdata bahwa fasilitas PONED dimiliki oleh 12,5 persen Puskesmas Perawatan dan 3,4 persen Puskesmas Non Perawatan, yang tersebar di Provinsi Lampung. Kabupaten yang memiliki Fasilitas PONED di Puskesmas Perawatan terbanyak Lebih dari 15 persen yaitu Kabupaten Lampung Barat (44,4%), Kabupaten Mesuji (25%), Kabupaten Lampung Utara (20,0%) dan Kabupaten Pesawaran (16,7%) sedangkan Kabupaten yang tidak memiliki fasilitas PONED adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat (0%).

4.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Puskesmas merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang ada. Yang dimaksud tenaga kesehatan di Puskesmas adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan. Selain itu dalam memberikan pelayanan kesehatan perlu pula dipertimbangkan distribusi tenaga kesehatan tersebut.

Analisis deskriptif tenaga kesehatan di Puskesmas dari hasil Rifaskes 2011 ditujukan untuk mengetahui ketersediaan tenaga Puskesmas dan penyebarannya di 14

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Analisis dilakukan pada 265 Puskesmas dari 265 Puskesmas yang dikunjungi di 14 kabupaten/Kota. Analisis disepakati hanya pada Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010.

Tabel 4.3.1.a.
Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Dokter		Dokter Gigi		Perawat		Bidan	
			% Ada	Jml Rata-rata/Pusk	% Ada	Jml Rata-rata/Pusk	% Ada	Jml Rata-rata/Pusk	% Ada	Jml Rata-rata/Pusk
1	Lampung Barat	18	100	1.2	33.3	0.3	100	10.7	100	12.9
2	Tanggamus	22	100	1.5	18.2	0.2	100	7.2	100	12.9
3	Lampung Selatan	24	100	2.0	41.7	0.4	100	13.2	100	19.9
4	Lampung Timur	31	100	1.4	29.0	0.3	100	11.8	100	17.3
5	Lampung Tengah	36	100	1.3	38.9	0.4	97.2	10.9	100	15.9
6	Lampung Utara	25	100	1.8	36.0	0.4	100	15.2	100	15.7
7	Way Kanan	18	100	1.7	50.0	0.5	100	13.3	100	18.8
8	Tulang Bawang	14	100	1.5	28.6	0.3	100	11.6	100	12.5
9	Pesawaran	12	100	2.3	50.0	0.5	100	13.7	100	19.3
10	Pringsewu	10	100	2.0	80.0	0.8	100	10.6	100	17.3
11	Mesuji	8	100	2.5	12.5	0.1	100	12.8	100	15.6
12	Tulangbawang Barat	9	100	2.0	44.4	0.4	100	18.2	100	23.1
13	Kota Bandar Lampung	27	100	2.4	96.3	1.6	100	10.7	100	8.2
14	Kota Metro	11	100	2.1	72.7	0.9	100	7.7	100	5.2
LAMPUNG		265	100	1.7	44.5	0.5	99.6	11.8	100	15.2

Tabel 4.3.1.b.
Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Sanitarian		Tenaga Gizi		Promkes	
			% Ada	Jml Rata-rata/Pusk	% Ada	Jml Rata-rata/Pusk	% Ada	Jml Rata-rata/Pusk
1	Lampung Barat	18	55.6	0.7	61.1	0.8	16.7	0.2
2	Tanggamus	22	77.3	1.1	59.1	0.6	4.5	0
3	Lampung Selatan	24	79.2	1.5	58.3	0.6	41.7	0.6
4	Lampung Timur	31	71.0	0.8	38.7	0.4	6.5	0.1
5	Lampung Tengah	36	88.9	1.2	41.7	0.4	33.3	0.4
6	Lampung Utara	25	92.0	1.5	52.0	0.5	56.0	0.6
7	Way Kanan	18	72.2	1.2	50.0	0.5	55.6	0.9
8	Tulang Bawang	14	78.6	1.0	28.6	0.3	7.1	0.1
9	Pesawaran	12	75.0	0.9	83.3	0.8	41.7	0.5
10	Pringsewu	10	90.0	1.5	80.0	1.2	20.0	0.2
11	Mesuji	8	100	1.4	12.5	0.1	25.0	0.3
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	1.8	77.8	1.0	0	0
13	Kota Bandar Lampung	27	96.3	1.4	100	1.3	37.0	0.4
14	Kota Metro	11	100	1.7	100	1.3	36.4	0.4
LAMPUNG		265	82.3	1.2	58.5	0.7	28.7	0.3

Analisis dilakukan pada tenaga Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Tenaga Gizi dan Promkes. Untuk setiap jenis tenaga dilihat keberadaannya dan jumlah rata-rata per Puskesmas, seperti dapat dilihat pada tabel 4.3.1.a. dan 4.3.1.b.

Untuk keberadaan Dokter (Tabel 4.3.1.a.) seluruh Puskesmas di Provinsi Lampung sudah memiliki tenaga dokter (100%) dengan jumlah rata-rata 1,7 per Puskesmas. Sedangkan untuk keberadaan Dokter Gigi, hanya 44,5 persen Puskesmas di Provinsi Lampung yang memiliki dokter gigi, dengan jumlah rata-rata 0,5 per Puskesmas. Puskesmas yang sudah memiliki dokter gigi paling banyak yaitu Kota Bandar Lampung (96,2%) dengan rata-rata 1,6 per Puskesmas, kemudian Kabupaten Pringsewu (80%) dengan rata-rata 0,8 per Puskesmas

dan Kota Metro (72,7%) dengan rata-rata 0,9 per Puskesmas. Terdapat 9 Kabupaten yang memiliki dokter gigi <50 persen dengan rata-rata <0,5 per puskesmas.

Deskripsi keberadaan Perawat secara Provinsi menunjukkan bahwa (99,6%) Puskesmas di Provinsi Lampung telah memiliki tenaga Perawat dengan jumlah rata-rata 11,8 perawat per Puskesmas. Hampir seluruh kabupaten/kota memiliki tenaga perawat (100%), hanya Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki tenaga perawat 97,2 persen, dengan rata-rata 10,9 perawat per puskesmas.

Keberadaan Bidan di Provinsi Lampung 100 persen dengan jumlah rata-rata 15,2 Bidan per Puskesmas. Seluruh puskesmas telah memiliki Bidan dimana rata-rata tertinggi ada di Kabupaten Tulang Bawang barat yaitu 23,1 bidan per puskesmas dan yang terendah ada di Kota Metro yaitu rata-rata 5,2 bidan per puskesmas.

Analisis keberadaan tenaga Sanitarian menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung baru mencapai 82,3 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 1,2 Sanitarian per Puskesmas. Ada 3 Kabupaten yang puskesmasnya rata-rata memiliki sanitarian kurang dari 1 yaitu Kabupaten Lampung Barat rata-rata memiliki tenaga sanitarian 0,7 per puskesmas, Kabupaten Lampung Timur rata-rata memiliki tenaga sanitarian 0,8 per puskesmas dan Kabupaten Pesawaran rata-rata memiliki tenaga sanitarian 0,9 per puskesmas.

Tenaga gizi di Provinsi Lampung sebanyak 58,5 persen dengan jumlah rata-rata 0,7 per Puskesmas. Seluruh Puskesmas di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sudah memiliki Tenaga Gizi (100%), dengan jumlah rata-rata 1,3 per Puskesmas. Sementara di Kabupaten Pringsewu memiliki 80 persen dengan jumlah rata-rata 1,2 tenaga gizi per puskesmas dan Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tenaga gizi sebesar 77,8 persen dengan jumlah rata-rata 1 tenaga gizi per puskesmas.

Tenaga Penyuluh Kesehatan termasuk tenaga di Puskesmas yang mempunyai peran penting untuk kontribusi pelayanan kesehatan masyarakat. Akan tetapi tenaga penyuluh kesehatan ini termasuk tenaga yang jumlahnya sedikit, di Provinsi Lampung hanya 28,7 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 0,3 Tenaga Promkes Per Puskesmas. Ada dua Kabupaten yang jumlah rata-rata tenaga promkesnya 0 yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain itu 12 Kabupaten Kota lainnya memiliki rata-rata tenaga promkes antara 0,1 – 0,9 per puskesmas.

4.4. SARANA DAN PRASARANA

Pada tabel 4.4.1. dan 4.4.2. disajikan data tentang Sarana dan Prasarana Puskesmas yang meliputi Jenis dan Kondisi bangunan, listrik 24 jam, dan air bersih.

Tabel 4.4.1.
Persentase Puskesmas dengan Kondisi dan Jenis Seluruh Bangunan Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Keadaan Bangunan Baik/Rusak Ringan	Jenis Bangunan Permanen
1	Lampung Barat	18	44.4	77.8
2	Tanggamus	22	81.8	90.9
3	Lampung Selatan	24	58.3	100
4	Lampung Timur	31	77.4	96.8
5	Lampung Tengah	36	80.6	100
6	Lampung Utara	25	84.0	96.0
7	Way Kanan	18	88.9	100
8	Tulang Bawang	14	71.4	92.9
9	Pesawaran	12	91.7	100
10	Pringsewu	10	100	100
11	Mesuji	8	100	100
12	Tulangbawang Barat	9	77.8	100
13	Kota Bandar Lampung	27	85.2	96.3
14	Kota Metro	11	45.5	90.9
LAMPUNG		265	77.0	95.8

Persentase Puskesmas di Provinsi Lampung yang memiliki kondisi bangunan dalam keadaan baik atau rusak ringan sebanyak 77 persen. Seluruh puskesmas di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji dalam keadaan baik atau rusak ringan (100%). Ada 2 Kabupaten dan Kota yang kondisi bangunan puskesmasnya baik atau rusak ringan kurang dari 50 persen yaitu Kabupaten Lampung Barat (44,4 %) dan Kota Metro (45,5%) Sedangkan 10 Kabupaten Kota lainnya kondisi bangunan puskesmasnya baik atau rusak ringan lebih dari 50 persen.

Persentase Puskesmas yang memiliki jenis bangunan permanen di Provinsi Lampung sudah 96,8 persen. Seluruh Puskesmas di 6 Kabupaten/Kota sudah memiliki bangunan permanen. Sementara di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro masih memiliki bangunan puskesmas yang tidak permanen.

Tabel 4.4.2.
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Listrik 24 jam dan Air Bersih Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Puskesmas dengan Ketersediaan (%)	
			Listrik 24 Jam	Air Bersih*
1	Lampung Barat	18	83.3	83.3
2	Tanggamus	22	81.8	50.0
3	Lampung Selatan	24	100	66.7
4	Lampung Timur	31	96.8	74.2
5	Lampung Tengah	36	97.2	80.6
6	Lampung Utara	25	96.0	72.0
7	Way Kanan	18	94.4	61.1
8	Tulang Bawang	14	57.1	64.3
9	Pesawaran	12	100	58.3
10	Pringsewu	10	100	80.0
11	Mesuji	8	37.5	25.0
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	100
13	Kota Bandar Lampung	27	100	85.2
14	Kota Metro	11	90.9	100
LAMPUNG		265	90.9	72.5

Persentase Puskesmas yang tersedia listrik 24 jam di Provinsi Lampung 90,9 persen. Seluruh Puskesmas di 4 Kabupaten/Kota sudah mempunyai ketersediaan listrik 24

jam (100%). Ketersediaan listrik terendah di Kabupaten Tulang Bawang (57,1%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (37,5%).

Untuk ketersediaan air bersih, di Provinsi Lampung Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih sepanjang tahun hanya 72,5 persen. Seluruh Puskesmas di Kota Metro dan Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki ketersediaan air bersih (100%). Ketersediaan air bersih terendah di Kabupaten Mesuji (25%), Kabupaten Tanggamus (50%) dan Kabupaten Pesawaran (58,3%).

4.5. ALAT TRANSPORTASI

Untuk ketersediaan sarana transportasi, dari 265 puskesmas menunjukkan hanya 86 persen Puskesmas di Lampung memiliki kendaraan bermotor roda dua. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesawaran sudah memiliki alat transportasi kendaraan roda dua (100%). Persentase kepemilikan kendaraan roda dua terendah ada di Kota Bandar Lampung (74,1%), Kabupaten Mesuji (75%), dan Kabupaten Lampung Tengah (77,8%).

Tabel 4.5.1.
Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Alat Transportasi di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Alat Transportasi Puskesmas (%)					
			Kendaraan Roda 2	Pusling	Perahu Bermotor	3 Roda 2 + 1 Pusling / Perahu Bermotor	Pusling / Ambulans	Pusling/ Ambulans/ Perahu Bermotor
1	Lampung Barat	18	94.4	77.8	0	72.2	83.3	83.3
2	Tanggamus	22	95.5	54.5	0	54.5	72.7	72.7
3	Lampung Selatan	24	79.2	66.7	0	45.8	66.7	66.7
4	Lampung Timur	31	96.8	80.6	0	80.6	83.9	83.9
5	Lampung Tengah	36	77.8	83.3	0	61.1	86.1	86.1
6	Lampung Utara	25	84.0	64.0	0	52.0	76.0	76.0
7	Way Kanan	18	88.9	44.4	0	38.9	55.6	55.6
8	Tulang Bawang	14	85.7	64.3	0	64.3	92.9	92.9
9	Pesawaran	12	100	100	0	100	100	100
10	Pringsewu	10	80.0	80.0	0	70.0	80.0	80.0
11	Mesuji	8	75.0	50.0	0	37.5	75.0	75.0
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	66.7	0	66.7	66.7	66.7
13	Kota Bandar Lampung	27	74.1	37.0	0	25.9	59.3	59.3
14	Kota Metro	11	90.9	81.8	0	72.7	90.9	90.9
LAMPUNG		265	86.0	67.5	0	58.5	77.0	77.0

Selain kendaraan roda 2 puskesmas juga memiliki kendaraan roda 4 berupa pusling yaitu sebesar 67,5 persen. Kabupaten Pesawaran 100 persen puskesmasnya memiliki pusling roda 4. Namun masih ada 2 Kabupaten yang hanya memiliki pusling roda 4 kurang dari 50 persen yaitu Kabupaten Way Kanan dan Kota Bandar Lampung. Sementara 11 Kabupaten Kota lainnya memiliki pusling roda 4 antara 60-93 persen. Di Provinsi Lampung tidak ada puskesmas yang memiliki perahu (0%).

Tabel 4.5.1 menunjukkan persentase puskesmas yang memiliki sarana transportasi tiga (3) kendaraan bermotor roda 2 (yang masing-masing diasumsikan digunakan oleh Sanitarian, Perawat dan Bidan untuk pelayanan luar gedung) dan pusling roda 4 atau perahu bermotor, di Provinsi Lampung sebesar 58,5 persen. Tabel 4.5.1 menunjukkan juga sarana transportasi berupa persentase Puskesmas yang memiliki ambulans atau pusling roda empat dan yang memiliki ambulans atau pusling roda empat atau perahu bermotor.

Ambulans merupakan sarana transportasi pasien untuk kasus yang tidak bisa ditangani Puskesmas dan memerlukan rujukan ke sarana pelayanan yang lebih mampu seperti ke rumah sakit. Puskesmas Keliling walaupun tidak didesain seperti ambulans, namun bila tidak ada ambulans digunakan juga sebagai kendaraan ambulans, yaitu membawa pasien yang memerlukan rujukan segera. Di Provinsi Lampung persentase Puskesmas yang memiliki pusling roda empat atau perahu di Provinsi Lampung sebesar 77 persen. Demikian pula yang memiliki ambulans atau pusling roda empat atau perahu bermotor di Lampung sebanyak 77 persen.

4.6. MANAJEMEN PUSKESMAS

4.6.1. Perencanaan Tahunan dan Lokakarya Mini

Pada Rifaskes 2011 ditanyakan apakah Puskesmas mempunyai dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2010, bila ada dilihat apakah dokumennya berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan dilihat juga apakah Penanggung Jawab Program terlibat dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan. Selain Rencana Kerja Tahunan, Rifaskes 2011 juga melihat dokumen Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan dan Lokakarya Mini Triwulanan.

Dari 265 Puskesmas yang dianalisis, persentase puskesmas yang mempunyai Rencana Kerja Tahunan di Provinsi Lampung sebanyak 93,2 persen (265 puskesmas). Ada 10 Kabupaten Kota yang seluruh puskesmasnya mempunyai Rencana Kerja Tahunan (100%) sedangkan 4 Kabupaten lainnya belum seluruh puskesmas membuat Rencana Kerja Tahunan yaitu berkisar antara 60-96 persen. Sedangkan Kabupaten Kota yang puskesmasnya membuat Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) di Provinsi Lampung sebesar 93,2 persen dimana ada 3 Kabupaten Kota yang puskesmasnya membuat PKP kurang dari 50 persen yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Mesuji dan Kota Metro, sedangkan 11 kabupaten Kota lainnya berkisar antara 60-96 persen puskesmas diwilayahnya membuat PKP.

Tabel 4.6.1.1. juga menggambarkan persentase puskesmas menurut pelaksanaan lokakarya mini bulanan. Di Provinsi Lampung ada 87,2 persen puskesmas yang melaksanakan lokakarya mini bulanan dan ada dokumennya. Seluruh Puskesmas di 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah melaksanakan lokakarya mini bulanan dan ada dokumennya, yaitu di Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Tulang Bawang dan Kota Metro. Sedangkan yang mengatakan melaksanakan lokakarya mini bulanan, tapi tidak dapat memperlihatkan dokumennya di Provinsi Lampung hanya 8,7 persen.

Persentase puskesmas menurut Pelaksanaan Lokakarya Mini Triwulan dan ada dokumennya di Provinsi Lampung hanya 41,5 persen. Terbesar di Kabupaten Lampung Selatan (75%) dan terendah ada di Kabupaten Tulang Bawang (7,1%). Sedangkan Kabupaten yang puskesmasnya tidak melaksanakan Lokakarya Mini Triwulan ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 4.6.1.1.
Persentase Puskesmas Menurut Kegiatan Perencanaan dan Penilaian Kinerja
di Provinsi Lampung Rifaskes 2012

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Rencana Kerja Tahunan (2010)	% Penilaian Kinerja
1	Lampung Barat	18	77.8	38.9
2	Tanggamus	22	100	81.8
3	Lampung Selatan	24	100	83.3
4	Lampung Timur	31	61.3	80.6
5	Lampung Tengah	36	100	75.0
6	Lampung Utara	25	96.0	96.0
7	Way Kanan	18	100	66.7
8	Tulang Bawang	14	100	92.9
9	Pesawaran	12	100	100
10	Pringsewu	10	100	90.0
11	Mesuji	8	100	50.0
12	Tulangbawang Barat	9	100	100
13	Kota Bandar Lampung	27	100	74.1
14	Kota Metro	11	90.9	36.4
LAMPUNG		265	93.2	77.0

Tabel 4.6.1.2.
Persentase Puskesmas Menurut Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan
di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan			
			Lokakarya Mini Bulanan		Lokakarya Mini Triwulan	
			% Ya, ada Dokumen	% Ya, Tidak ada Dokumen	% Ya, ada Dokumen	% Ya, Tidak ada Dokumen
1	Lampung Barat	18	61.1	27.8	22.2	16.7
2	Tanggamus	22	100	0	31.8	22.7
3	Lampung Selatan	24	100	0	75.0	8.3
4	Lampung Timur	31	83.9	12.9	16.1	16.1
5	Lampung Tengah	36	94.4	2.8	69.4	11.1
6	Lampung Utara	25	80.0	16.0	48.0	8.0
7	Way Kanan	18	88.9	11.1	55.6	5.6
8	Tulang Bawang	14	100	0	7.1	35.7
9	Pesawaran	12	91.7	8.3	50.0	16.7
10	Pringsewu	10	100	0	60.0	0
11	Mesuji	8	62.5	12.5	50.0	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	11.1	55.6	0	88.9
13	Kota Bandar Lampung	27	96.3	0	37.0	7.4
14	Kota Metro	11	100	0	18.2	0
LAMPUNG		265	87.2	8.7	41.5	15.1

Tabel 4.6.1.3.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Dokumen dan Keterlibatan PJ
Program dalam menyusun RKT di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk dengan RKT	% Ketersediaan Dokumen		% Keterlibatan PJ Program dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
			Rencana Usulan Kegiatan (RUK)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)	
1	Lampung Barat	14	85.7	78.6	100
2	Tanggamus	22	100	100	81.8
3	Lampung Selatan	24	100	100	100
4	Lampung Timur	19	84.2	89.5	100
5	Lampung Tengah	36	100	94.4	100
6	Lampung Utara	24	100	95.8	91.7
7	Way Kanan	18	88.9	88.9	83.3
8	Tulang Bawang	14	57.1	85.7	100
9	Pesawaran	12	75.0	91.7	91.7
10	Pringsewu	10	90.0	80.0	100
11	Mesuji	8	75.0	87.5	75.0
12	Tulangbawang Barat	9	100	100	100
13	Kota Bandar Lampung	27	100	96.3	100
14	Kota Metro	10	100	100	100
LAMPUNG		247	92.3	93.1	95.1

Dari 247 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, Di Provinsi Lampung terdapat 92,3 persen yang memiliki dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK). Ada 5 Kabupaten yang seluruh puskesmasnya membuat RUK (100%) namun masih ada 9 Kabupaten Kota yang belum semua puskesmasnya menyusun RUK yaitu berkisar antara 57-90 persen, dimana Kabupaten Tulang Bawang merupakan Kabupaten yang puskesmasnya terendah dalam menyusun RUK (57%).

Bila dilihat dari keberadaan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), dari 247 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, di Provinsi Lampung terdapat 93,1 persen Puskesmas yang memiliki dokumen RPK. Seluruh Puskesmas di 4 Kabupaten/kota telah memiliki dokumen RPK. Sementara terendah ada di Kabupaten Lampung Barat yang puskesmasnya menyusun RPK (78,6%).

Dari 247 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, di Provinsi Lampung terdapat 95,1 persen yang mengikutsertakan penanggung jawab program dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Ada 7 Kabupaten Kota yang seluruh puskesmasnya membuat RKT yang didampingi oleh penanggung jawab progra, dimana Kabupaten Mesuji (75%) merupakan Kabupaten yang terendah dalam menyusun RKT dengan didampingi oleh penanggung jawab program

4.6.2. Sistem Informasi Puskesmas

Tabel 4.6.2.1. menunjukkan Sistem Informasi yang dimiliki Puskesmas, diantaranya mengenai penggunaan sistem komputerisasi di Puskesmas, yaitu computer antar ruang terhubung satu sama lain dengan jaringan tertentu (LAN/Local Area Network) dan Penggunaan Sistem Pengkodean Penyakit dalam pencatatan pelaporan dengan ICD X di Puskesmas.

Penggunaan system komputerisasi di Puskesmas yang terhubung satu sama lain dengan jaringan tertentu (LAN/Local Area Network) di Provinsi Lampung hanya 11,7%. Persentase tertinggi di Kota Metro (54,5%), kabupaten Lampung barat (44,4%), Kabupaten

Tanggamus (36,4%), Kabupaten Lampung Selatan (16,7%), Kabupaten Lampung Utara (16%) dan Kota Bandar Lampung (3,7%) sedangkan 8 Kabupaten lainnya tidak memiliki system komputerisasi dengan jaringan antar ruangan.

Penggunaan komputer tanpa jaringan antar ruang Provinsi Lampung sebesar 30,9 persen puskesmas. Persentase yang terendah di Kota Metro (0%) dan Kabupaten Pesawaran (0%) sedangkan 11 Kabupaten Kota lainnya berkisar antara 5,6-88,5 persen. Sementara penggunaan komputer tanpa jaringan antar ruangan yang tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang Barat (88,5%).

Tabel 4.6.2.1.
Persentase Puskesmas Menurut Sistem Informasi Puskesmas di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Penggunaan sistem komputer untuk pelayanan dalam gedung		% Penggunaan International code disease (ICD) X di Puskesmas
			Ya, ada jaringan antar ruangan	Ya, menggunakan komputer tapi tidak ada jaringan antar ruang	
1	Lampung Barat	18	44.4	5.6	61.1
2	Tanggamus	22	36.4	9.1	50.0
3	Lampung Selatan	24	16.7	58.3	83.3
4	Lampung Timur	31	0	41.9	93.5
5	Lampung Tengah	36	0	50.0	5.6
6	Lampung Utara	25	16.0	24.0	76.0
7	Way Kanan	18	0	22.2	27.8
8	Tulang Bawang	14	0	42.9	85.7
9	Pesawaran	12	0	0	50.0
10	Pringsewu	10	0	30.0	50.0
11	Mesuji	8	0	25.0	37.5
12	Tulangbawang Barat	9	0	88.9	0
13	Kota Bandar Lampung	27	3.7	18.5	100
14	Kota Metro	11	54.5	0	45.5
LAMPUNG		265	11.7	30.9	58.5

Puskesmas yang telah menggunakan system pengkodean penyakit dalam pencatatan pelaporan dengan ICD X di Provinsi Lampung sebesar 58,5 persen. Persentase tertinggi di Kota Bandar Lampung (100%), sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat seluruh Puskesmasnya belum menggunakan ICD X (0%) sedangkan 13 Kabupaten Kota lainnya berkisar antara 5,6-93,5 persen.

4.7. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Di dalam melaksanakan fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, sesuai Kepmenkes No. 128/2004, seluruh Puskesmas di Indonesia diharapkan melaksanakan program Upaya Kesehatan Wajib. Sedangkan Upaya Kesehatan Pengembangan di setiap Puskesmas disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana masing-masing Puskesmas, juga dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Untuk kelancaran pelaksanaan setiap upaya atau program kegiatan ditentukan siapa penanggung jawabnya dan dibuatkan Surat Keputusannya oleh pejabat yang berwenang menetapkan. Pada tabel 4.7.1.a. dan 4.7.1.b. dapat kita lihat tentang kesesuaian latar belakang pendidikan penanggung jawab program Upaya Kesehatan Wajib.

Tabel 4.7.1.a.
Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program
di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Kesesuaian PJ Program		
			Promosi Kesehatan	Kesehatan Lingkungan	KIA/KB
1	Lampung Barat	18	16.7	44.4	94.4
2	Tanggamus	22	13.6	77.3	100
3	Lampung Selatan	24	29.2	83.3	100
4	Lampung Timur	31	6.5	67.7	96.8
5	Lampung Tengah	36	25.0	86.1	100
6	Lampung Utara	25	32.0	72.0	96.0
7	Way Kanan	18	22.2	77.8	100
8	Tulang Bawang	14	7.1	85.7	100
9	Pesawaran	12	33.3	66.7	100
10	Pringsewu	10	20.0	100	100
11	Mesuji	8	0	50.0	100
12	Tulangbawang Barat	9	11.1	88.9	100
13	Kota Bandar Lampung	27	18.5	92.6	100
14	Kota Metro	11	45.5	100	100
LAMPUNG		265	20.4	78.1	98.9

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Promosi Kesehatan adalah dari DIII Promosi Kesehatan atau S1 Kesehatan Masyarakat. Pada Tabel 4.7.1.a. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Provinsi Lampung adalah sebesar 20,4 persen. Persentase tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kota Metro (20,4%). Persentase Puskesmas terendah mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kabupaten Mesuji (0%), berikutnya adalah Kabupaten Lampung Timur (6,5%) dan Kabupaten Tulang Bawang (7,1%).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan adalah DIII Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian atau S1 Kesehatan Masyarakat. Persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Provinsi Lampung adalah sebesar 78,1 persen. Persentase tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kota Metro (100%), Kota Bandar Lampung (92,6%), Kabupaten Tulang Bawang (88,9%), Kabupaten Tulang Bawang Barat (85,7%) dan Kabupaten Lampung Selatan (83,3%). Persentase terendah mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kabupaten Lampung Barat (44,4%).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program KIA/KB adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, atau Dokter. Persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Lampung adalah sebesar 98,9 persen. Terdapat 11 Kabupaten/Kota dengan persentase 100,0 persen dalam hal penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Persentase terendah yang mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kabupaten Lampung

Barat (94,4%), berikutnya adalah Kabupaten Lampung Utara (96%) dan Kabupaten Lampung Timur (96,8%).

Tabel 4.7.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program
di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Kesesuaian PJ Program		
			Perbaikan Gizi Masyarakat	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Pengobatan
1	Lampung Barat	18	66.7	66.7	55.6
2	Tanggamus	22	59.1	59.1	63.6
3	Lampung Selatan	24	58.3	66.7	62.5
4	Lampung Timur	31	35.5	87.1	71.0
5	Lampung Tengah	36	38.9	63.9	38.9
6	Lampung Utara	25	48.0	76.0	60.0
7	Way Kanan	18	50.0	66.7	94.4
8	Tulang Bawang	14	28.6	100	78.6
9	Pesawaran	12	83.3	50.0	100
10	Pringsewu	10	80.0	60.0	70.0
11	Mesuji	8	0	87.5	62.5
12	Tulangbawang Barat	9	77.8	66.7	100
13	Kota Bandar Lampung	27	100	85.2	77.8
14	Kota Metro	11	90.9	72.7	90.9
LAMPUNG		265	57.0	72.5	68.7

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah DIII Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat, atau S1 Gizi. Kesesuaian latar belakang pendidikan penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung sebesar 57 persen. Seluruh Puskesmas di Kota Bandar Lampung mempunyai penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (100%), sedangkan kabupaten Mesuji merupakan kabupaten yang tidak memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat (0%).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, atau Dokter. Persentase Puskesmas di Provinsi Lampung yang mempunyai penanggungjawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 72,5 persen. Persentase tertinggi yaitu Kabupaten Tulang bawang dimana seluruh Puskesmasnya sudah mempunyai penanggung jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (100%). Persentase terendah adalah Kabupaten Pesawaran (50%), berikutnya adalah Kabupaten Tanggamus (59,1%).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Pengobatan adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, atau Dokter. Di Provinsi Lampung, Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 68,7 persen. Persentase tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%) dan persentase terendah adalah Kabupaten Lampung Barat (55,6%).

4.8. PELAYANAN KESEHATAN

4.8.1. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

4.8.1.1. Kegiatan Program Promosi Kesehatan

Kegiatan dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi, Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pembinaan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pembinaan Forum Desa Siaga, dan Pembinaan Program Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Angka di Provinsi Lampung, dari keempat jenis kegiatan Program Promosi Kesehatan, kegiatan Penyuluhan PHBS merupakan presentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (97%) dan disusul oleh kegiatan Pembinaan di Poskesdes (93,6%), Pembinaan Program Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) (88,3%) dan Pembinaan Forum Desa Siaga (78,5%), dan untuk Provinsi Lampung sebesar 72,1 persen Puskesmas melakukan keempat jenis kegiatan dalam Program Promosi Kesehatan secara lengkap (Tabel 4.8.1.1.1).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penyuluhan PHBS dalam lingkup provinsi adalah sebesar 97 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan penyuluhan PHBS terdapat di 9 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sedangkan 5 Kabupaten lainnya berkisar antara 86,4-96,8 persen.

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan pembinaan di Poskesdes dalam lingkup provinsi adalah sebesar 93,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan di Poskesdes terdapat di 6 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Lampung barat, Lampung Selatan, Pesawarn, Pringsewu, Tulang bawang barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sedangkan 8 Kabupaten lainnya memiliki persentase Puskesmas berkisar antara 62,5-96,8 persen.

Tabel 4.8.1.1.1.

Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	PHBS	Pembinaan Poskesdes	Pembinaan Forum Desa Siaga	UKBM	Kegiatan Lengkap Promosi Kesehatan
1	Lampung Barat	18	100	100	94.4	94.4	88.9
2	Tanggamus	22	86.4	81.8	77.3	90.9	68.2
3	Lampung Selatan	24	100	100	91.7	100	91.7
4	Lampung Timur	31	96.8	96.8	71.0	90.3	61.3
5	Lampung Tengah	36	94.4	94.4	80.6	94.4	72.2
6	Lampung Utara	25	96.0	88.0	72.0	84.0	64.0
7	Way Kanan	18	100	88.9	55.6	66.7	50.0
8	Tulang Bawang	14	92.9	85.7	64.3	71.4	50.0
9	Pesawaran	12	100	100	91.7	66.7	66.7
10	Pringsewu	10	100	100	100	100	100
11	Mesuji	8	100	62.5	62.5	75.0	62.5
12	Tulangbawang Barat	9	100	100	22.2	66.7	22.2
13	Kota Bandar Lampung	27	100	100	92.6	100	92.6
14	Kota Metro	11	100	100	100	100	100
LAMPUNG		265	97.0	93.6	78.5	88.3	72.1

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 88,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan UKBM terdapat di

Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sedangkan 10 Kabupaten lainnya berkisar antara 66,7-94,4 persen.

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 78,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga terdapat di 2 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro. Sedangkan 12 Kabupaten Kota lainnya berkisar antara 22,2-94,4 persen.

Persentase Puskesmas yang melakukan secara lengkap keempat jenis kegiatan dalam Program Promosi Kesehatan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 72,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan secara lengkap dalam Program Promosi Kesehatan terdapat di Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu (100%) sedangkan yang terendah ada di Tulang Bawang barat (22,6%).

4.8.1.2. Pelatihan Program Promosi Kesehatan

Pelatihan petugas Puskesmas dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pelatihan Desa Siaga dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2009 dan 2010. Di Provinsi Lampung, dari ketiga jenis pelatihan Program Promosi Kesehatan, Pelatihan PHBS merupakan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (50,9%) dan berikutnya adalah Pelatihan Desa Siaga (49,8%), dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (23%). Di provinsi Lampung, sebesar 18,1 persen Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat pelatihan dalam Program Promosi Kesehatan (Tabel 4.8.1.2.1).

Tabel 4.8.1.2.1
Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan Pada Pelatihan Program Promosi Kesehatan Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan PHBS	Pelatihan Desa Siaga	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Lengkap Promosi Kesehatan
1	Lampung Barat	18	55.6	38.9	16.7	16.7
2	Tanggamus	22	45.5	45.5	22.7	18.2
3	Lampung Selatan	24	62.5	66.7	37.5	37.5
4	Lampung Timur	31	74.2	74.2	48.4	38.7
5	Lampung Tengah	36	33.3	52.8	19.4	16.7
6	Lampung Utara	25	48.0	48.0	28.0	20.0
7	Way Kanan	18	38.9	50.0	16.7	11.1
8	Tulang Bawang	14	14.3	28.6	0	0
9	Pesawaran	12	58.3	41.7	25.0	8.3
10	Pringsewu	10	40.0	50.0	20.0	10.0
11	Mesuji	8	87.5	62.5	12.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	77.8	55.6	0	0
13	Kota Bandar Lampung	27	51.9	37.0	18.5	14.8
14	Kota Metro	11	45.5	18.2	9.1	0
LAMPUNG		265	50.9	49.8	23.0	18.1

Persentase petugas Puskesmas yang mengikuti Pelatihan PHBS dalam lingkup provinsi adalah sebesar 50,9 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan PHBS terdapat di Kabupaten Mesuji (87,5%) dan yang terendah ada di Kabupaten Tulang Bawang 14,3 persen.

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 49,8 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga terdapat di Kabupaten Lampung Timur (74,2%) dan persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga ditemukan di Kota Metro (18,2%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam lingkup provinsi adalah sebesar 23 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat terdapat di Kabupaten Lampung Timur (48,4%) dan Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dapat ditemukan di 2 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat (0%)

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap ketiga jenis pelatihan Program Promosi Kesehatan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 18,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti secara lengkap ketiga jenis pelatihan dalam Program Promosi Kesehatan adalah di Kabupaten Lampung Timur (38,7%) dan persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Program Promosi Kesehatan ada di 3 Kabupaten/Kota yakni, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kota Metro (0%).

4.8.1.3. Pedoman Program Promosi Kesehatan

Pedoman Program Promosi Kesehatan diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Promosi Kesehatan, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes, Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga. Pada Provinsi Lampung pedoman Program Promosi Kesehatan terbanyak dimiliki oleh puskesmas adalah Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga (66,4%) kemudian berturut turut Juknis Poskesdes (57,7%) dan Juknis Penggerakan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga (56,2%). Di Provinsi Lampung persentase Puskesmas memiliki ketiga jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 49,4 persen (Tabel 4.8.1.3.1).

Tabel 4.8.1.3.1.

Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Promosi Kesehatan di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Juknis Poskesdes	Pengembangan Desa Siaga	Juknis Penggerakan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga	Pedoman Lengkap Promosi Kesehatan
1	Lampung Barat	18	77.8	83.3	77.8	77.8
2	Tanggamus	22	59.1	59.1	50.0	45.5
3	Lampung Selatan	24	37.5	70.8	41.7	29.2
4	Lampung Timur	31	64.5	58.1	58.1	51.6
5	Lampung Tengah	36	66.7	69.4	61.1	55.6
6	Lampung Utara	25	48.0	60.0	48.0	32.0
7	Way Kanan	18	61.1	61.1	55.6	55.6
8	Tulang Bawang	14	50.0	64.3	50.0	35.7
9	Pesawaran	12	50.0	50.0	33.3	33.3
10	Pringsewu	10	80.0	90.0	80.0	80.0
11	Mesuji	8	12.5	25.0	12.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	100	100	100	100
13	Kota Bandar Lampung	27	63.0	74.1	74.1	63.0
14	Kota Metro	11	18.2	63.6	27.3	18.2
LAMPUNG		265	57.7	66.4	56.2	49.4

Persentase Puskesmas yang memiliki petunjuk teknis pengembangan dan penyelenggaraan Poskesdes dalam lingkup provinsi adalah sebesar 57,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes ditemukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%) dan Kota Metro (18,2%).

Persentase Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 66,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dapat ditemukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga ditemukan pada Kabupaten mesuji (25%).

Persentase Puskesmas yang memiliki Petunjuk Teknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 56,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga ditemukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga ditemukan di Kabupaten Mesuji (12,5%).

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap (yaitu memiliki ketiga jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 49,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap ditemukan di Kabupaten Tulang bawang Barat (100%). Persentase terendah Puskesmas memiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap (yaitu memiliki ketiga jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) ditemukan di Kabupaten Mesuji (12,5%).

4.8.1.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis diperlukan dalam Program Promosi Kesehatan untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Promosi Kesehatan. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis dapat berupa kunjungan supervise atau bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi (monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pada Provinsi Lampung bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam Program Promosi Kesehatan yang paling banyak diterima Puskesmas adalah supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas (71,7%) dan pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (70,6%) dan kemudian umpan balik (46,4%). Di provinsi Lampung persentase Puskesmas menerima lengkap ketiga bentuk evaluasi dan bimbingan (kunjungan supervisi, umpan balik tertulis dan pertemuan monev) adalah sebesar 39,2 persen. (Tabel 4.8.1.4.1.).

Tabel 4.8.1.4.1.
 Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan
 Program Promosi Kesehatan di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap
1	Lampung Barat	18	72.2	44.4	44.4	33.3
2	Tanggamus	22	59.1	40.9	59.1	40.9
3	Lampung Selatan	24	83.3	62.5	79.2	58.3
4	Lampung Timur	31	67.7	48.4	61.3	32.3
5	Lampung Tengah	36	61.1	30.6	63.9	27.8
6	Lampung Utara	25	60.0	72.0	76.0	48.0
7	Way Kanan	18	77.8	33.3	33.3	22.2
8	Tulang Bawang	14	64.3	14.3	92.9	14.3
9	Pesawaran	12	50.0	25.0	75.0	25.0
10	Pringsewu	10	90.0	90.0	100	80.0
11	Mesuji	8	62.5	37.5	37.5	25.0
12	Tulangbawang Barat	9	77.8	66.7	88.9	66.7
13	Kota Bandar Lampung	27	96.3	55.6	96.3	55.6
14	Kota Metro	11	90.9	27.3	100	27.3
LAMPUNG		265	71.7	46.4	70.6	39.2

Di Provinsi Lampung, dari 265 Puskesmas sebesar 71,7 persen Puskesmas menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan di Kota Bandar Lampung (96,3%) sedangkan persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Pringsewu (50%).

Di Provinsi Lampung, dari 265 Puskesmas sebesar 46,4 persen Puskesmas menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan di Kabupaten Pringsewu (90%), sedangkan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (14,3%).

Di Provinsi Lampung, dari 265 Puskesmas sebesar 70,6 persen Puskesmas mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi Program Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Promosi Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ditemukan di 2 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro (100%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan di Kabupaten Way Kanan (33,3%).

Di Provinsi Lampung, dari 265 Puskesmas, sebesar 39,2 persen Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap (ketiga jenis) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi, dan Bimbingan secara lengkap untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan di Kabupaten Pringsewu (80%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap ditemukan di Kabupaten Tulang Bawang (14,3%).

4.8.2. PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN

4.8.2.1. Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan

Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah, Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan/Minuman (TPM), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga, Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan Pemberantasan Sarang Nyamuk atau Pemeriksaan Jentik Nyamuk. Di Provinsi Lampung, dari keenam jenis kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) merupakan prosentase tertinggi yang dilakukan puskesmas (92,1%) kemudian disusul oleh Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan/Minuman (TPM) (89,8%), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga (89,4%) dan disusul oleh Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah (86,4%), Pemberantasan Sarang Nyamuk/Pemeriksaan Jentik Nyamuk (86%), Pelayanan sanitasi (55,8%) dan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (19,2%). Di Provinsi Lampung sebesar 11,7 persen Puskesmas melakukan lengkap keenam kegiatan dalam Program Kesehatan Lingkungan (Tabel 4.8.2.1.1.a dan 4.8.2.1.1.b).

Di Provinsi Lampung persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah adalah sebesar 86,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah terdapat di 5 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat (100%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah ditemukan di Lampung Barat (50%).

Tabel 4.8.2.1.1.a.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah	Pemeriksaan Sanitasi TTU	Pemeriksaan Sanitasi Tempat Makanan Minuman	Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga
1	Lampung Barat	18	50.0	72.2	55.6	72.2
2	Tanggamus	22	86.4	95.5	86.4	100
3	Lampung Selatan	24	100	95.8	95.8	100
4	Lampung Timur	31	96.8	96.8	96.8	87.1
5	Lampung Tengah	36	97.2	94.4	94.4	88.9
6	Lampung Utara	25	76.0	92.0	88.0	84.0
7	Way Kanan	18	66.7	83.3	88.9	83.3
8	Tulang Bawang	14	85.7	85.7	85.7	71.4
9	Pesawaran	12	75.0	91.7	83.3	100
10	Pringsewu	10	100	100	100	100
11	Mesuji	8	100	100	87.5	100
12	Tulangbawang Barat	9	100	100	100	100
13	Kota Bandar Lampung	27	81.5	88.9	92.6	85.2
14	Kota Metro	11	100	100	100	100
LAMPUNG		265	86.4	92.1	89.8	89.4

Tabel 4.8.2.1.1.b.
 Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan
 di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah	Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik	Pelayanan Klinik Sanitasi	Kegiatan Lengkap Program Kesling
1	Lampung Barat	18	11.1	77.8	33.3	0
2	Tanggamus	22	18.2	100	31.8	13.6
3	Lampung Selatan	24	29.2	100	79.2	25.0
4	Lampung Timur	31	9.7	74.2	19.4	6.5
5	Lampung Tengah	36	25.0	94.4	41.7	11.1
6	Lampung Utara	25	24.0	72.0	64.0	16.0
7	Way Kanan	18	27.8	66.7	33.3	11.1
8	Tulang Bawang	14	14.3	71.4	78.6	7.1
9	Pesawaran	12	0	83.3	41.7	0
10	Pringsewu	10	30.0	90.0	80.0	20.0
11	Mesuji	8	37.5	87.5	100	37.5
12	Tulangbawang Barat	9	11.1	100	100	11.1
13	Kota Bandar Lampung	27	14.8	92.6	77.8	3.7
14	Kota Metro	11	18.2	100	100	18.2
LAMPUNG		265	19.2	86.0	55.8	11.7

Di Provinsi Lampung persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah sebesar 92,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TTU ditemukan di 4 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Kota Metro. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemeriksaan sanitasi TTU ditemukan di Kabupaten Lampung Barat (72,2%).

Di Provinsi Lampung persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan/ Minuman (TPM) adalah sebesar 89,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan TPM ditemukan di 3 Kabupaten/Kota yakni, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Kota Metro (100%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPM ditemukan di Kabupaten Lampung barat (55,6%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 89,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga ditemukan di 6 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang bawang Barat dan Kota Metro (masing-masing 100,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga ditemukan di Kabupaten Tulang Bawang (71,4%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dalam lingkup provinsi adalah sebesar 19,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah ditemukan di Kabupaten Pringsewu (30%) dan persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah ditemukan di Kabupaten Pesawaran (0%) dan Lampung Timur (9,7%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jenis Nyamuk dalam lingkup provinsi adalah sebesar 86 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan

Jentik Nyamuk ditemukan di 4 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Tulang Bawang barat dan Kota Metro (100%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk ditemukan di Kabupaten Tulang bawang (71,4%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan lengkap (melaksanakan keenam kegiatan tersebut di atas) dalam Program Kesehatan Lingkungan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 11,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Mesuji (37,5%) dan Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Program Kesehatan Lingkungan ditemukan di 2 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Lampung Barat dan Pesawaran (0%).

4.8.2.2. Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pelatihan Air Minum/Bersih, Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman, Pelatihan Pengelolaan Sampah, dan Pelatihan Pengelolaan Air Limbah yang diikuti petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Angka Provinsi Lampung untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, persentase tertinggi adalah Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman (18,9%) berikutnya Pelatihan Air Bersih/Minum (14,7%), Pelatihan Pengelolaan Air Limbah (6,8%) dan pelatihan Pengelolaan Sampah (6%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan di atas adalah sebesar 5,7 persen (Tabel 4.8.2.2.1).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/Minum dalam lingkup provinsi adalah sebesar 14,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/Minum terdapat di Kabupaten Lampung Timur (41,9%) dan persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/Minum terdapat di Kabupaten Lampung Selatan (4,2%) serta ada 4 Kabupaten yang tidak melakukan pelatihan air minum/air bersih yaitu Kabupaten Tanggamus, Tulang Bawang, Pesawaran dan Pringsewu.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman dalam lingkup provinsi adalah sebesar 18,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman terdapat di Kabupaten Lampung Timur (67,7%) dan persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman terdapat di Kabupaten Tanggamus (4,5%) serta ada 3 Kabupaten yang tidak melaksanakan pelatihan sanitasi makanan/minuman yaitu Kabupaten Tulang bawang, Pesawaran dan Pringsewu (0%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah dalam lingkup provinsi adalah sebesar 6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah terdapat di Kota Metro (18,2%) dan Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah ada di Kabupaten Lampung Tengah (2,8%) serta terdapat 4 kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah (0,0%) yaitu di Kabupaten Tulang Bawang, Pesawaran dan Pringsewu.

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Limbah dalam lingkup provinsi adalah sebesar 6,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Limbah terdapat di Kabupaten Way Kanan (16,7%) dan persentase terendah ada di Kabupaten Lampung Tengah (2,8%). Terdapat 4 kabupaten/kota dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Limbah (0,0%) yaitu di Kabupaten Tanggamus, Tulang Bawang, Pesawaran dan Pringsewu.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Lingkungan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 5,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan terdapat di Kabupaten Way Kanan dan persentase terendah ada di kabupaten Lampung Tengah (2,8%). Terdapat 4 kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang keseluruhan petugasnya Puskesmasnya tidak mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Lingkungan (0,0%), yaitu Kabupaten Tanggamus, Tulang Bawang, Pesawaran dan Pringsewu.

Tabel 4.8.2.2.1.

Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Air Minum/Air Bersih	Pelatihan Sanitasi Makmin	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Pelatihan Pengelolaan Air Limbah	Pelatihan Lengkap
1	Lampung Barat	18	11.1	11.1	5.6	5.6	5.6
2	Tanggamus	22	0	4.5	0	0	0
3	Lampung Selatan	24	4.2	16.7	4.2	4.2	4.2
4	Lampung Timur	31	41.9	67.7	3.2	9.7	3.2
5	Lampung Tengah	36	2.8	5.6	2.8	2.8	2.8
6	Lampung Utara	25	20.0	28.0	16.0	16.0	16.0
7	Way Kanan	18	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
8	Tulang Bawang	14	0	0	0	0	0
9	Pesawaran	12	0	0	0	0	0
10	Pringsewu	10	0	0	0	0	0
11	Mesuji	8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	22.2	33.3	11.1	11.1	11.1
13	Kota Bandar Lampung	27	37.0	18.5	3.7	7.4	3.7
14	Kota Metro	11	9.1	9.1	18.2	9.1	9.1
LAMPUNG		265	14.7	18.9	6.0	6.8	5.7

4.8.2.3. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan

Pedoman Program Kesehatan Lingkungan diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Buku pedoman Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, dan Permenkes Tentang Persyaratan Kualitas Air. Angka provinsi Lampung untuk pedoman Program Kesehatan Lingkungan terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan (52,8%) diikuti oleh Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air (49,8%) dan Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah (35,5%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki secara lengkap ketiga jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 30,2 persen (Tabel 4.8.2.3.1).

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah adalah sebesar 35,5 persen. Persentase tertinggi puskesmas memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (88,9%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah terdapat di Kabupaten Mesuji (12,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan adalah sebesar 52,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air terdapat di Kabupaten Mesuji (12,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air adalah sebesar 49,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air terdapat di Kabupaten Tanggamus (31,8%).

Tabel 4.8.2.3.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Kesehatan Lingkungan,
di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman Penyelenggaraan Kesling di Sekolah	Pedoman Penyelenggaraan Kesling	Permenkes Tentang Kualitas Air	Pedoman Lengkap Kesehatan Lingkungan
1	Lampung Barat	18	33.3	55.6	44.4	27.8
2	Tanggamus	22	27.3	40.9	31.8	18.2
3	Lampung Selatan	24	37.5	37.5	50.0	33.3
4	Lampung Timur	31	45.2	54.8	54.8	38.7
5	Lampung Tengah	36	33.3	66.7	47.2	27.8
6	Lampung Utara	25	40.0	60.0	60.0	36.0
7	Way Kanan	18	38.9	55.6	44.4	38.9
8	Tulang Bawang	14	21.4	42.9	35.7	14.3
9	Pesawaran	12	25.0	41.7	33.3	8.3
10	Pringsewu	10	20.0	50.0	60.0	20.0
11	Mesuji	8	12.5	12.5	37.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	100	100	88.9
13	Kota Bandar Lampung	27	40.7	48.1	59.3	37.0
14	Kota Metro	11	18.2	63.6	45.5	9.1
LAMPUNG		265	35.5	52.8	49.8	30.2

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki petunjuk teknis dan pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap sebesar 30,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki pedoman Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap terdapat di Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat dan persentase terendah Puskesmas memiliki secara lengkap pedoman Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Pesawaran (8,3%).

4.8.2.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Kesehatan Lingkungan untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan

dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi (monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Angka provinsi Lampung untuk bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah dalam bentuk supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (66,8%) diikuti oleh pertemuan monev (55,5%) dan umpan balik (43%). Angka Provinsi Lampung untuk Puskesmas yang menerima secara lengkap ketiga bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah sebesar 31,7 persen (Tabel 4.8.2.4.1.).

Tabel 4.8.2.4.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan, di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesling			
			Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap
1	Lampung Barat	18	55.6	16.7	33.3	11.1
2	Tanggamus	22	77.3	18.2	13.6	13.6
3	Lampung Selatan	24	91.7	75.0	95.8	62.5
4	Lampung Timur	31	51.6	35.5	61.3	25.8
5	Lampung Tengah	36	58.3	47.2	27.8	13.9
6	Lampung Utara	25	64.0	48.0	60.0	40.0
7	Way Kanan	18	72.2	22.2	38.9	5.6
8	Tulang Bawang	14	50.0	7.1	78.6	7.1
9	Pesawaran	12	66.7	41.7	75.0	41.7
10	Pringsewu	10	100	100	100	100
11	Mesuji	8	37.5	37.5	62.5	25.0
12	Tulangbawang Barat	9	100	88.9	100	88.9
13	Kota Bandar Lampung	27	63.0	40.7	37.0	29.6
14	Kota Metro	11	72.7	63.6	90.9	54.5
LAMPUNG		265	66.8	43.0	55.5	31.7

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebesar 66,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Pringsewu (100%) dan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Kesehatan Lingkungan di Puskesmas terdapat di Kabupaten Mesuji (37,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk umpan balik adalah sebesar 43 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Pringsewu (100%) dan persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Tulang Bawang (7,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk pertemuan monitoring dan evaluasi adalah sebesar 55,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Pringsewu (100%) dan persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Tanggamus (13,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima ketiga bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap adalah sebesar 31,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Pringsewu (100%) dan persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap terdapat di Kabupaten Way Kanan (5,6%).

4.8.3. PROGRAM KESEHATAN IBU

4.8.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu

Kegiatan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas, Kelas Ibu (Hamil dan Nifas), dan Pelayanan Antenatal Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas pada tahun 2010. Angka Provinsi Lampung untuk keempat jenis kegiatan kesehatan ibu, kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (92,5%) dan diikuti oleh Pelayanan Antenatal Terintegrasi (84,5%) Kemitraan Bidan dan Dukun (81,5%), dan Kelas Ibu Hamil dan Nifas (74,7%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan keempat jenis kegiatan Program Kesehatan Ibu secara lengkap adalah sebesar 17,7 persen (Tabel 4.8.3.1.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) adalah sebesar 92,5 persen. Terdapat 3 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang seluruh Puskesmasnya (100%) melakukan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), yaitu Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan, Kota bandar lampung dan Kota Metro (100%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) terdapat di Kabupaten Pringsewu (80%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas adalah sebesar 81,5 persen. Terdapat satu kabupaten/kota dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang seluruh Puskesmasnya melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun (100%) yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas terdapat di Kabupaten Mesuji (50%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas adalah sebesar 74,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran dan Kota Metro (100%). Persentase Puskesmas terendah yang melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas terdapat di Kota Prabumulih (14,3%) berikutnya adalah Kabupaten Tulang Bawang barat (33,3%).

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi di Puskesmas adalah sebesar 84,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi terdapat di Kabupaten Lampung Timur (96,8%) dan persentase Puskesmas terendah yang melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi terdapat di Kabupaten Kabupaten Mesuji (50%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan keempat jenis kegiatan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 17,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan keempat jenis kegiatan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (42,9%) dan persentase Puskesmas terendah yang melakukan keempat jenis kegiatan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Tanggamus (4,5%) serta terdapat 2 Kabupaten yang tidak melakukan kegiatan lengkap kesehatan ibu yaitu Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu.

Tabel 4.8.3.1.1
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Ibu
di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	P4K	Kemitraan Dukun dan Bidan di Puskesmas	Kelas Ibu (Hamil dan Nifas)	Pelayanan Antenatal Terintegrasi	Kegiatan Lengkap Kesehatan Ibu
1	Lampung Barat	18	94.4	94.4	66.7	83.3	27.8
2	Tanggamus	22	95.5	72.7	54.5	86.4	4.5
3	Lampung Selatan	24	100	87.5	100	91.7	8.3
4	Lampung Timur	31	90.3	80.6	96.8	96.8	19.4
5	Lampung Tengah	36	88.9	86.1	61.1	77.8	11.1
6	Lampung Utara	25	96.0	92.0	84.0	72.0	36.0
7	Way Kanan	18	88.9	94.4	61.1	88.9	38.9
8	Tulang Bawang	14	85.7	85.7	85.7	85.7	42.9
9	Pesawaran	12	83.3	83.3	100	75.0	0
10	Pringsewu	10	80.0	80.0	30.0	90.0	0
11	Mesuji	8	87.5	50.0	50.0	50.0	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	100	33.3	88.9	11.1
13	Kota Bandar Lampung	27	100	63.0	77.8	92.6	14.8
14	Kota Metro	11	100	54.5	100	81.8	9.1
LAMPUNG		265	92.5	81.5	74.7	84.5	17.7

4.8.3.2. Pelatihan Program Kesehatan Ibu

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelatihan Pemantauan Wilayah Setempat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) yang diikuti tenaga Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Angka provinsi Lampung, dari ketiga jenis pelatihan Program Kesehatan Ibu, pelatihan APN merupakan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (41,1%) kemudian pelatihan PWS KIA (33,6%), dan pelatihan PONED (12,5%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang secara lengkap mengikuti ketiga jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 5,3 persen (Tabel 4.8.3.2.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan APN adalah 41,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan APN terdapat di Kabupaten Mesuji (75%) dan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Pringsewu (20%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan PONE D adalah sebesar 12,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan PONE D terdapat di Kabupaten Lampung Utara (28%) dan persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan PONE D terdapat di Kabupaten Lampung Timur (3,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan PWS KIA adalah sebesar 33,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan PWS KIA terdapat di Kota Bandar Lampung (63%) dan persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan PWS KIA terdapat di Kabupaten Lampung Timur (3,2%) dan ada satu kabupaten yang tidak melakukan pelatihan PWS-KIA yaitu Kabupaten Tulang Bawang barat (0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 5,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti ketiga jenis pelatihan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Mesuji (12,5%). Terdapat lima Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang seluruh petugas Puskesmasnya tidak mengikuti ketiga jenis pelatihan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu (0,0%), yaitu di Kabupaten Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, Tulang Bawang Barat dan Kota Metro.

Tabel 4.8.3.2.1.

Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan Pelatihan Program Kesehatan Ibu Tahun 2009-2010, di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan APN	Pelatihan PONE D	Pelatihan PWS-KIA	Pelatihan Lengkap Kesehatan Ibu
1	Lampung Barat	18	33.3	22.2	50.0	11.1
2	Tanggamus	22	22.7	4.5	9.1	0
3	Lampung Selatan	24	45.8	8.3	58.3	4.2
4	Lampung Timur	31	29.0	3.2	3.2	0
5	Lampung Tengah	36	47.2	8.3	44.4	5.6
6	Lampung Utara	25	40.0	28.0	44.0	12.0
7	Way Kanan	18	61.1	5.6	22.2	0
8	Tulang Bawang	14	50	21.4	14.3	7.1
9	Pesawaran	12	33.3	8.3	8.3	0
10	Pringsewu	10	20.0	10.0	30.0	10
11	Mesuji	8	75.0	25.0	37.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	44.4	11.1	0	0
13	Kota Bandar Lampung	27	48.1	18.5	63.0	11.1
14	Kota Metro	11	36.4	9.1	54.5	0
LAMPUNG		265	41.1	12.5	33.6	5.3

4.8.3.3. Pedoman Program Kesehatan Ibu

Pedoman Program Kesehatan Ibu diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Kesehatan Ibu, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi, Acuan Asuhan Persalinan Normal (APN), Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Pedoman Kelas Ibu, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil dan Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi, yang dimiliki oleh puskesmas.

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Pedoman Program Kesehatan Ibu yang dimiliki oleh Provinsi Lampung yang terbanyak dimiliki adalah Buku KIA (88,7%) kemudian berturut turut Pedoman APN (78,1%) Pedoman PWS-KIA (65,3%), Pedoman Kelas Ibu (63,4%), Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (57,4%), Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal (44,2%), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil (42,3%) dan Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi (25,3%), dan. Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 12,8 persen.

Tabel 4.8.3.4.1.a.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Kesehatan Ibu di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman APN	Pedoman Buku KIA	Pedoman P4K	Pedoman Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal	Pedoman Kelas Ibu
1	Lampung Barat	18	94.4	94.4	83.3	72.2	55.6
2	Tanggamus	22	50.0	81.8	27.3	27.3	40.9
3	Lampung Selatan	24	79.2	100	58.3	45.8	79.2
4	Lampung Timur	31	80.6	96.8	61.3	58.1	90.3
5	Lampung Tengah	36	83.3	88.9	55.6	22.2	33.3
6	Lampung Utara	25	84.0	84.0	72.0	56.0	72.0
7	Way Kanan	18	83.3	94.4	50.0	44.4	77.8
8	Tulang Bawang	14	85.7	85.7	50.0	28.6	50.0
9	Pesawaran	12	75.0	100	58.3	25.0	50.0
10	Pringsewu	10	80.0	70.0	50.0	60.0	40.0
11	Mesuji	8	87.5	87.5	75.0	62.5	75.0
12	Tulangbawang Barat	9	33.3	44.4	0	22.2	66.7
13	Kota Bandar Lampung	27	77.8	85.2	70.4	48.1	74.1
14	Kota Metro	11	81.8	100	63.6	54.5	81.8
LAMPUNG		265	78.1	88.7	57.4	44.2	63.4

Tabel 4.8.3.4.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Kesehatan Ibu di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman PWS-KIA	Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil	Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kespro	Pedoman Lengkap Kesehatan Ibu
1	Lampung Barat	18	88.9	72.2	33.3	22.2
2	Tanggamus	22	50.0	40.9	13.6	13.6
3	Lampung Selatan	24	66.7	54.2	33.3	8.3
4	Lampung Timur	31	58.1	45.2	35.5	12.9
5	Lampung Tengah	36	75.0	8.3	11.1	5.6
6	Lampung Utara	25	76.0	40.0	28.0	16.0
7	Way Kanan	18	77.8	61.1	33.3	16.7
8	Tulang Bawang	14	57.1	28.6	14.3	7.1
9	Pesawaran	12	41.7	16.7	8.3	8.3
10	Pringsewu	10	60.0	50.0	40.0	20.0
11	Mesuji	8	62.5	62.5	25.0	25.0
12	Tulangbawang Barat	9	44.4	33.3	11.1	0
13	Kota Bandar Lampung	27	70.4	66.7	37.0	18.5
14	Kota Metro	11	45.5	18.2	18.2	9.1
LAMPUNG		265	65.3	42.3	25.3	12.8

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman APN adalah sebesar 78,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman APN terdapat di Kabupaten Lampung Barat (94,4%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman APN terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (33,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku KIA adalah sebesar 88,7 persen. Terdapat 3 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang seluruh Puskesmasnya memiliki Buku KIA (100%), yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Pesawarn dan Kota Metro (100%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku KIA terdapat di Kabupaten Tulang Bawang barat (44,4%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman P4K adalah sebesar 57,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman P4K terdapat di Kabupaten lampung Barat (83,3%) dan persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman P4K terdapat di Kabupaten Tanggamus (27,3%) serta terdapat satu kabupaten yang puskesmasnya tidak memiliki pedoman P4K yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat (0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal adalah sebesar 44,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal terdapat di Kabupaten Lampung Barat (72,2%) dan persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal terdapat di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (22,2%).

Angka provinsi Puskesmas yang memiliki pedoman Kelas Ibu adalah sebesar 63,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman Kelas Ibu terdapat di Kota Palembang (84,2%) berikutnya adalah Kabupaten Lampung Timur (90,3%) dan persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Kelas Ibu terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (33,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman PWS - KIA adalah sebesar 65,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman PWS KIA terdapat di Kabupaten lampung Barat (88,9%) dan persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman PWS KIA terdapat di Kabupaten Pesawaran (41,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil adalah sebesar 42,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil terdapat di Kabupaten Lampung Barat (72,2%) dan persentase terendah ada di Kabupaten Lampung Tengah (8,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi adalah sebesar 25,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi terdapat di Kabupaten Pringsewu (40%) dan persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi terdapat di Kabupaten Pesawaran (8,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki secara lengkap seluruh pedoman tersebut di atas adalah sebesar 12,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki

secara lengkap seluruh pedoman dalam Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Mesuji (25%) dan Terdapat 1 kabupaten dari 15 kabupten/ kota yang seluruh Puskesmasnya tidak memiliki secara lengkap seluruh pedoman dalam Program Kesehatan Ibu (0,0%), yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4.8.3.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Kesehatan Ibu untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Kesehatan Ibu. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, penerimaan umpan balik dalam bentuk tertulis, pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Audit Maternal Perinatal (AMP). Di Provinsi Lampung, bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Program Kesehatan Ibu adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (87,9%) diikuti oleh kunjungan supervisi dan monitoring oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (87,9%), Audit Maternal dan Perinatal (72,5%) dan umpan balik (70,9%). Persentase Puskesmas yang secara lengkap menerima seluruh bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 45,7 persen (Tabel 4.8.3.5.1.).

Tabel 4.8.3.5.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Audit Maternal Perinatal
1	Lampung Barat	18	94.4	66.7	83.3	55.6
2	Tanggamus	22	68.2	36.4	90.9	63.6
3	Lampung Selatan	24	95.8	79.2	91.7	87.5
4	Lampung Timur	31	67.7	71.0	77.4	90.3
5	Lampung Tengah	36	91.7	66.7	91.7	86.1
6	Lampung Utara	25	92.0	60.0	84.0	56.0
7	Way Kanan	18	88.9	83.3	100	66.7
8	Tulang Bawang	14	92.9	50.0	92.9	71.4
9	Pesawaran	12	83.3	41.7	50.0	50.0
10	Pringsewu	10	100	100	100	100
11	Mesuji	8	75.0	87.5	87.5	25.0
12	Tulangbawang Barat	9	100	100	100	33.3
13	Kota Bandar Lampung	27	96.3	92.6	88.9	74.1
14	Kota Metro	11	100	90.9	100	100
LAMPUNG		265	87.9	70.9	87.9	72.5

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 87,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Pringsewu (100%) dan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Lampung Timur (67,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 70,9

persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Pringsewu dan Tulang Bawang barat (100 %) dan persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Tanggamus (36,4%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk pertemuan *monev* di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 87,9 persen. Terdapat 4 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang seluruh Puskesmasnya mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (100%) yaitu Kabupaten Way kanan, Pringsewu, Tulang Bawang barat dan Kota Metro. Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Lampung Timur (77,4%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 72,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro (100%) dan persentase Puskesmas terendah yang mengikuti Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Mesuji (25%).

4.8.4. PROGRAM KESEHATAN BAYI DAN ANAK

4.8.4.1. Kegiatan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan kesehatan bayi dan Anak yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi Manajemen Asfiksia, Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Kelas Ibu Balita, Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), dan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat. Dalam lingkup provinsi, dari keseluruhan jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di atas, kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (90,2%) dan disusul oleh Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) (83,8%), Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) (75,1%), Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat (72,5%), Manajemen Asfiksia (65,7%), Kelas Ibu Balita (57%), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (44,2%) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) (13,6%). Angka provinsi sebesar 9,4 persen Puskesmas melakukan keseluruhan kegiatan di atas secara lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (Tabel 4.8.4.1.1).

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Tabel 4.8.4.1.1.a
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Bayi dan Anak di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Manajemen Asfiksia	MTBM	MTBS	Kelas Ibu Balita	Simulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
1	Lampung Barat	18	88.9	61.1	94.4	61.1	77.8
2	Tanggamus	22	59.1	63.6	90.9	45.5	90.9
3	Lampung Selatan	24	70.8	87.5	100	75.0	91.7
4	Lampung Timur	31	61.3	71.0	74.2	83.9	87.1
5	Lampung Tengah	36	47.2	63.9	88.9	36.1	86.1
6	Lampung Utara	25	56.0	92.0	100	72.0	80.0
7	Way Kanan	18	72.2	55.6	83.3	44.4	66.7
8	Tulang Bawang	14	78.6	78.6	85.7	42.9	64.3
9	Pesawaran	12	75.0	66.7	83.3	58.3	66.7
10	Pringsewu	10	80.0	90.0	90.0	40.0	100
11	Mesuji	8	100	75.0	87.5	25.0	50.0
12	Tulangbawang Barat	9	55.6	77.8	77.8	22.2	88.9
13	Kota Bandar Lampung	27	70.4	92.6	100	70.4	96.3
14	Kota Metro	11	45.5	81.8	100	63.6	100
LAMPUNG		265	65.7	75.1	90.2	57.0	83.8

Tabel 4.8.4.1.1.b
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Bayi dan Anak di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Penanganan Kasus Diare Pada Balita	Kegiatan Lengkap Bayi dan Anak
1	Lampung Barat	18	11.1	38.9	77.8	0
2	Tanggamus	22	4.5	50.0	72.7	4.5
3	Lampung Selatan	24	4.2	29.2	75.0	4.2
4	Lampung Timur	31	19.4	41.9	64.5	9.7
5	Lampung Tengah	36	11.1	38.9	66.7	8.3
6	Lampung Utara	25	20.0	52.0	72.0	16.0
7	Way Kanan	18	11.1	61.1	77.8	11.1
8	Tulang Bawang	14	21.4	50.0	57.1	7.1
9	Pesawaran	12	8.3	8.3	75.0	0
10	Pringsewu	10	20.0	20.0	70.0	10.0
11	Mesuji	8	12.5	25.0	87.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	0	33.3	88.9	0
13	Kota Bandar Lampung	27	25.9	66.7	81.5	25.9
14	Kota Metro	11	9.1	72.7	63.6	9.1
LAMPUNG		265	13.6	44.2	72.5	9.4

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia dalam lingkup provinsi adalah sebesar 65,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia terdapat di Kabupaten Maesuji (100%) dan persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia terdapat di Kota Metro (45,5%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 75,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) terdapat di Kota Bandar Lampung (92,6%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) terdapat di Kabupaten Way Kanan (55,6%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 90,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) terdapat di 4 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro (100%). Persentase terendah ada di Kabupaten Lampung Timur (74,2%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita dalam lingkup provinsi adalah sebesar 57 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita terdapat di Kabupaten Lampung Timur (83,9%) dan Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (22,2%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 83,8 persen. Terdapat 2 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang seluruh Puskesmasnya melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) (100%), yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) terdapat di Kabupaten Mesuji (50%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 13,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) terdapat di Kota Bandar Lampung (25,9%) dan persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) terdapat di Kabupaten Lampung Selatan (4,2%) serta ada satu Kabupaten yang tidak melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) yaitu di Kabupaten Tulang Bawang Barat (0%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 44,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) terdapat di Kota Metro (72,7%) dan persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan PKPR terdapat di Kabupaten Pesawaran (8,3%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat dalam lingkup provinsi adalah sebesar 72,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat terdapat di Kabupaten Tulang Bawang barat (88,9%) dan persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (57,1%)

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan lengkap terkait dengan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 9,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di Kota Bandar Lampung (25,9%). Terdapat 3 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan secara lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (0,0%) yaitu di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran dan kabupaten Tulang Bawang barat.

4.8.4.2. Pelatihan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Kelas Ibu Balita, Pelatihan Pelayanan KTA, Pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), dan Pelatihan Manajemen Terhadap Balita Sakit (MTBS) yang diikuti petugas puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari keseluruhan pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang tersebut di atas, pelatihan manajemen Asfiksia merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh puskesmas (50,9%), pelatihan MTBS (40,4%), Pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) oleh Puskesmas (33,6%) kemudian disusul oleh Pelatihan Kelas Ibu Balita (20,8%) dan pelatihan Pelayanan KTA (4,2%). Dalam lingkup provinsi, sebesar 1,1 persen Puskesmas yang petugasnya mengikuti keseluruhan pelatihan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (Tabel 4.8.4.2.1).

Tabel 4.8.4.2.1
Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan Pelatihan Program Bayi dan Anak Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Manajemen Asfiksia	Pelatihan Kelas Ibu Balita	Pelatihan KTA	Pelatihan SDIDTK	Pelatihan MTBS	Pelatihan Lengkap Kesehatan Bayi dan Anak
1	Lampung Barat	18	27.8	22.2	5.6	16.7	27.8	0
2	Tanggamus	22	81.8	22.7	4.5	18.2	59.1	0
3	Lampung Selatan	24	58.3	12.5	0	45.8	37.5	0
4	Lampung Timur	31	32.3	45.2	6.5	3.2	45.2	0
5	Lampung Tengah	36	27.8	2.8	0	27.8	33.3	0
6	Lampung Utara	25	56.0	24.0	8.0	28.0	64.0	0
7	Way Kanan	18	66.7	22.2	0	38.9	22.2	0
8	Tulang Bawang	14	71.4	14.3	7.1	28.6	64.3	7.1
9	Pesawaran	12	41.7	0	0	33.3	25.0	0
10	Pringsewu	10	20.0	20.0	20.0	70.0	20.0	0
11	Mesuji	8	87.5	0	0	12.5	37.5	0
12	Tulangbawang Barat	9	100	0	0	11.1	11.1	0
13	Kota Bandar Lampung	27	59.3	48.1	7.4	70.4	51.9	7.4
14	Kota Metro	11	27.3	9.1	0	90.9	18.2	0
LAMPUNG		265	50.9	20.8	4.2	33.6	40.4	1.1

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Kelas Ibu Balita adalah sebesar 20,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan Kelas Ibu Balita terdapat di Kabupaten Lampung Timur (45,2%). Terdapat 3 Kabupaten/Kota dari 15 Kabupaten/Kota yang seluruh petugas Puskesmasnya tidak menerima pelatihan Kelas Ibu Balita (0,0%) yaitu Kabupaten Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan KTA dalam lingkup provinsi adalah sebesar 4,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan KTA terdapat di Kabupaten Pringsewu (20%). Terdapat 7 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang seluruh petugas Puskesmasnya tidak mengikuti pelatihan KTA (0,0%) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan, Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang barat dan Kota Metro.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) adalah sebesar 33,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) terdapat di Kota Metro (90,9%) dan persentase Puskesmas

terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) terdapat di Kabupaten Lampung Timur (3,2%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan manajemen Asfiksia dalam lingkup provinsi adalah sebesar 50,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan PKPR terdapat di Kabupaten Tulang Barang Barat (100%) dan persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan PKPR terdapat di Kabupaten Kota Metro (27,3%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 40,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan MTBS terdapat di Kabupaten Lampung Utara (64,3%) dan persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan MTBS terdapat di Kabupaten Tulang Bawang barat (11,1%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keseluruhan jenis pelatihan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada lingkup provinsi adalah sebesar 1,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di Kota Bandar Lampung (7,4%). Terdapat 12 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang seluruh petugas Puskesmasnya tidak menerima pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap (0,0%), yaitu di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Kota Metro.

4.8.4.3. Pedoman Program Kesehatan Bayi dan Anak

Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Buku Pedoman yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi, Pedoman Manajemen Asfiksia, Buku KIA, Pedoman SDIDTK, Pedoman Kelas Ibu Balita, Modul BBLR, Modul MTBS, Pedoman pelayanan KTA, dan Pedoman PKPR. Di Provinsi Lampung, Pedoman upaya Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Buku KIA (83,4%) kemudian Modul MTBS (80,8%), Pedoman Manajemen Asfiksia (64,9,4%), Modul BBLR (60%), Pedoman Kelas Ibu Balita (55,1%), Pedoman SDIDTK (52,8%), Pedoman PKPR (28,7%), dan Pedoman Pelayanan KTA (24,2%). Persentase Puskesmas yang memiliki seluruh Pedoman seperti yang disebutkan di atas dalam lingkup provinsi adalah sebesar 17,4 persen. (Tabel 4.8.4.3.1.a dan 4.8.4.3.1.b.).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia dalam lingkup provinsi adalah sebesar 64,9 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia terdapat di Kabupaten Mesuji (100%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (33,3%).

Persentase Puskesmas memiliki Buku KIA dalam lingkup provinsi adalah sebesar 83,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku KIA terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran (100%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku KIA terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (22,2%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK dalam lingkup provinsi adalah sebesar 52,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK terdapat di Kota Bandar Lampung (81,5%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (22,2%) dan terdapat satu kabupaten yang puskesmasnya tidak memiliki pedoman SDIDTK yaitu Kabupaten Mesuji (0%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita dalam lingkup provinsi adalah sebesar 55,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita terdapat di Kabupaten Way Kanan (83,3%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita terdapat di Kabupaten Pesawaran dan Tulang Bawang Barat (masing-masing 33,3%)

Persentase Puskesmas memiliki Modul BBLR dalam lingkup provinsi adalah sebesar 60 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Modul BBLR terdapat di Kota Bandar Lampung (81,5%) dan Persentase terendah Puskesmas memiliki Modul BBLR terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (22,2%).

Persentase Puskesmas memiliki Modul MTBS dalam lingkup provinsi adalah sebesar 80,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Modul MTBS terdapat di Kabupaten Lampung Selatan (100%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Modul MTBS terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (44,4%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman KTA dalam lingkup provinsi adalah sebesar 24,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman KTA terdapat di Kota Bandar Lampung (40,7%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman KTA terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (8,3%) serta terdapat satu kabupaten yang puskesmasnya tidak memiliki Pedoman KTA yaitu Kabupaten Mesuji (0%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman PKPR dalam lingkup provinsi adalah sebesar 28,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman PKPR terdapat di Kabupaten Way Kanan (44,4%) dan persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman PKPR terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%) serta terdapat satu Kabupaten yang puskesmasnya tidak memiliki Pedoman PKPR yaitu Kabupaten Mesuji (0%).

Tabel 4.8.4.3.1.a.

Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Bayi dan Anak di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman Manajemen Asfiksia	Pedoman Buku KIA	Pedoman SDIDTK	Pedoman Kelas Ibu Balita	Modul BBLR
1	Lampung Barat	18	61.1	77.8	55.6	50.0	61.1
2	Tanggamus	22	77.3	86.4	45.5	50.0	50.0
3	Lampung Selatan	24	66.7	100	70.8	79.2	75.0
4	Lampung Timur	31	64.5	87.1	54.8	71.0	58.1
5	Lampung Tengah	36	41.7	75.0	36.1	25.0	52.8
6	Lampung Utara	25	60.0	80.0	28.0	52.0	68.0
7	Way Kanan	18	72.2	88.9	72.2	83.3	50.0
8	Tulang Bawang	14	78.6	85.7	35.7	42.9	57.1
9	Pesawaran	12	75.0	100	66.7	33.3	50.0
10	Pringsewu	10	70.0	70.0	80.0	60.0	80.0
11	Mesuji	8	100	87.5	0	37.5	50.0
12	Tulangbawang Barat	9	33.3	22.2	22.2	33.3	22.2
13	Kota Bandar Lampung	27	74.1	88.9	81.5	74.1	81.5
14	Kota Metro	11	63.6	90.9	72.7	54.5	54.5
LAMPUNG		265	64.9	83.4	52.8	55.1	60.0

Tabel 4.8.4.3.1.b.

Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Bayi dan Anak di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Modul MTBS	Pedoman KTA	Pedoman PKPR	Pedoman Lengkap Kesehatan Ibu Balita
1	Lampung Barat	18	83.3	22.2	38.9	22.2
2	Tanggamus	22	77.3	27.3	31.8	27.3
3	Lampung Selatan	24	100	37.5	58.3	20.8
4	Lampung Timur	31	83.9	29.0	22.6	9.7
5	Lampung Tengah	36	77.8	8.3	19.4	8.3
6	Lampung Utara	25	88.0	20.0	20.0	16.0
7	Way Kanan	18	83.3	22.2	44.4	22.2
8	Tulang Bawang	14	78.6	7.1	7.1	7.1
9	Pesawaran	12	66.7	33.3	33.3	33.3
10	Pringsewu	10	70.0	30.0	10.0	10.0
11	Mesuji	8	75.0	0	0	0
12	Tulangbawang Barat	9	44.4	22.2	11.1	0
13	Kota Bandar Lampung	27	85.2	40.7	37.0	33.3
14	Kota Metro	11	72.7	27.3	36.4	18.2
LAMPUNG		265	80.8	24.2	28.7	17.4

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 17,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas tersedia Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap terdapat di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pesawarn dan Kota Bandar Lampung (masing-masing 33,3%). Persentase terendah Puskesmas tersedia Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (8,3%) serta terdapat 2 Kabupaten yang puskesmasnya tidak tersedia Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap yaitu Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat (0%).

4.8.4.4 Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Persentase Puskesmas untuk bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (82,6%) dan diikuti oleh supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas (80,8%) kemudian umpan balik (69,4%). Di Provinsi Lampung persentase Puskesmas lengkap menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebesar 58,9 persen. (Tabel 4.8.4.4.1).

Persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas untuk Pelayanan kesehatan bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 80,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di 3 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang barat dan Kota Metro (100%). Persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di Kabupaten Pesawaran (33,3%).

Persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 69,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pringsewu dan Tulang Bawang barat (100%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di Kabupaten Pesawaran (25%).

Tabel 4.8.4.4.1.

Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Bayi dan Anak di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Bayi dan Anak			
			Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap
1	Lampung Barat	18	83.3	61.1	83.3	55.6
2	Tanggamus	22	68.2	40.9	77.3	22.7
3	Lampung Selatan	24	83.3	79.2	87.5	75.0
4	Lampung Timur	31	61.3	83.9	67.7	41.9
5	Lampung Tengah	36	83.3	61.1	83.3	55.6
6	Lampung Utara	25	80.0	72.0	84.0	64.0
7	Way Kanan	18	94.4	72.2	94.4	66.7
8	Tulang Bawang	14	85.7	50.0	92.9	50.0
9	Pesawaran	12	33.3	25.0	25.0	16.7
10	Pringsewu	10	100	100	100	100
11	Mesuji	8	75.0	75.0	87.5	50.0
12	Tulangbawang Barat	9	100	100	100	100
13	Kota Bandar Lampung	27	96.3	77.8	88.9	74.1
14	Kota Metro	11	100	90.9	100	90.9
LAMPUNG		265	80.8	69.4	82.6	58.9

Persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 82,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Bayi dan Anak di Dinas Kesehatan terdapat di 3 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang Barat dan Kota Metro (100%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan bayi dan Anak di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Pesawaran (25%).

Persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 58,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Pringsewu dan Tulang Bawang barat (100%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap terdapat di Kabupaten Pesawaran (16,7%).

4.8.5. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

4.8.5.1 Kegiatan Program Keluarga Berencana

Kegiatan dalam Pelayanan Keluarga Berencana yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi), Penanganan Komplikasi Kontrasepsi, dan Konsultasi KB (Keluarga Berencana). Angka provinsi untuk kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Lampung adalah 96,6 persen Konsultasi KB, Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) 85,7persen, dan 59,6 persen Penanganan Komplikasi Kontrasepsi. Angka provinsi untuk Puskesmas yang melaksanakan ketiga kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 54,7 persen (Tabel 4.8.5.1.1).

Angka provinsi untuk kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) adalah sebesar 85,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) terdapat di 2 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro (100%).sedangkan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Pringsewu (60%).

Angka provinsi untuk kegiatan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi adalah sebesar 59,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi terdapat di Kabupaten lampung Timur (87,1%) sedangkan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%).

Angka provinsi untuk kegiatan Pelayanan Konsultasi KB adalah sebesar 96,6%. Terdapat 8 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang seluruh Puskesmasnya melakukan kegiatan Pelayanan Konsultasi KB yaitu Kabupaten lampung timur, lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Kota Bandar lampung dan Kota Metro (100%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pelayanan Konsultasi KB terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (88,9%).

Angka provinsi untuk kegiatan lengkap Pelayanan Keluarga Berencana sebesar 54,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan ketiga kegiatan di atas adalah Kabupaten

Lampung Timur (87,1%) dan persentase Puskesmas terendah melakukan ketiga kegiatan di atas terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%).

Tabel 4.8.5.1.1.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan KB di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Pelayanan KB			
			Pemasangan Alat Kontrasepsi	Penanganan Komplikasi	Konsultasi KB	Kegiatan Lengkap
1	Lampung Barat	18	94.4	72.2	94.4	72.2
2	Tanggamus	22	90.9	54.5	95.5	54.5
3	Lampung Selatan	24	87.5	58.3	95.8	54.2
4	Lampung Timur	31	93.5	87.1	100	87.1
5	Lampung Tengah	36	86.1	50.0	88.9	44.4
6	Lampung Utara	25	64.0	60.0	100	40.0
7	Way Kanan	18	83.3	55.6	94.4	50.0
8	Tulang Bawang	14	85.7	50.0	92.9	42.9
9	Pesawaran	12	100	58.3	100	58.3
10	Pringsewu	10	60.0	50.0	100	40.0
11	Mesuji	8	87.5	50.0	100	50.0
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	11.1	100	11.1
13	Kota Bandar Lampung	27	81.5	74.1	100	66.7
14	Kota Metro	11	100	45.5	100	45.5
LAMPUNG		265	85.7	59.6	96.6	54.7

4.8.5.2 Pelatihan Program Keluarga Berencana

Pelatihan dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana yang dikumpulkan Rifaskes 2011 meliputi Pelatihan Program KB, Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi, dan Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi yang diikuti tenaga puskesmas pada tahun 2009 dan tahun 2010. Angka provinsi Pelatihan Program KB sebesar 27,2 persen, kemudian diikuti oleh Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi (29,1%) merupakan persentase tertinggi, dan Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi (14,7%). Angka provinsi untuk ketiga pelatihan di atas sebesar 12,8 persen (Tabel 4.8.5.2.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Program KB sebesar 27,2 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Program KB terdapat di Kabupaten Kota Bandar Lampung (59,3%), kemudian Kota Metro (45,5%), dan Kabupaten Lampung Selatan, Mesuji (37,5%). Persentase terendah Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Program KB terdapat di Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat (masing-masing 11,1%) kemudian Kabupaten Lampung Barat, Way kanan (masing-masing 16,7%) dan Kabupaten Tanggamus (18,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi sebesar 29,1 persen. Persentase puskesmas tertinggi terdapat di Kota Metro (72,7%), kemudian Kabupaten Mesuji (50,0%), dan Kota Bandar Lampung (48,1%). Persentase terendah Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi terdapat di Kabupaten Lampung Timur (3,2%) kemudian Kabupaten Pringsewu (10,0%) dan Kabupaten Tanggamus (13,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi sebesar 14,7 persen. Persentase puskesmas tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung (44,4%), kemudian Kota Metro (36,4%) dan Kabupaten Lampung Utara (36,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur,

Pringsewu dan Tulang Bawang Barat (masing-masing 0%), kemudian Kabupaten Lampung Tengah (5,6%) dan Kabupaten Pesawaran (8,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti ketiga pelatihan dalam Program Pelayanan KB sebesar 12,8 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti ketiga pelatihan dalam Program KB terdapat di Kota Bandar Lampung (40,7%), kemudian Kota Metro (36,4%) dan Kabupaten Lampung Utara (28,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti secara lengkap ketiga pelatihan di atas adalah Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, Pringsewu dan Tulangbawang Barat (masing-masing 0,0%), kemudian Kabupaten Lampung Tengah, Mesuji (masing-masing 5,6%) dan Kabupaten Pesawaran (8,3%).

Tabel 4.8.5.2.1.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Pelayanan KB Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Program KB	Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi	Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi	Pelatihan Lengkap
1	Lampung Barat	18	16.7	16.7	0	0
2	Tanggamus	22	18.2	13.6	0	0
3	Lampung Selatan	24	37.5	29.2	16.7	12.5
4	Lampung Timur	31	25.8	3.2	0	0
5	Lampung Tengah	36	11.1	16.7	5.6	5.6
6	Lampung Utara	25	36.0	40.0	36.0	28.0
7	Way Kanan	18	16.7	44.4	22.2	16.7
8	Tulang Bawang	14	21.4	35.7	14.3	14.3
9	Pesawaran	12	16.7	33.3	8.3	8.3
10	Pringsewu	10	20.0	10.0	0	0
11	Mesuji	8	37.5	50.0	12.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	11.1	44.4	0	0
13	Kota Bandar Lampung	27	59.3	48.1	44.4	40.7
14	Kota Metro	11	45.5	72.7	36.4	36.4
LAMPUNG		265	27.2	29.1	14.7	12.8

4.8.5.3. Pedoman Program Keluarga Berencana

Pedoman dalam Pelayanan Keluarga Berencana diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Pelayanan Keluarga Berencana, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, Panduan Audit Medik Pelayanan KB, Panduan Baku Klinis KB, Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Yankespro) Terpadu, Panduan Kontrasepsi Darurat, dan Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi. Angka provinsi untuk ketersediaan buku pedoman Pelayanan KB di Provinsi Lampung tertinggi adalah ketersediaan Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (48,3 %), kemudian Panduan Baku Klinis KB (31,7%), Pedoman Yankespro Terpadu (29,4%), Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi (29,1%), Panduan Kontrasepsi Darurat (28,3%), dan Panduan Audit Medik Pelayanan KB (32,1%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 17,4 persen (Tabel 4.8.5.3.1.a-b).

Tabel 4.8.5.3.1.a.
 Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di
 Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program KB			
			Panduan Pelayanan Kontrasepsi	Panduan Audit Medik Pelayanan KB	Panduan Klinis KB	Pedoman Yankespro Terpadu
1	Lampung Barat	18	44.4	22.2	27.8	22.2
2	Tanggamus	22	27.3	36.4	18.2	18.2
3	Lampung Selatan	24	66.7	25.0	29.2	33.3
4	Lampung Timur	31	35.5	32.3	25.8	29.0
5	Lampung Tengah	36	38.9	27.8	27.8	19.4
6	Lampung Utara	25	72.0	44.0	48.0	48.0
7	Way Kanan	18	61.1	33.3	38.9	27.8
8	Tulang Bawang	14	28.6	21.4	7.1	7.1
9	Pesawaran	12	33.3	33.3	25.0	33.3
10	Pringsewu	10	60.0	50.0	50.0	40.0
11	Mesuji	8	37.5	12.5	25.0	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	33.3	11.1	11.1	33.3
13	Kota Bandar Lampung	27	66.7	51.9	70.4	59.3
14	Kota Metro	11	54.5	18.2	0	0
LAMPUNG		265	48.3	32.1	31.7	29.4

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Panduan Pelayanan Kontrasepsi sebesar 48,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Utara (72,0%), kemudian Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu (masing-masing 66,7%), dan Kabupaten Way Kanan (61,1%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Pelayanan Kontrasepsi terdapat di Kabupaten Tanggamus (27,3%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang (28,6%), dan Kabupaten Pesawaran, Tulang Bawang Barat (masing-masing 33,3%).

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Panduan Audit Medik Pelayanan KB sebesar 32,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung (51,9%), kemudian Kabupaten Pringsewu (50,0%), dan Kabupaten Lampung Utara (44,0%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Audit Medik Pelayanan KB terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%), kemudian Kabupaten Mesuji (12,5%) dan Kota Metro (18,2%).

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Panduan Baku Klinis KB sebesar 31,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung (70,4%), kemudian Kabupaten Pringsewu (50,0%) dan Kabupaten Lampung Utara (48,0%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Baku Klinis KB terdapat di Kota Metro (0,0%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang (7,1%) dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%).

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Pedoman Yankespro Terpadu sebesar 29,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung (59,3%), kemudian Kabupaten Lampung Utara (48,0%) dan Kabupaten Pringsewu (40,0%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Pedoman Yankespro Terpadu terdapat di Kota Metro (0,0%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang (7,1%) dan Kabupaten Mesuji (12,5%).

Tabel 4.8.5.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan
KB di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program KB		
			Panduan Kontrasepsi Darurat	Panduan Penanggulangan Efek Samping Kontrasepsi	Pedoman Lengkap
1	Lampung Barat	18	22.2	33.3	16.7
2	Tanggamus	22	13.6	13.6	13.6
3	Lampung Selatan	24	25.0	45.8	4.2
4	Lampung Timur	31	22.6	22.6	12.9
5	Lampung Tengah	36	22.2	22.2	11.1
6	Lampung Utara	25	44.0	44.0	28.0
7	Way Kanan	18	27.8	22.2	22.2
8	Tulang Bawang	14	7.1	7.1	7.1
9	Pesawaran	12	16.7	16.7	16.7
10	Pringsewu	10	60.0	40.0	40.0
11	Mesuji	8	12.5	12.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	22.2	11.1	11.1
13	Kota Bandar Lampung	27	66.7	63.0	40.7
14	Kota Metro	11	9.1	9.1	0
LAMPUNG		265	28.3	29.1	17.4

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Panduan Kontrasepsi Darurat sebesar 28,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung (66,7%) kemudian Kabupaten Pringsewu (60,0%) dan Kabupaten Lampung Utara (44,0%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Kontrasepsi Darurat terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (7,1%), kemudian Kota Metro (9,1%) dan Kabupaten Tanggamus (13,6%).

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi sebesar 29,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung (63,0%), kemudian Kabupaten Lampung Selatan (45,8%), dan Kabupaten Lampung Utara (40,0%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (7,1%, kemudian Kota Metro (9,1%) dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki lengkap keenam buku pedoman/ panduan seperti tersebut di atas sebesar 17,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki buku pedoman/ panduan lengkap terdapat di Kota Bandar Lampung (40,7%) kemudian Kabupaten Pringsewu (40,0%) dan Kabupaten Lampung Utara (28,0%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki lengkap keenam buku pedoman/ panduan terdapat di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Metro (0,0%), kemudian Kabupaten Lampung Selatan (4,2%) dan Kabupaten Tulang Bawang (7,1%).

4.8.5.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Keluarga Berencana

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Keluarga Berencana untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Angka provinsi

untuk bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas di Provinsi Lampung dalam Pelayanan Keluarga Berencana adalah dalam bentuk kunjungan supervisi dan monitoring oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (53,2%) kemudian pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (52,1%) dan umpan balik (50,6%). Angka provinsi untuk persentase Puskesmas yang lengkap menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebesar 34,3 persen (Tabel 4.8.5.4.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 53,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Keluarga Berencana terdapat di Tulang Bawang Barat (100%) kemudian Kota Bandar Lampung (92,6%) dan Pringsewu (80,0%). Persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Keluarga Berencana terdapat di Tulang Bawang (14,3%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (22,2%) dan Kabupaten Lampung Timur (32,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 50,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Keluarga Berencana terdapat di Pringsewu dan Tulang Bawang Barat (masing-masing 100%), kemudian Kota Bandar Lampung (96,3%) dan Mesuji (75%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Pelayanan Keluarga Berencana terdapat di Kabupaten Pesawaran (8,3%) kemudian Kabupaten Tanggamus (13,6%) dan Kota Tulang Bawang (14,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 52,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Pelayanan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%) kemudian Kabupaten Pringsewu (90%) kemudian Kota Bandar Lampung (77,8%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Pelayanan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Pesawaran (8,3%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (16,7%) dan Kabupaten Tulang Bawang (28,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima ketiga jenis Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Keluarga Berencana sebesar 34,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Keluarga Berencana dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%) kemudian Kabupaten Pringsewu (80%) dan Kota Bandar Lampung (77,8%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap terdapat di Kabupaten Pesawaran (0%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang (7,1%) dan Kabupaten Lampung Barat (11,1%).

Tabel 4.8.5.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan KB			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Lampung Barat	18	22.2	22.2	16.7	11.1
2	Tanggamus	22	36.4	13.6	36.4	13.6
3	Lampung Selatan	24	58.3	41.7	45.8	29.2
4	Lampung Timur	31	32.3	48.4	48.4	16.1
5	Lampung Tengah	36	50.0	44.4	55.6	25.0
6	Lampung Utara	25	56.0	72.0	48.0	36.0
7	Way Kanan	18	77.8	50.0	66.7	38.9
8	Tulang Bawang	14	14.3	14.3	28.6	7.1
9	Pesawaran	12	33.3	8.3	8.3	0
10	Pringsewu	10	80.0	100	90.0	80.0
11	Mesuji	8	62.5	75.0	75.0	62.5
12	Tulangbawang Barat	9	100	100	100	100
13	Kota Bandar Lampung	27	92.6	96.3	77.8	77.8
14	Kota Metro	11	54.5	45.5	63.6	45.5
LAMPUNG		265	53.2	50.6	52.1	34.3

4.8.6. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

4.8.6.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif, Pemberian MP-ASI Anak Umur 6-24 bulan, Pemberian Kapsul Vit-A pada Balita, Pemberian Tablet Besi (90 tablet) pada Ibu Hamil, Pemberian PMT Pemulihan Balita pada Gakin dan Penimbangan Balita. Angka provinsi untuk keseluruhan jenis kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung, persentase tertinggi adalah kegiatan penimbangan balita (99,2%) kemudian pemberian kapsul vitamin A pada Balita (98,9%), dan pemberian tablet besi pada ibu hamil (97,4%), peningkatan pemberian ASI eksklusif (81,5%), pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan (71,7%) dan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin (61,1%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang melaksanakan keenam kegiatan program perbaikan gizi masyarakat seperti tersebut di atas secara lengkap adalah sebesar 46,4 persen (Tabel 4.8.6.1.1.a-b).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif adalah sebesar 81,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Pesawaran dan Mesuji (masing-masing 100%) kemudian Kabupaten Tanggamus dan Kota Metro (masing-masing 90,9%) serta Kabupaten tulang Bawang Barat (88,9%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif terdapat di Kabupaten Lubuk Linggau (64,3%) kemudian Kabupaten Way Kanan (66,7%) dan Kabupaten Lampung Utara (72%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan adalah sebesar 71,1 persen. Terdapat 5 kabupaten/kota dari 14 Kabupaten/Kota yang Puskesmasnya sudah 100,0 persen melakukan kegiatan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang barat (masing-

masing 100%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (19,4%) kemudian Kota Metro (45,5%) dan Kabupaten Lampung Timur (54,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pemberian kapsul Vit-A pada balita adalah sebesar 98,9 persen. Terdapat 10 Kabupaten/Kota yang Puskesmasnya sudah 100,0 persen melakukan pemberian kapsul vitamin A pada balita. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian kapsul Vit-A pada balita terdapat di Kabupaten Tanggamus (95,5%) dan Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung (masing-masing 96,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pemberian tablet besi (90 tablet) pada ibu hamil adalah sebesar 97,4 persen. Terdapat 8 kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota yang Puskesmasnya sudah 100,0 persen melakukan pemberian tablet besi pada ibu hamil. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian tablet besi (90 tablet) pada ibu hamil terdapat di Kota Metro (90,9%) dan Kabupaten Lampung Tengah dan Way Kanan (masing-masing 94,4%) serta Kabupaten Lampung Selatan (95,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin adalah sebesar 61,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin terdapat di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu (masing-masing 100%), kemudian Kabupaten Lampung Barat (88,9%) dan Kabupaten Mesuji (87,5,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (27,8%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (33,3%) dan Tulang Bawang (35,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan penimbangan bayi adalah sebesar 99,2 persen. Terdapat 12 kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota yang Puskesmasnya sudah 100,0 persen melakukan penimbangan bayi, sedangkan 2 kabupaten/kota yang belum 100,0 persen adalah Kota Bandar Lampung (96,3%), Kabupaten Tulang Bawang (92,9%).

Tabel 4.8.6.1.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
			Pemberian ASI Eksklusif	Pemberian MP-ASI Anak Umur 6-24 Bulan	Pemberian Kapsul Vitamin A	Pemberian Tablet Besi
1	Lampung Barat	18	100	100	100	100
2	Tanggamus	22	90.9	100	95.5	100
3	Lampung Selatan	24	79.2	66.7	100	95.8
4	Lampung Timur	31	80.6	54.8	100	96.8
5	Lampung Tengah	36	75.0	19.4	97.2	94.4
6	Lampung Utara	25	72.0	84.0	100	100
7	Way Kanan	18	66.7	61.1	100	94.4
8	Tulang Bawang	14	64.3	64.3	100	100
9	Pesawaran	12	100	100	100	100
10	Pringsewu	10	80.0	90.0	100	100
11	Mesuji	8	100	100	100	100
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	100	100	100
13	Kota Bandar Lampung	27	81.5	96.3	96.3	96.3
14	Kota Metro	11	90.9	45.5	100	90.9
LAMPUNG		265	81.5	71.7	98.9	97.4

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan keenam kegiatan program perbaikan gizi masyarakat secara lengkap adalah sebesar 46,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kabupaten Pesawaran (100%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (88,9%) dan Kabupaten Mesuji (87,5%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (13,9%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang (21,4%) dan Kabupaten Mesuji (22,2%).

Tabel 4.8.6.1.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk Pada Gakin	Penimbangan Balita	Kegiatan Lengkap
1	Lampung Barat	18	88.9	100	88.9
2	Tanggamus	22	68.2	100	63.6
3	Lampung Selatan	24	50.0	100	37.5
4	Lampung Timur	31	54.8	100	32.3
5	Lampung Tengah	36	27.8	100	13.9
6	Lampung Utara	25	52.0	100	32.0
7	Way Kanan	18	66.7	100	38.9
8	Tulang Bawang	14	35.7	92.9	21.4
9	Pesawaran	12	100	100	100
10	Pringsewu	10	100	100	70.0
11	Mesuji	8	87.5	100	87.5
12	Tulangbawang Barat	9	33.3	100	22.2
13	Kota Bandar Lampung	27	85.2	96.3	70.4
14	Kota Metro	11	63.6	100	36.4
LAMPUNG		265	61.1	99.2	46.4

4.8.6.2. Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang telah dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Pelatihan Konseling ASI, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Konseling MP-ASI, dan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk yang diikuti oleh tenaga Puskesmas tahun 2009 dan 2010. Angka provinsi dari keseluruhan pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat tersebut di Provinsi Lampung tertinggi adalah Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan (34,3%), diikuti Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk (23,4%) dan oleh Pelatihan Konseling ASI (17,7%), kemudian Pelatihan Konseling MP-ASI (17,4%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan secara lengkap keempat kegiatan program Perbaikan Gizi Masyarakat sebesar 7,2 persen (Tabel 4.8.6.2.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling ASI adalah sebesar 17,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling ASI terdapat di Kota Metro (45,5%) kemudian Kota Bandar Lampung (37,0%) dan Kabupaten Mesuji (25,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling ASI terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (0%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang (7,1%) dan Kabupaten Tanggamus (9,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan pemantauan pertumbuhan adalah sebesar 34,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan pemantauan pertumbuhan terdapat di Kota Metro (63,3%) kemudian Kota Bandar Lampung (59,3%) dan Kabupaten Lampung Barat (44,4%). Persentase

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan pemantauan pertumbuhan terdapat di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat (masing-masing 0%), belum ada petugasnya yang mengikuti pelatihan pemantauan pertumbuhan kemudian Kabupaten Pesawaran (8,3%) dan Kabupaten Tanggamus (27,3%).

Tabel 4.8.6.2.1.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Konseling ASI	Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan	Pelatihan Konseling MP-ASI	Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk	Pelatihan Lengkap
1	Lampung Barat	18	27.8	44.4	38.9	38.9	22.2
2	Tanggamus	22	9.1	27.3	18.2	18.2	9.1
3	Lampung Selatan	24	16.7	37.5	20.8	25.0	8.3
4	Lampung Timur	31	12.9	35.5	16.1	16.1	3.2
5	Lampung Tengah	36	11.1	30.6	16.7	25.0	5.6
6	Lampung Utara	25	16.0	40.0	12.0	24.0	4.0
7	Way Kanan	18	22.2	33.3	11.1	33.3	11.1
8	Tulang Bawang	14	7.1	0	0	0	0
9	Pesawaran	12	16.7	8.3	8.3	8.3	0
10	Pringsewu	10	10.0	30	0	20	0
11	Mesuji	8	25.0	37.5	25.0	12.5	0
12	Tulangbawang Barat	9	0	0	0	0	0
13	Kota Bandar Lampung	27	33.3	59.3	37.0	48.1	14.8
14	Kota Metro	11	45.5	63.6	9.1	18.2	9.1
LAMPUNG		265	17.7	34.3	17.4	23.4	7.2

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling MP-ASI adalah sebesar 17,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling MP-ASI terdapat di Kabupaten Lampung Barat (38,90%) kemudian Kota Bandar Lampung (37%) dan Kabupaten Mesuji (25,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling MP-ASI terdapat di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji (0%) kemudian Kota Metro (9,1%) dan Kabupaten Way Kanan (11,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan tata laksana gizi buruk adalah sebesar 23,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan tata laksana gizi buruk terdapat di Kota Bandar Lampung (48,1%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (38,9%) dan Kabupaten Way Kanan (33,3%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan tata laksana gizi buruk terdapat di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (masing-masing 0%) kemudian Kabupaten Pesawaran (8,3%) dan Kabupaten Tanggamus (27,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti kelima pelatihan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap adalah sebesar 7,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan secara lengkap terdapat di Kabupaten Lampung Barat (22,2%) kemudian Kota Bandar Lampung (14,8%) dan Kabupaten Way Kanan (11,1%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu (masing-masing 0%) kemudian Kabupaten Lampung Timur (3,2%) dan Kabupaten Lampung Utara (4,0%).

4.8.6.3. Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat, buku Pedoman yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi, Buku Pedoman Gizi, Buku Pegangan Kader, Buku Manajemen Pemberian Vitamin A, Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe, Buku Pedoman ASI, Buku Pedoman Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium, Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan, dan Buku Pengelolaan MP-ASI untuk anak usia 6-24 bulan. Angka provinsi untuk ketersediaan buku pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung, tertinggi adalah ketersediaan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan (69,4%) diikuti oleh ketersediaan buku Pegangan Kader (66,4%), Buku Pedoman Gizi (62,3%), Buku Pedoman MP-ASI (57,4%), Buku Pedoman Pengelolaan MP-ASI untuk Anak Usia 6-24 Bulan (54,7%), Buku Manajemen Pemberian Vitamin A (49,4%), Buku Pedoman ASI (47,9%), Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium (41,5%), dan Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe (35,5%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis Pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 17,7 persen (Tabel 4.8.6.3.1.).

Tabel 4.8.6.3.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
			Pedoman Gizi	Buku Pegangan Kader	Buku Manajemen Pemberian Vitamin A	Panduan Pemberian Tablet Fe
1	Lampung Barat	18	61.1	83.3	61.1	38.9
2	Tanggamus	22	31.8	40.9	45.5	36.4
3	Lampung Selatan	24	87.5	66.7	54.2	41.7
4	Lampung Timur	31	90.3	64.5	48.4	29.0
5	Lampung Tengah	36	61.1	69.4	58.3	27.8
6	Lampung Utara	25	60.0	48.0	44.0	44.0
7	Way Kanan	18	50.0	94.4	50.0	33.3
8	Tulang Bawang	14	42.9	50.0	28.6	35.7
9	Pesawaran	12	50.0	58.3	33.3	25.0
10	Pringsewu	10	50.0	80.0	40.0	30.0
11	Mesuji	8	62.5	37.5	25.0	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	100	44.4	11.1	11.1
13	Kota Bandar Lampung	27	63.0	92.6	77.8	59.3
14	Kota Metro	11	36.4	72.7	45.5	36.4
LAMPUNG		265	62.3	66.4	49.4	35.5

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Gizi adalah sebesar 62,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Surveilans Gizi terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%) kemudian Kabupaten Lampung timur (90,3%) dan Kabupaten Lampung Selatan (87,5%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Surveilans Gizi terdapat di Kabupaten Tanggamus (31,8%) kemudian Kota Metro (36,4%) dan Tulang Bawang (42,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pegangan Kader adalah sebesar 66,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pegangan Kader terdapat di Kabupaten Way Kanan (94,4%) kemudian Kota Bandar Lampung (92,6%) dan Kabupaten Lampung Barat (83,3%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pegangan Kader terdapat di Kabupaten Tanggamus (31,8%) kemudian Kabupaten Metro (36,4%) dan Kabupaten Tulang Bawang (42,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A adalah sebesar 49,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A terdapat di Kota Bandar Lampung (77,8%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (61,1%) dan Kabupaten Lampung Tengah (58,3%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%) kemudian Kabupaten Mesuji (25,0%) dan Kabupaten Tulang Bawang (28,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe adalah sebesar 35,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe terdapat di Kota Bandar Lampung (59,3%) kemudian Kabupaten Lampung Utara (44,0%) dan Kabupaten Lampung Selatan (41,7%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,0%) kemudian Kabupaten Mesuji (12,5%) dan Kabupaten Pesawaran (25,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman ASI adalah sebesar 47,9 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman ASI terdapat di Kota Bandar Lampung (70,4%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (58,3%) dan Kota Metro (54,5%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pedoman ASI terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (33,3%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang (35,7%) dan Kabupaten Mesuji (37,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman MP-ASI adalah sebesar 57,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman MP-ASI terdapat di Kota Bandar Lampung (85,2%) kemudian Kabupaten Pesawaran (83,3%) dan Lampung Utara (68,0%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pedoman MP-ASI terdapat di Kabupaten Lampung Timur (35,5%) kemudian Kota Metro (36,4%) dan Kabupaten Way Kanan (38,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium adalah sebesar 41,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium terdapat di Kota Bandar Lampung (63%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (62,5%) dan Kabupaten Lampung Barat (55,6%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium terdapat di Kabupaten Lampung timur (19,4%) kemudian Kabupaten Tanggamus (31,8%) diikuti Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Mesuji (masing-masing 25,0%).

Tabel 4.8.6.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Pedoman ASI	Pedoman MP-ASI	Pedoman Pemberian Garam Beryodium
1	Lampung Barat	18	44.4	66.7	55.6
2	Tanggamus	22	50.0	40.9	31.8
3	Lampung Selatan	24	58.3	66.7	62.5
4	Lampung Timur	31	38.7	35.5	19.4
5	Lampung Tengah	36	47.2	63.9	41.7
6	Lampung Utara	25	48.0	68.0	48.0
7	Way Kanan	18	44.4	38.9	38.9
8	Tulang Bawang	14	35.7	50.0	35.7
9	Pesawaran	12	41.7	83.3	25.0
10	Pringsewu	10	40.0	40.0	40.0
11	Mesuji	8	37.5	50.0	25.0
12	Tulangbawang Barat	9	33.3	55.6	33.3
13	Kota Bandar Lampung	27	70.4	85.2	63.0
14	Kota Metro	11	54.5	36.4	36.4
LAMPUNG		265	47.9	57.4	41.5

Tabel 4.8.6.3.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Buku Pemantauan Pertumbuhan	Buku Pengelolaan MP-ASI	Pedoman Lengkap
1	Lampung Barat	18	83.3	55.6	27.8
2	Tanggamus	22	59.1	54.5	13.6
3	Lampung Selatan	24	75.0	70.8	25.0
4	Lampung Timur	31	61.3	38.7	6.5
5	Lampung Tengah	36	66.7	58.3	16.7
6	Lampung Utara	25	76.0	64.0	32.0
7	Way Kanan	18	77.8	38.9	16.7
8	Tulang Bawang	14	85.7	42.9	7.1
9	Pesawaran	12	50.0	33.3	16.7
10	Pringsewu	10	50.0	30.0	0
11	Mesuji	8	37.5	37.5	0
12	Tulangbawang Barat	9	77.8	66.7	0
13	Kota Bandar Lampung	27	85.2	81.5	29.6
14	Kota Metro	11	54.5	54.5	27.3
LAMPUNG		265	69.4	54.7	17.7

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan adalah sebesar 69,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (85,7%) kemudian Kota Bandar Lampung (85,2%) dan Kabupaten Lampung Barat (83,30%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan terdapat di Kabupaten Mesuji (37,5%) kemudian Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu (masing-masing 50,0%) dan Kota Metro (54,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI adalah sebesar 54,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI terdapat di Kota Bandar Lampung (81,5%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (70,8%)

dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (66,7%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI terdapat di Kabupaten Pringsewu (30,0%) kemudian Kabupaten Pesawaran (33,3%) dan Kabupaten Lampung Timur (38,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki keseluruhan pedoman secara lengkap untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 17,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap terdapat di Kabupaten Lampung Utara (32,0%) kemudian Kota Bandar Lampung (29,6%) dan Kabupaten Lampung Barat (27,8%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap terdapat di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesawaran (masing-masing 0%) kemudian Kabupaten Lampung Timur (6,5%) dan Kabupaten Tulang Bawang (7,1%).

4.8.6.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Angka provinsi untuk bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung tertinggi adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (84,2%), kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (75,8%) diikuti oleh dan umpan balik (61,1%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 49,8 persen (Tabel 4.8.6.4.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 75,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Barat (masing-masing 100%), kemudian Kabupaten Lampung Utara (92%) dan Kabupaten Pringsewu (90%). Persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan terdapat di Kabupaten Lampung Timur (48,4%) kemudian Kabupaten Tanggamus (59,1%) dan Kabupaten Lampung Tengah (61,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 61,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kabupaten Pringsewu (100%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (77,8%) dan Kabupaten Lampung Utara (76%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (42,9%) kemudian Kabupaten Lampung Timur (51,6%) dan Kabupaten Lampung Selatan (54,2%).

Tabel 4.8.6.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Lampung Barat	18	100	55.6	88.9	50.0
2	Tanggamus	22	59.1	59.1	54.5	31.8
3	Lampung Selatan	24	87.5	54.2	83.3	41.7
4	Lampung Timur	31	48.4	51.6	80.6	25.8
5	Lampung Tengah	36	61.1	61.1	88.9	47.2
6	Lampung Utara	25	92.0	76.0	80.0	68.0
7	Way Kanan	18	77.8	55.6	88.9	55.6
8	Tulang Bawang	14	78.6	42.9	92.9	42.9
9	Pesawaran	12	75.0	50.0	66.7	41.7
10	Pringsewu	10	90.0	100	100	90.0
11	Mesuji	8	75.0	75.0	87.5	62.5
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	77.8	100	77.8
13	Kota Bandar Lampung	27	77.8	59.3	88.9	51.9
14	Kota Metro	11	100	72.7	100	72.7
LAMPUNG		265	75.8	61.1	84.2	49.8

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk mengikuti pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 84,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro (masing-masing 100%), diikuti Kabupaten Tulang Bawang (92,9%), kemudian Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan dan Kota Bandar Lampung (masing-masing 88,9%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monev di Dinas Kesehatan terdapat di Kabupaten Tanggamus (54,5%) kemudian Kabupaten Pesawaran (66,7%) dan Kabupaten Lampung Timur (80,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 49,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan secara lengkap untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Pringsewu (90,0%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (77,8%) dan Kota Metro (72,7%). Persentase Puskesmas terendah menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan secara lengkap terdapat di Kabupaten Lampung timur (25,8%) kemudian Kabupaten Tanggamus (31,8%) dan Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran (masing-masing 41,1%).

4.8.7. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

4.8.7.1. Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular

Kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi: Program TB paru, Program ISPA, Program Diare, Program DBD, Program Malaria, Program Kusta, Program Schistosomiasis, Program HIV-AIDS, Program Filariasis, Surveilans Terpadu, dan Program Rabies.

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program TB Paru di Provinsi Lampung adalah sebesar 100 persen. Seluruh Puskesmas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung (100%) melakukan Program TB Paru.

Angka provinsi untuk Puskesmas melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia adalah sebesar 97,7 persen. Terdapat 10 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang semua Puskesmasnya 100,0 persen melakukan Program ISPA/Pneumonia. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia terdapat di Kabupaten Tanggamus (95,5%) kemudian Kabupaten Lampung Tengah dan Way Kanan (masing-masing 94,4%).

Angka provinsi untuk Puskesmas melakukan kegiatan Program Diare adalah sebesar 98,1 persen. Terdapat 12 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang semua Puskesmasnya 100,0 persen melakukan Program Diare. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Diare terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dan Way Kanan (masing-masing 94,4%) kemudian Kabupaten Tanggamus (95,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas melakukan kegiatan Program DBD adalah sebesar 95,1 persen. Terdapat 6 Kabupaten/Kota dari 14 kabupaten kota yang semua Puskesmasnya 100,0 persen melakukan Program DBD, yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten tulang Bawang Barat. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program DBD adalah Kabupaten Lampung Utara (84%), kemudian Kota Metro (90,9%), Kabupaten Tulang Bawang (92,9%), seperti terlihat dalam tabel 4.8.7.1.1.a.

Tabel 4.8.7.1.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Program TB Paru	Program ISPA/Pneumonia	Program Diare	Program DBD
1	Lampung Barat	18	100	100	100	94.4
2	Tanggamus	22	100	95.5	100	100
3	Lampung Selatan	24	100	100	100	100
4	Lampung Timur	31	100	93.5	93.5	96.8
5	Lampung Tengah	36	100	94.4	91.7	91.7
6	Lampung Utara	25	100	100	100	84.0
7	Way Kanan	18	100	94.4	100	94.4
8	Tulang Bawang	14	100	100	100	92.9
9	Pesawaran	12	100	100	100	100
10	Pringsewu	10	100	100	100	100
11	Mesuji	8	100	100	100	100
12	Tulangbawang Barat	9	100	100	100	100
13	Kota Bandar Lampung	27	100	100	100	96.3
14	Kota Metro	11	100	100	100	90.9
LAMPUNG		265	100	97.7	98.1	95.1

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Malaria adalah sebesar 90,6 persen. Terdapat 9 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang keseluruhan Puskesmasnya 100,0 persen melakukan Program Malaria. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Malaria terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (63,9%) kemudian Kota Metro(72,7%) dan Kabupaten Lampung timur (83,9%).

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Kusta adalah sebesar 82,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program Kusta terdapat di Kabupaten Way Kanan dan Tulang Bawang (masing-masing 100%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (95,8%) dan Kabupaten Pesawaran (91,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Kusta terdapat di Kabupaten Pringsewu (50,0%), Kabupaten Lampung Utara (60,0%) dan Kota Metro (72,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Schistosomiasis adalah sebesar 6,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program Schistosomiasis terdapat di Kota Metro (54,5%), kemudian Kabupaten Mesuji (25,0%) dan Kabupaten Lampung Timur (9,7%). Terdapat 5 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan Program Schistosomiasis (0%) yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Bandar Lampung.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program HIV-AIDS adalah sebesar 34,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program HIV-AIDS terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (69,4%) kemudian Kabupaten Mesuji (62,5%) dan Kota Metro (54,5%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program HIV-AIDS terdapat di Kabupaten Pesawaran (8,3%), kemudian Lampung Utara (16,0%) diikuti Kabupaten Lampung Barat dan Way Kanan (masing-masing 16,7%) Tabel 4.8.7.1.1.b.

Tabel 4.8.7.1.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Program Malaria	Program Kusta	Program Schistosomiasis	Program HIV-AIDS
1	Lampung Barat	18	100	83.3	5.6	16.7
2	Tanggamus	22	100	90.9	0	27.3
3	Lampung Selatan	24	100	95.8	8.3	20.8
4	Lampung Timur	31	83.9	87.1	9.7	41.9
5	Lampung Tengah	36	63.9	83.3	2.8	69.4
6	Lampung Utara	25	88.0	60.0	4.0	16.0
7	Way Kanan	18	100	100	5.6	16.7
8	Tulang Bawang	14	100	100	0	21.4
9	Pesawaran	12	100	91.7	8.3	8.3
10	Pringsewu	10	90.0	50.0	0	30.0
11	Mesuji	8	100	87.5	25.0	62.5
12	Tulangbawang Barat	9	100	88.9	0	44.4
13	Kota Bandar Lampung	27	100	63.0	0	37.0
14	Kota Metro	11	72.7	72.7	54.5	54.5
LAMPUNG		265	90.6	82.3	6.8	34.3

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Filariasis adalah sebesar 36,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program Filariasis terdapat di Kabupaten Lampung timur (83,9%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (77,8%) dan Kota Metro (63,6%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Filariasis terdapat di Kabupaten Pesawaran (8,3%) kemudian Kota Bandar Lampung (14,8%) dan Kabupaten Lampung Selatan (20,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu adalah sebesar 90,6 persen. Terdapat 5 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota

yang keseluruhan Puskesmasnya 100 persen melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten terdapat di Kota Pagar Alam Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian Kabupaten Lampung Timur (96,8%) dan Kabupaten Tanggamus (95,5%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu terdapat di Kabupaten Pringsewu (70,0%), Kabupaten Tulang Bawang (71,4%) dan Kota Metro (72,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Rabies adalah sebesar 79,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program Rabies terdapat di Kabupaten Pesawaran (100%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (95,8%) dan Kabupaten Lampung Barat (94,4%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Rabies terdapat di Kabupaten Pringsewu (60,0%) kemudian Kota Bandar Lampung (70,4%) dan Kabupaten Tulang Bawang (71,4%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular secara lengkap adalah sebesar 4,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular secara lengkap terdapat di Kota Metro (45,5%) kemudian Kabupaten Mesuji (12,5%) dan Kabupaten Lampung Timur (9,7%). Terdapat 7 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular secara lengkap (0%), seperti terlihat pada tabel 4.8.7.1.1.c.

Tabel 4.8.7.1.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Program Filariasis	Surveilans Terpadu	Program Rabies	Kegiatan Lengkap
1	Lampung Barat	18	27.8	100	94.4	0
2	Tanggamus	22	22.7	95.5	90.9	0
3	Lampung Selatan	24	20.8	100	95.8	4.2
4	Lampung Timur	31	83.9	96.8	80.6	9.7
5	Lampung Tengah	36	36.1	94.4	77.8	0
6	Lampung Utara	25	28.0	76.0	56.0	4.0
7	Way Kanan	18	22.2	88.9	83.3	5.6
8	Tulang Bawang	14	21.4	71.4	71.4	0
9	Pesawaran	12	8.3	100	100	8.3
10	Pringsewu	10	40.0	70.0	60.0	0
11	Mesuji	8	62.5	100	75.0	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	77.8	100	88.9	0
13	Kota Bandar Lampung	27	14.8	88.9	70.4	0
14	Kota Metro	11	63.6	72.7	72.7	45.5
LAMPUNG		265	36.2	90.6	79.6	4.9

4.8.7.2. Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan TB Paru, ISPA/Pneumonia, Diare, DBD, Malaria, Kusta, Schistosomiasis, Pencegahan HIV-AIDS, Pengenalan HIV-AIDS (konseling dan VCT) di RS dan Puskesmas, Filariasis, Rabies dan Tim Gerak Cepat yang diikuti oleh tenaga puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Angka provinsi untuk keseluruhan pelatihan Upaya Pengendalian Penyakit Menular dengan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas

puskesmas di Provinsi Lampung adalah pelatihan TB Paru (61,9%), kemudian pelatihan Malaria (41,5%) dan ISPA (26,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru adalah sebesar 61,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru terdapat di Kabupaten Pesawaran (100%), kemudian Kabupaten Mesuji (75%) dan Kota Bandar Lampung (74,1%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru terdapat di Kabupaten Pringsewu (30,0%) kemudian Kabupaten Lampung Tengah (50,0%) diikuti Kota Metro dan Kabupaten Tanggamus (masing-masing 54,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia adalah sebesar 26,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia terdapat di Kota Bandar Lampung (63,0%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (41,7%) dan Kabupaten Lampung Utara (36,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia terdapat di Kabupaten Pringsewu (0%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang (7,1%) dan Kabupaten Lampung Timur (9,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare adalah sebesar 20,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare terdapat di Kota Bandar Lampung (44,4%) kemudian Kota Metro (36,4%) dan Kabupaten Lampung selatan (33,3%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare terdapat di Kabupaten Pringsewu (10,0%) kemudian Kabupaten Lampung Timur (9,7%) dan Tulang Bawang (7,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD adalah sebesar 16,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD terdapat di Kota Bandar Lampung (40,7%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (29,2%) dan Kabupaten Lampung Tengah (22,2%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (0%), kemudian Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Way Kanan (masing-masing 5,6%) serta Kabupaten Lampung Timur (6,5%). Tabel 4.8.7.2.1.a.

Tabel 4.8.7.2.1.a.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan TB Paru	Pelatihan ISPA/ Pneumonia	Pelatihan Diare	Pelatihan DBD	Pelatihan Malaria
1	Lampung Barat	18	55.6	33.3	22.2	5.6	77.8
2	Tanggamus	22	54.5	13.6	13.6	9.1	54.5
3	Lampung Selatan	24	70.8	41.7	33.3	29.2	58.3
4	Lampung Timur	31	54.8	9.7	9.7	6.5	6.5
5	Lampung Tengah	36	50.0	30.6	19.4	22.2	11.1
6	Lampung Utara	25	64.0	36.0	20.0	16.0	4.0
7	Way Kanan	18	66.7	11.1	16.7	5.6	61.1
8	Tulang Bawang	14	71.4	7.1	7.1	7.1	64.3
9	Pesawaran	12	100	16.7	16.7	16.7	91.7
10	Pringsewu	10	30.0	0	10.0	10.0	40.0
11	Mesuji	8	75.0	12.5	12.5	12.5	62.5
12	Tulangbawang Barat	9	55.6	11.1	11.1	0	44.4
13	Kota Bandar Lampung	27	74.1	63.0	44.4	40.7	66.7
14	Kota Metro	11	54.5	27.3	36.4	18.2	9.1
LAMPUNG		265	61.9	26.0	20.8	16.2	41.5

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria adalah sebesar 41,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria terdapat di Kabupaten Pesawaran (91,7%), kemudian Kabupaten Lampung Barat (77,8%) dan Kota Bandar Lampung (66,7%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria terdapat di Kabupaten Lampung Utara (4,0%) diikuti Kabupaten Lampung Timur (6,5%) dan Kota Metro (9,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta adalah sebesar 18,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta terdapat di Kabupaten Lampung Selatan (41,7%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang (35,7%) dan Kabupaten Way Kanan (33,3%). Ada 3 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang petugasnya belum pernah mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta yaitu di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro (masing-masing 0,0%). Persentase Puskesmas terenda Kabupaten yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta terdapat di Kabupaten Lampung Timur (6,5%) kemudian di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (masing-masing 11,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Schistosomiasis adalah sebesar 0,4 persen. Hanya satu Kabupaten/Kota petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Schistosomiasis yaitu Kabupaten Mesuji. Terdapat, 13 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang keseluruhannya tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Schistosomiasis (0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS adalah sebesar 4,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (19,4%) kemudian Kota Bandar Lampung (14,8%) dan Kabupaten Lampung Selatan (4,2%). Terdapat 10

Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS (0%). Tabel 4.8.7.2.1.b.

Tabel 4.8.7.2.1.b.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Kusta	Pelatihan Schistosomiasis	Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS	Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS
1	Lampung Barat	18	11.1	0	0	0
2	Tanggamus	22	13.6	0	0	0
3	Lampung Selatan	24	41.7	0	4.2	4.2
4	Lampung Timur	31	6.5	0	0	3.2
5	Lampung Tengah	36	27.8	0	19.4	13.9
6	Lampung Utara	25	0	0	4.0	8.0
7	Way Kanan	18	33.3	0	0	0
8	Tulang Bawang	14	35.7	0	0	7.1
9	Pesawaran	12	16.7	0	0	0
10	Pringsewu	10	0	0	0	0
11	Mesuji	8	12.5	12.5	0	0
12	Tulangbawang Barat	9	11.1	0	0	0
13	Kota Bandar Lampung	27	22.2	0	14.8	22.2
14	Kota Metro	11	0	0	0	9.1
LAMPUNG		265	18.1	0.4	4.9	6.4

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS adalah sebesar 6,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS terdapat di Kota Bandar Lampung (22,2%) kemudian Kabupaten Lampung Tengah (13,9%) dan Kabupaten Tulang Bawang (7,1%). Terdapat 7 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS (0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Filariasis adalah sebesar 3,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti Pelatihan Filariasis terdapat di Kabupaten Mesuji (12,5%) kemudian Kabupaten Pringsewu (10,0%) diikuti Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat (masing-masing 5,6%). Terdapat 6 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Filariasis.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Rabies adalah sebesar 7,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Rabies terdapat di Kabupaten Lampung selatan (33,3%) kemudian Kota Bandar Lampung (14,8%) dan Kabupaten Way Kanan (11,1%). Terdapat 8 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Rabies (0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat adalah sebesar 6,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat terdapat di Kabupaten Way Kanan (27,8%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (20,8%) dan Kota Bandar Lampung (14,8%). Terdapat 8 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat (0%). Dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, tidak ada satupun (0%)

Puskesmas yang petugasnya secara lengkap mengikuti keseluruhan pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular. Tabel 4.8.7.2.1.c.

Tabel 4.8.7.2.1.c.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Filariasis	Pelatihan Rabies	Pelatihan Tim Gerak Cepat	Pelatihan Lengkap
1	Lampung Barat	18	5.6	5.6	5.6	0
2	Tanggamus	22	0	0	0	0
3	Lampung Selatan	24	4.2	33.3	20.8	0
4	Lampung Timur	31	3.2	0	3.2	0
5	Lampung Tengah	36	5.6	8.3	5.6	0
6	Lampung Utara	25	0	0	0	0
7	Way Kanan	18	5.6	11.1	27.8	0
8	Tulang Bawang	14	0	0	0	0
9	Pesawaran	12	0	8.3	0	0
10	Pringsewu	10	10	0	0	0
11	Mesuji	8	12.5	0	0	0
12	Tulangbawang Barat	9	0	0	0	0
13	Kota Bandar Lampung	27	3.7	14.8	14.8	0
14	Kota Metro	11	0	0	0	0
LAMPUNG		265	3.4	7.2	6.8	0

4.8.7.3. Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular

Pedoman pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi: Penanggulangan TB Paru, Penanggulangan ISPA, Penanggulangan Diare, Penanggulangan DBD, Penanggulangan Malaria, Penanggulangan Kusta, Penanggulangan Schistosomiasis, Pencegahan HIV-AIDS, Penanggulangan Filariasis, pedoman KLB dan Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru adalah sebesar 93,6 persen. Terdapat 6 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru tertinggi (100%), diikuti oleh Kabupaten Lampung Tengah (94,4%) dan Tulang Bawang (92,9%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru terdapat di Kabupaten Mesuji (62,5%) kemudian Kabupaten Lampung Barat dan Way Kanan (masing-masing 88,9%) serta Kabupaten Lampung Timur (90,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA adalah sebesar 63,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA terdapat di Kota Metro (81,8%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (77,8%) dan Lampung Timur (74,2%). Persentase terendah puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA terdapat di Kabupaten Mesuji (37,5%) kemudian Kabupaten Way Kanan (38,8%) dan Kabupaten Pesawaran (41,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare adalah sebesar 70,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare terdapat di Kabupaten Pringsewu (100%) kemudian Kota Metro (90,9%) dan Kabupaten Lampung Barat (88,9%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare terdapat di Kabupaten Mesuji (50,0%), Kabupaten Tulang Bawang Barat (55,6%) kemudian Kabupaten Pesawaran (58,3%).

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Tabel 4.8.7.3.1.a.

Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Pedoman Penanggulangan TB Paru	Pedoman Penanggulangan ISPA	Pedoman Penanggulangan Diare	Pedoman Penanggulangan DBD
1	Lampung Barat	18	88.9	77.8	88.9	44.4
2	Tanggamus	22	90.9	50.0	63.6	54.5
3	Lampung Selatan	24	100	70.8	75.0	75.0
4	Lampung Timur	31	90.3	74.2	71.0	51.6
5	Lampung Tengah	36	94.4	66.7	69.4	58.3
6	Lampung Utara	25	100	52.0	68.0	52.0
7	Way Kanan	18	88.9	38.9	61.1	61.1
8	Tulang Bawang	14	92.9	71.4	71.4	71.4
9	Pesawaran	12	100	41.7	58.3	41.7
10	Pringsewu	10	100	70.0	100	90.0
11	Mesuji	8	62.5	37.5	50.0	50.0
12	Tulangbawang Barat	9	100	66.7	55.6	66.7
13	Kota Bandar Lampung	27	92.6	74.1	66.7	59.3
14	Kota Metro	11	100	81.8	90.9	81.8
LAMPUNG		265	93.6	63.8	70.6	59.6

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD adalah sebesar 59,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD terdapat di Kabupaten Pringsewu (90,0%) kemudian Kota Metro (81,8%) dan Kabupaten Lampung Selatan (75%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD terdapat di Kabupaten Pesawaran (41,7%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (44,4%) dan Kabupaten Mesuji (50,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malaria adalah sebesar 73,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas dengan ketersediaan Buku Pedoman Penanggulangan Malaria terdapat di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesawaran (masing-masing 100%), kemudian Kabupaten Lampung Selatan (91,7%) dan Kabupaten Tanggamus (90,9%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malaria terdapat di Kabupaten Lampung Timur (51,6%) kemudian Kabupaten Lampung Tengah (52,8%) dan Kabupaten Lampung Utara (60,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Kusta adalah sebesar 59,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas dengan ketersediaan Buku Pedoman Penanggulangan Kusta terdapat di Kabupaten Lampung Selatan (79,2%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang (78,6%) dan Lampung Tengah (69,4%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Kusta terdapat di Kabupaten Pesawaran (33,3%) kemudian Kabupaten Mesuji (37,5%) dan Kota Metro (45,5%).

Tabel 4.8.7.3.1.b.

Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Pedoman Penanggulangan Malaria	Pedoman Penanggulangan Kusta	Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis	Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS
1	Lampung Barat	18	100	66.7	27.8	44.4
2	Tanggamus	22	90.9	59.1	13.6	31.8
3	Lampung Selatan	24	91.7	79.2	12.5	20.8
4	Lampung Timur	31	51.6	64.5	29.0	32.3
5	Lampung Tengah	36	52.8	69.4	13.9	41.7
6	Lampung Utara	25	60.0	48.0	20.0	28.0
7	Way Kanan	18	77.8	55.6	27.8	27.8
8	Tulang Bawang	14	85.7	78.6	21.4	28.6
9	Pesawaran	12	100	33.3	16.7	16.7
10	Pringsewu	10	90.0	40.0	30.0	40.0
11	Mesuji	8	62.5	37.5	12.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	66.7	66.7	44.4	22.2
13	Kota Bandar Lampung	27	74.1	48.1	22.2	44.4
14	Kota Metro	11	63.6	45.5	27.3	54.5
LAMPUNG		265	73.6	59.2	21.5	33.2

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis adalah sebesar 21,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas dengan ketersediaan Buku Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (44,4%) kemudian Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Way Kanan (27,8%) dan Kabupaten Metro (27,3%). Presentase terendah Puskesmas dengan ketersediaan Buku Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dan Mesuji (masing-masing 12,5%) diikuti Kabupaten Tanggamus (13,6%) dan Lampung tengah (13,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS adalah sebesar 33,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS terdapat di Kota Metro (54,5%) kemudian Kabupaten Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung (masing-masing 44,4%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS terdapat di Kabupaten Mesuji (12,5%) kemudian Kabupaten Pesawaran (16,7%) dan Kabupaten Lampung Selatan (20,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan Filariasis adalah sebesar 28,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Filariasis terdapat di Kota Metro (45,5%), kemudian Kabupaten Blampung timur (45,2%) dan Kabupaten Tulang bawang Barat (44,4%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Filariasis terdapat di Kota Pagar Alam (0%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Utara (20,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB adalah sebesar 52,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB terdapat di Kabupaten Tanggamus (72,7%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (70,8%) dan Kabupaten Way Kanan (66,7%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB terdapat di Kabupaten

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Pesawaran (16,7%) kemudian Kabupaten Lampung timur (41,9%) dan Kabupaten Tulang bawang (42,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies adalah sebesar 41,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies terdapat di Kabupaten Lampung Selatan (58,3%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (55,6%) dan Kota Metro (54,5%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies terdapat di Kabupaten Mesuji (12,5%) kemudian Kabupaten Lampung Utara (24,0%) dan Kabupaten Pesawaran (25,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza adalah sebesar 60 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza terdapat di Kabupaten Kabupaten Pringsewu (80,0%), kemudian Lampung Utara (76,0%) dan Kabupaten Lampung Tengah (72,2%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza terdapat di Kabupaten Pesawaran (25,0%) kemudian Kabupaten Lampung Timur (38,7%) dan Kabupaten Tulang Bawang (42,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki secara lengkap seluruh buku pedoman dalam Program Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 16,6%. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki secara lengkap seluruh buku pedoman terdapat di Kota Metro (27,3%) diikuti oleh Kabupaten Lampung Timur (22,6%) dan Kabupaten Way Kanan (22,2%). Presentase terendah Puskesmas yang memiliki secara lengkap seluruh buku pedoman terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (0%), diikuti Kabupaten Lampung Selatan (4,2%) dan Kabupaten Lampung Tengah (11,1%).

Tabel 4.8.7.3.1.c.

Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular				
			Pedoman Penanggulan gan Filariasis	Pedoman Penanggulan gan KLB	Pedoman Penanggulan gan Rabies	Pedoman Penanggulan gan Avian Influenza	Pedoman Lengkap
1	Lampung Barat	18	38.9	50.0	55.6	66.7	22.2
2	Tanggamus	22	18.2	72.7	45.5	63.6	13.6
3	Lampung Selatan	24	16.7	70.8	58.3	83.3	4.2
4	Lampung Timur	31	45.2	41.9	45.2	38.7	22.6
5	Lampung Tengah	36	25.0	47.2	36.1	72.2	11.1
6	Lampung Utara	25	20.0	60.0	24.0	76.0	20.0
7	Way Kanan	18	27.8	66.7	50.0	66.7	22.2
8	Tulang Bawang	14	21.4	42.9	35.7	42.9	21.4
9	Pesawaran	12	16.7	16.7	25.0	25.0	16.7
10	Pringsewu	10	30.0	60.0	40.0	80.0	20.0
11	Mesuji	8	37.5	50.0	12.5	37.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	44.4	44.4	44.4	44.4	0
13	Kota Bandar Lampung	27	25.9	48.1	37.0	48.1	18.5
14	Kota Metro	11	45.5	45.5	54.5	63.6	27.3
LAMPUNG		265	28.3	52.5	41.1	60.0	16.6

4.8.7.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam Upaya Pengendalian Penyakit Menular untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Angka provinsi untuk bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung adalah dalam bentuk kunjungan supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas (87,5%) dan diikuti oleh pertemuan monitoring dan evaluasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (84,5%) dan kemudian umpan balik (70,2%). Angka provinsi untuk persentase Puskesmas yang secara lengkap menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebesar 63,0 persen.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 87,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Metro (masing-masing 100%) kemudian Kabupaten Tanggamus (95,5%) dan Kabupaten Tulang Bawang (92,9%), sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular terdapat di Kabupaten Lampung Timur (61,3%) kemudian Kabupaten Mesuji (75,0%) dan Kabupaten Lampung Tengah (83,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 70,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (masing-masing 100%) diikuti Kota Metro (90,9%) dan Kota Bandar Lampung (85,2%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (35,7%) diikuti Kabupaten Lampung Tengah (52,8%) dan Kabupaten Lampung Timur (54,8%).

Tabel 4.8.7.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Lampung Barat	18	100	77.8	94.4	72.2
2	Tanggamus	22	95.5	59.1	81.8	59.1
3	Lampung Selatan	24	100	100	91.7	91.7
4	Lampung Timur	31	61.3	54.8	45.2	32.3
5	Lampung Tengah	36	83.3	52.8	86.1	47.2
6	Lampung Utara	25	84.0	72.0	92.0	72.0
7	Way Kanan	18	88.9	55.6	88.9	55.6
8	Tulang Bawang	14	92.9	35.7	92.9	35.7
9	Pesawaran	12	91.7	75.0	100	66.7
10	Pringsewu	10	90.0	100	90.0	80.0
11	Mesuji	8	75.0	62.5	87.5	50.0
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	100	88.9	88.9
13	Kota Bandar Lampung	27	92.6	85.2	85.2	77.8
14	Kota Metro	11	100	90.9	100	90.9
LAMPUNG		265	87.5	70.2	84.5	63.0

Angka provinsi untuk Puskesmas menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk mengikuti pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 84,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kota Metro dan Kabupaten Pesawaran (masing-masing 100%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (94,4%) dan Kabupaten Tulang Bawang (92,9%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Dinas Kesehatan terdapat di Kabupaten Lampung Timur (45,2%) kemudian Kabupaten Tanggamus (81,8%) dan Kota Bandar Lampung (85,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan secara lengkap untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 63,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Lampung Selatan (91,7%) kemudian Kota Metro (90,9%) dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (88,9%). Persentase Puskesmas terendah menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan terdapat di Kabupaten Lampung timur (32,3%) diikuti KabupatenTulang Bawang (35,7%) dan Kabupaten Lampung Tengah (47,2%).

4.8.8. PROGRAM IMUNISASI

4.8.8.1. Program Imunisasi di Puskesmas

Pada Rifaskes 2011 Pelayanan Imunisasi yang dikumpulkan meliputi Pelayanan Imunisasi Dalam Gedung Puskesmas dan Pelayanan Imunisasi di Luar Gedung Puskesmas. Angka provinsi untuk Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan imunisasi dalam

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

gedung Puskesmas di Provinsi Lampung tertinggi adalah dengan frekuensi seminggu sekali (55,1%), kemudian frekuensi setiap hari (28,3%), dua hari dalam seminggu (7,5%), dan tiga hari dalam seminggu (4,2%). Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi setiap hari terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (57,1%) kemudian Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Mesuji (masing-masing 50,0%) diikuti Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah (masing-masing 41,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi setiap hari terdapat di Kabupaten Lampung Timur (0%), Kota Metro (9,1%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dengan frekuensi 3 hari dalam seminggu adalah sebesar 4,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung puskesmas dengan frekuensi 3 hari dalam satu minggu terdapat di Kabupaten Way Kanan (22,2%) kemudian Kabupaten Mesuji (12,5%) dan Kabupaten Lampung Tengah (5,6%). Terdapat 7 Kabupaten/Kota dari 14 kabupaten/kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi 3 hari dalam seminggu (0,0%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi 2 hari dalam seminggu adalah sebesar 7,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi 2 hari dalam satu minggu terdapat Kabupaten Lampung Tengah (19,4%), kemudian Kabupaten Lampung Selatan (16,7%) dan Kabupaten Way Kanan serta Kota Bandar Lampung (masing-masing 11,1%). Terdapat 6 kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi 2 hari dalam seminggu (0%).

Tabel 4.8.8.1.1.

Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam dan Luar Gedung di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Frekuensi Pelayanan Imunisasi Dalam Gedung Puskesmas				Kegiatan Pelayanan Imunisasi di Luar Gedung Puskesmas
			% Setiap Hari	% Tiga Hari/Minggu	% Dua Hari/Minggu	% Seminggu Sekali	
1	Lampung Barat	18	27.8	0	0	55.6	94.4
2	Tanggamus	22	50.0	4.5	0	45.5	95.5
3	Lampung Selatan	24	41.7	4.2	16.7	37.5	100
4	Lampung Timur	31	0	0	0	93.5	96.8
5	Lampung Tengah	36	41.7	5.6	19.4	33.3	100
6	Lampung Utara	25	16.0	0	4.0	80.0	100
7	Way Kanan	18	33.3	22.2	11.1	27.8	94.4
8	Tulang Bawang	14	57.1	7.1	7.1	28.6	100
9	Pesawaran	12	33.3	0	8.3	58.3	100
10	Pringsewu	10	20.0	0	10.0	60.0	100
11	Mesuji	8	50.0	12.5	0	25.0	100
12	Tulangbawang Barat	9	11.1	0	0	33.3	100
13	Kota Bandar Lampung	27	14.8	3.7	11.1	70.4	96.3
14	Kota Metro	11	9.1	0	0	90.9	100
LAMPUNG		265	28.3	4.2	7.5	55.1	98.1

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi seminggu sekali adalah sebesar 55,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi seminggu sekali terdapat di Kabupaten Lampung Timur (93,5%) kemudian

Kota Metro (90,9%) dan Kabupaten Lampung Utara (80,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi seminggu sekali terdapat di Kabupaten Mesuji (25,0%) kemudian Kabupaten Way Kanan (27,8%) dan Tulang Bawang (28,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung adalah sebesar 98,1 persen. Terdapat 9 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang keseluruhan Puskesmasnya (100%) melakukan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung Puskesmas. Persentase terendah Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung Puskesmas terdapat di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Way Kanan (masing-masing 94,4%) kemudian Kabupaten Tanggamus (95,5%) dan Kota BandarLampung (96,3%).

4.8.8.2. Pelatihan Program Imunisasi

Pelatihan dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi yang telah dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Tatalaksana Imunisasi dan Pelatihan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) yang diikuti oleh petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari kedua jenis pelatihan tersebut, Pelatihan Tatalaksana Imunisasi merupakan pelatihan dengan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (48,3%) dan kemudian Pelatihan KIPI (27,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas di Provinsi Lampung yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tatalaksana Imunisasi adalah sebesar 48,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tatalaksana Imunisasi terdapat di Kota Bandar Lampung (70,4%) kemudian Kabupaten Pesawaran (66,7%) dan Kabupaten Tulang Bawang (64,3%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tatalaksana Imunisasi terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (0%) diikuti oleh Kabupaten Lampung Timur (32,3%) dan Kabupaten Mesuji (37,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan KIPI adalah sebesar 27,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan KIPI terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah (masing-masing 41,7%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang (35,7%) dan Kabupaten Pesawaran (33,3%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti Pelatihan KIPI terdapat di Kabupaten Pringsewu (10,0%) kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%) dan Kabupaten Mesuji (12,5%).

Tabel 4.8.8.2.1.
 Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Imunisasi
 Tahun 2009-2010 di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Tata Laksana Imunisasi	Pelatihan KIPI	Pelatihan Lengkap Pelayanan Imunisasi
1	Lampung Barat	18	38.9	22.2	22.2
2	Tanggamus	22	45.5	27.3	27.3
3	Lampung Selatan	24	62.5	41.7	41.7
4	Lampung Timur	31	32.3	12.9	12.9
5	Lampung Tengah	36	44.4	41.7	30.6
6	Lampung Utara	25	44.0	32.0	28.0
7	Way Kanan	18	50.0	22.2	22.2
8	Tulang Bawang	14	64.3	35.7	28.6
9	Pesawaran	12	66.7	33.3	25.0
10	Pringsewu	10	40.0	10.0	10.0
11	Mesuji	8	37.5	12.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	0	11.1	0
13	Kota Bandar Lampung	27	70.4	29.6	25.9
14	Kota Metro	11	63.6	27.3	27.3
LAMPUNG		265	48.3	27.9	24.5

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap kedua jenis pelatihan pelayanan imunisasi tersebut adalah sebesar 24,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap dalam Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Lampung Selatan (41,7%) kemudian Kabupaten Lampung Tengah (30,6%) dan Kabupaten Tulang Bawang (28,6%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap dalam Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (0%) kemudian Kabupaten Pringsewu (10,0%) dan Kabupaten Mesuji (12,5%).

4.8.8.3. Pedoman Program Imunisasi

Pedoman pelayanan imunisasi diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam pelayanan imunisasi buku pedoman yang telah dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, Pedoman Penanganan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Imunisasi.

Tabel 4.8.8.3.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi				
			Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia	Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi	Pedoman Penanganan KIPI	SOP Pelayanan Imunisasi	Lengkap Pedoman Pelayanan Imunisasi
1	Lampung Barat	18	77.8	83.3	72.2	50.0	44.4
2	Tanggamus	22	68.2	72.7	63.6	54.5	45.5
3	Lampung Selatan	24	66.7	79.2	70.8	79.2	45.8
4	Lampung Timur	31	51.6	64.5	29.0	38.7	19.4
5	Lampung Tengah	36	66.7	69.4	63.9	50.0	38.9
6	Lampung Utara	25	80.0	60.0	56.0	60.0	44.0
7	Way Kanan	18	77.8	66.7	55.6	50.0	44.4
8	Tulang Bawang	14	57.1	50.0	50.0	35.7	21.4
9	Pesawaran	12	83.3	83.3	83.3	50.0	41.7
10	Pringsewu	10	80.0	80.0	50.0	40.0	10.0
11	Mesuji	8	50.0	25.0	25.0	25.0	0
12	Tulangbawang Barat	9	77.8	55.6	55.6	55.6	55.6
13	Kota Bandar Lampung	27	77.8	74.1	48.1	66.7	40.7
14	Kota Metro	11	54.5	36.4	36.4	27.3	9.1
LAMPUNG		265	69.1	67.2	55.1	51.7	35.5

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki buku pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi Lampung, terbanyak adalah Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia (69,1%), Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi (67,2%), Pedoman Penanganan KIPI (55,1%), dan SOP Pelayanan Imunisasi (51,7%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia adalah sebesar 69,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia terdapat di Kabupaten Pesawaran (83,3%) kemudian Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Utara (masing-masing 80,0%) diikuti oleh Kabupaten Lampung barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung (77,8%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia terdapat di Kabupaten Mesuji (50,0%), kemudian Kabupaten Lampung Timur (51,6%) dan Kota Metro (54,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi adalah sebesar 67,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi terdapat di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesawaran (masing-masing 83,3%) kemudian Kabupaten Pringsewu (80%) dan Kabupaten Lampung Selatan (79,2%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi terdapat di Kabupaten Mesuji (25,0%) kemudian Kota Metro (36,4%) dan Kabupaten Tulang Bawang (50,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanganan KIPI adalah sebesar 55,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanganan KIPI terdapat di Kabupaten Pesawaran 83,3%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (72,2%) dan Lampung Selatan (70,8%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanganan KIPI terdapat di Kabupaten Mesuji (25,0%) kemudian Kota Metro (36,4%) dan Kabupaten Tulang Bawang (35,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki SOP Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 51,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki SOP Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Lampung Selatan (79,2%) kemudian Kota Bandar Lampung (66,7%) dan Kabupaten Lampung Utara (60,0%). Persentase terendah Puskesmas memiliki SOP Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Mesuji (25,0%) diikuti oleh Kota Metro (27,3%) dan Kabupaten Tulang Bawang (35,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki secara lengkap keempat jenis pedoman untuk Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 35,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelayanan Imunisasi secara lengkap terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (55,6%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (62,1%) dan Kabupaten (45,5%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelayanan Imunisasi secara lengkap terdapat di Kabupaten Mesuji (0%), kemudian Kota Metro (9,1%) dan Kabupaten Pringsewu (10,0%).

4.8.8.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Imunisasi untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Pelayanan Imunisasi. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk supervisi, umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maupun ikut serta pada pertemuan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Angka provinsi untuk bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas di Provinsi Lampung dalam Pelayanan Imunisasi adalah dalam bentuk pertemuan monitoring dan evaluasi program (81,5%), kemudian kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk supervisi (79,6%), dan umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (76,6%). Angka provinsi untuk Puskesmas menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan pelayanan imunisasi dalam bentuk kunjungan supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebesar 79,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk supervisi terdapat di Kota Metro (100%) kemudian Kabupaten Lampung Barat (94,4%) dan Kota Bandar Lampung (92,6%). Persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk supervisi terdapat di Kabupaten Lampung Timur (48,4%) kemudian Kabupaten Lampung Tengah (55,6%) serta Kabupaten Mesuji (62,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi dalam bentuk umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebesar 76,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdapat di Kabupaten Pringsewu (100%), Kabupaten Lampung Selatan (95,8%) kemudian Kota Bandar Lampung (92,6%) dan Kota Metro (90,9%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kab/Kota terdapat di Kabupaten Tulang Bawang (42,9%) kemudian Kabupaten Pesawaran (50,0%) dan Kabupaten Lampung Tengah (55,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi dalam bentuk keikutsertaan pada pertemuan monitoring dan evaluasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebesar 81,5 persen. Terdapat 2 kabupaten/kota

dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang 100,0 persen Puskesmasnya mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program, yaitu Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kota Metro. Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program terdapat di Kabupaten Lampung Timur (35,5%) kemudian Kabupaten Pesawaran (66,7%) dan Kota Bandar Lampung (74,1%).

Tabel 4.8.8.4.1.

Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Imunisasi di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Lampung Barat	18	94.4	88.9	88.9	72.2
2	Tanggamus	22	81.8	68.2	77.3	68.2
3	Lampung Selatan	24	100	95.8	95.8	95.8
4	Lampung Timur	31	48.4	71.0	35.5	19.4
5	Lampung Tengah	36	55.6	55.6	88.9	41.7
6	Lampung Utara	25	80.0	76.0	92.0	68.0
7	Way Kanan	18	88.9	83.3	100	77.8
8	Tulang Bawang	14	78.6	42.9	85.7	42.9
9	Pesawaran	12	91.7	50.0	66.7	41.7
10	Pringsewu	10	90.0	100	100	90.0
11	Mesuji	8	62.5	87.5	75.0	50.0
12	Tulangbawang Barat	9	100	100	100	100
13	Kota Bandar Lampung	27	92.6	92.6	74.1	70.4
14	Kota Metro	11	100	90.9	100	90.9
LAMPUNG		265	79.6	76.6	81.5	62.3

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima secara lengkap seluruh bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 62,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (100%) kemudian Kabupaten Lampung Selatan (95,8%) dan Kota Metro (90,9%). Persentase Puskesmas terendah menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi terdapat di Lampung Timur (19,4%) kemudian Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran (masing-masing 41,7%).

4.9. PELAYANAN PONED

Pelayanan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar) ditanyakan pada Puskesmas Perawatan dengan Pelayanan PONED. Di Provinsi Lampung, Puskesmas dengan Pelayanan PONED berjumlah 33 Puskesmas. Satu Kabupaten/Kota di Lampung tidak memiliki Puskesmas dengan Pelayanan PONED, yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 4.9.1.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan PONED di
Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk P ONED	Pelayanan P ONED 24 jam	Pelatihan P ONED yang diikuti Petugas
1	Lampung Barat	8	100	37.5
2	Tanggamus	1	100	100
3	Lampung Selatan	1	100	100
4	Lampung Timur	2	50.0	50.0
5	Lampung Tengah	1	100	100
6	Lampung Utara	5	100	20.0
7	Way Kanan	2	100	50.0
8	Tulang Bawang	2	50.0	100
9	Pesawaran	2	100	50.0
10	Pringsewu	1	100	100
11	Mesuji	2	100	50.0
12	Tulangbawang Barat	0	0	0
13	Kota Bandar Lampung	5	80.0	60.0
14	Kota Metro	1	100	100
LAMPUNG		33	90.9	54.5

Tabel 4.9.1. menunjukkan ketersediaan Pelayanan PONED 24 jam dan Keikutsertaan petugas dalam pelatihan PONED. Persentase puskesmas PONED yang memberikan pelayanan PONED 24 jam di Provinsi Lampung adalah 90,9 persen. Seluruh Puskesmas PONED di Kabupaten/kota LampungBarat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji dan Kota Metro telah menyediakan Pelayanan PONED 24 jam (100%). Sementara di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum ada Puskesmas PONED yang menyediakan Pelayanan PONED 24 jam (0%), selanjutnya di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang, Puskesmas PONED yang menyediakan Pelayanan PONED 24 jam masing-masing hanya 50,0%.

Persentase puskesmas PONED di Lampung yang petugasnya telah mengikuti pelatihan PONED adalah 54,5 persen. Seluruh Puskesmas PONED di 6 Kabupaten di Provinsi Lampung yang petugasnya telah mengikuti pelatihan PONED (100%) yaitu di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Pringsewu dan Kota Metro. Terendah di Kabupaten Lampung Utara (20%) dan Kabupaten Lampung Barat (37,5%), sedangkan Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang dan kabupaten Way Kanan (masing-masing 50 %).

4.10. PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sesuai SK Menkes no 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas, disebutkan bahwa salah satu dari tiga fungsi puskesmas adalah sebagai Pusat Pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan.

Tabel 4.10.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Petugas Khusus dan
Petugas yang dilatih Pemberdayaan Masyarakat,
Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Petugas Khusus	Petugas yang dilatih
1	Lampung Barat	18	38.9	16.7
2	Tanggamus	22	36.4	18.2
3	Lampung Selatan	24	50.0	33.3
4	Lampung Timur	31	58.1	54.8
5	Lampung Tengah	36	75.0	22.2
6	Lampung Utara	25	36.0	16.0
7	Way Kanan	18	55.6	22.2
8	Tulang Bawang	14	14.3	7.1
9	Pesawaran	12	25.0	8.3
10	Pringsewu	10	60.0	40.0
11	Mesuji	8	37.5	0
12	Tulangbawang Barat	9	11.1	0
13	Kota Bandar Lampung	27	33.3	18.5
14	Kota Metro	11	0	9.1
LAMPUNG		265	43.4	22.6

Tabel 4.10.1. menunjukkan secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai petugas khusus dan petugas yang dilatih pada tahun 2009 dan 2010. Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai petugas khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah 43,4 persen. Persentase tertinggi adalah di Kabupaten Lampung Tengah (75,0%) kemudian Kabupaten Pringsewu (60,0%) dan Kabupaten Lampung Timur (58,1%). Terendah di Kabupaten Kota Metro (0%), diikuti Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%) dan Kabupaten Tulang Bawang (14,3%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan terkait fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan bidang Kesehatan hanya 22,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan di Kabupaten Lampung Timur (54,8%) dan Kabupaten Pringsewu (40%), kemudian Kabupaten Lampung Selatan (33,3%). Terendah di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat (0%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang (7,1%) dan Kota Metro (9,1%).

Tabel 4.10.2.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pedoman, SOP dan Peraturan
tentang Pemberdayaan Masyarakat, di Provinsi Lampung, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman	SOP/Protap	Peraturan Tertulis
1	Lampung Barat	18	38.9	11.1	5.6
2	Tanggamus	22	27.3	18.2	13.6
3	Lampung Selatan	24	33.3	16.7	20.8
4	Lampung Timur	31	41.9	6.5	32.3
5	Lampung Tengah	36	47.2	11.1	16.7
6	Lampung Utara	25	16.0	16.0	16.0
7	Way Kanan	18	33.3	5.6	33.3
8	Tulang Bawang	14	21.4	7.1	7.1
9	Pesawaran	12	25.0	0	8.3
10	Pringsewu	10	60.0	40.0	50
11	Mesuji	8	0	12.5	25.0
12	Tulangbawang Barat	9	0	0	0
13	Kota Bandar Lampung	27	44.4	29.6	33.3
14	Kota Metro	11	18.2	0	0
LAMPUNG		265	32.8	13.2	20

Tabel 4.10.2. menunjukkan tentang ketersediaan pedoman, Standard Operational Procedure (SOP)/Protap Peraturan tertulis yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang memiliki pedoman pemberdayaan masyarakat hanya 32,8 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Pringsewu (60,0%), kemudian Kabupaten Lampung Tengah (47,0%) dan Kota Bandar Lampung (44,4%). Terendah di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat (0%), kemudian Kabupaten Lampung Utara (16,0%), dan Kota Metro (18,2%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai SOP/Protap pemberdayaan masyarakat hanya 13,2 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Pringsewu (40,0%), kemudian Kota Bandar Lampung (29,6%) dan Kabupaten Tanggamus (18,2%). Terendah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Metro dan Kabupaten Pesawaran (0%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang (7,1%) dan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah (11,1%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai peraturan tertulis pemberdayaan masyarakat hanya 20,0 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Pringsewu (50,0%), kemudian Kota Bandar Lampung dan Way Kanan (33,3%) dan Kabupaten Lampung Timur (32,3%). Terendah di Kota Metro dan Kabupaten Tulang bawang Barat (0%), kemudian Kabupaten Lampung Barat (5,6%) dan Kabupaten Tulang Bawang (7,1%).

Tabel 4.10.3. menunjukkan ketersediaan alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan hanya 10,2 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Tulang bawang (21,4%), kemudian Kabupaten Lampung Timur (19,4%) dan Kabupaten Lampung Utara (16,0%). Sedangkan persentase terendah ada Kota Metro (0%), kemudian Kabupaten Lampung Selatan (4,2%), Kabupaten Tanggamus (4,5%) dan Lampung barat (5,6).

Tabel 4.10.3.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alokasi Dana Khusus
Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung
Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Alokasi Dana Khusus
1	Lampung Barat	18	5.6
2	Tanggamus	22	4.5
3	Lampung Selatan	24	4.2
4	Lampung Timur	31	19.4
5	Lampung Tengah	36	5.6
6	Lampung Utara	25	16.0
7	Way Kanan	18	11.1
8	Tulang Bawang	14	21.4
9	Pesawaran	12	8.3
10	Pringsewu	10	10.0
11	Mesuji	8	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	11.1
13	Kota Bandar Lampung	27	11.1
14	Kota Metro	11	0
LAMPUNG		265	10.2

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Tabel 4.10.4.a dan 4.10.4.b. menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan puskesmas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pertemuan Tingkat Desa, Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), Pelatihan Kader Kesehatan Baru, Pertemuan Kader Kesehatan, Pelatihan Kader Lama, Pelatihan Bagi Tokoh Masyarakat, dan Pelatihan Bagi LSM/Ormas. Kegiatan pemberdayaan masyarakat terbanyak adalah Pertemuan Kader (72,1%), kemudian Pertemuan Tingkat Desa (71,3%), Musyawarah Masyarakat Desa (70,2%), Survei Mawas Diri (63,4%), Pelatihan Kader Lama (62,3%), Pelatihan Kader Kesehatan Baru (46,8%), Pelatihan Bagi Toma (38,1%) dan Pelatihan Bagi Ormas (10,2%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pertemuan tingkat desa adalah 71,3%. Persentase tertinggi di Kabupaten Pringsewu (90%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (88,9%) dan Kabupaten Lampung timur (83,9%). Persentase terendah di Kabupaten Mesuji (37,5%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang dan Tanggamus (50,0%).

Tabel 4.10.4.a.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pertemuan Tingkat Desa	Survei Mawas Diri	Musyawarah Masyarakat Desa	Pelatihan Kader Kesehatan Baru
1	Lampung Barat	18	72.2	72.2	77.8	38.9
2	Tanggamus	22	50.0	54.5	54.5	54.5
3	Lampung Selatan	24	79.2	62.5	79.2	58.3
4	Lampung Timur	31	83.9	83.9	87.1	64.5
5	Lampung Tengah	36	77.8	77.8	77.8	44.4
6	Lampung Utara	25	60.0	56.0	68.0	40.0
7	Way Kanan	18	77.8	66.7	61.1	27.8
8	Tulang Bawang	14	50.0	35.7	42.9	57.1
9	Pesawaran	12	75.0	75.0	75.0	16.7
10	Pringsewu	10	90.0	70.0	90.0	70.0
11	Mesuji	8	37.5	25.0	50.0	50.0
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	33.3	55.6	77.8
13	Kota Bandar Lampung	27	66.7	59.3	66.7	33.3
14	Kota Metro	11	81.8	54.5	63.6	27.3
	LAMPUNG	265	71.3	63.4	70.2	46.8

Tabel 4.10.4.b.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pertemuan Kader Kesehatan	Pelatihan Kader Lama	Pelatihan Bagi Toma	Pelatihan Bagi LSM/Ormas
1	Lampung Barat	18	66.7	44.4	16.7	16.7
2	Tanggamus	22	50.0	45.5	36.4	9.1
3	Lampung Selatan	24	75.0	75.0	41.7	16.7
4	Lampung Timur	31	93.5	77.4	54.8	16.1
5	Lampung Tengah	36	66.7	66.7	41.7	8.3
6	Lampung Utara	25	64.0	60.0	36.0	12.0
7	Way Kanan	18	55.6	38.9	38.9	11.1
8	Tulang Bawang	14	57.1	42.9	7.1	0
9	Pesawaran	12	83.3	83.3	75.0	8.3
10	Pringsewu	10	90.0	70.0	50.0	10
11	Mesuji	8	75.0	62.5	25.0	0
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	66.7	11.1	0
13	Kota Bandar Lampung	27	74.1	55.6	44.4	7.4
14	Kota Metro	11	90.9	90.9	18.2	9.1
	LAMPUNG	265	72.1	62.3	38.1	10.2

Laporan Provinsi Lampung Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Survei Mawas Diri adalah 63,4 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Lampung Timur (83,9%), kemudian Kabupaten Lampung Tengah (77,8%) dan Kabupaten Pesawaran (75,0%). Persentase terendah di Kabupaten Mesuji (25,0%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (33,3%) dan Kabupaten Tulang Bawang (35,7%).

Tabel 4.10.5. menunjukkan pembinaan dan pemantauan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilakukan petugas puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Pembinaan dan pemantauan yang dilakukan dapat berupa pemberian umpan balik laporan kegiatan, melakukan supervisi kegiatan dan mengadakan pertemuan pembinaan. Pembinaan dan pemantauan yang sering dilakukan petugas puskesmas adalah melakukan pertemuan pembinaan sebesar 67,2 persen, diikuti melaksanakan supervisi sebesar 57,4 persen, dan memberikan umpan balik laporan kegiatan sebesar 42,6 persen.

Tabel 4.10.5.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan UKBM di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Umpan Balik	Supervisi	Pertemuan Pembinaan
1	Lampung Barat	18	33.3	72.2	66.7
2	Tanggamus	22	36.4	36.4	31.8
3	Lampung Selatan	24	45.8	66.7	83.3
4	Lampung Timur	31	64.5	61.3	80.6
5	Lampung Tengah	36	41.7	58.3	72.2
6	Lampung Utara	25	48.0	48.0	52.0
7	Way Kanan	18	22.2	33.3	61.1
8	Tulang Bawang	14	7.1	42.9	57.1
9	Pesawaran	12	16.7	41.7	58.3
10	Pringsewu	10	90.0	90.0	100
11	Mesuji	8	50.0	50.0	62.5
12	Tulangbawang Barat	9	55.6	55.6	66.7
13	Kota Bandar Lampung	27	33.3	70.4	66.7
14	Kota Metro	11	63.6	81.8	90.9
LAMPUNG		265	42.6	57.4	67.2

Secara provinsi, Persentase Puskesmas yang memberikan umpan balik laporan kegiatan sebesar 42,6 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Pringsewu (90,0%), kemudian Kabupaten Way Kanan (83,3%) dan Kota Metro (72,7%). Persentase terendah di Kabupaten Mesuji (25,0%), Kabupaten Kota Bandar Lampung (25,9%), dan Kota Tanggamus (31,8%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang melakukan supervisi adalah 57,4 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Pringsewu (90,0%), diikuti Kota Metro (81,8%) dan Kabupaten Lampung Barat (72,7%). Terendah di Kabupaten Way Kanan (33,3%), kemudian Kabupaten Tanggamus (36,4%) dan Kabupaten Pesawaran (41,7%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang melakukan pertemuan pembinaan adalah 67,2 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Pringsewu (100%), kemudian Kabupaten Kota Metro (90,9%) dan Kabupaten Lampung Timur (80,6%). Persentase terendah di Kabupaten Tanggamus (31,8%), kemudian Kabupaten Lampung Utara (52,0%) dan Kabupaten Tulang Bawang (57,1%).

Tabel 4.10.6. menunjukkan kondisi input dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Input dikategorikan baik bila tersedia sumber daya tenaga, pedoman dan dana khusus. Sedangkan proses dikategorikan baik bila ada kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, pelatihan kader kesehatan baru dan lama.

Secara provinsi, persentase Puskesmas dengan kondisi input pemberdayaan masyarakat yang baik hanya 4,9 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang mempunyai Input pemberdayaan Masyarakat yang baik adalah di Kabupaten Pringsewu (20,0%), kemudian Kabupaten Lampung Barat (11,1%) dan Kabupaten Tanggamus (9,1%). Terdapat 6 Kabupaten/Kota yang tidak ada input yang baik untuk pemberdayaan masyarakatnya.

Secara provinsi, persentase Puskesmas dengan proses yang baik dalam pemberdayaan masyarakat hanya 53,6 persen. Persentase puskesmas tertinggi dengan proses pemberdayaan masyarakat yang baik adalah di Kabupaten Pesawaran (75,0%), kemudian Kabupaten Lampung Timur (71,0%) dan Kabupaten Pringsewu (70,0%), sedang persentase terendah adalah di Kabupaten Mesuji (25,0%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang (28,6%) dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (33,3%).

Tabel 4.10.6.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Input dan Proses
Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Input	Proses
1	Lampung Barat	18	11.1	55.6
2	Tanggamus	22	9.1	54.5
3	Lampung Selatan	24	8.3	54.2
4	Lampung Timur	31	3.2	71.0
5	Lampung Tengah	36	5.6	63.9
6	Lampung Utara	25	4.0	48.0
7	Way Kanan	18	0	38.9
8	Tulang Bawang	14	0	28.6
9	Pesawaran	12	0	75.0
10	Pringsewu	10	20.0	70.0
11	Mesuji	8	0	25.0
12	Tulangbawang Barat	9	0	33.3
13	Kota Bandar Lampung	27	3.7	48.1
14	Kota Metro	11	0	45.5
LAMPUNG		265	4.9	53.6

Tabel 4.10.7.a. dan 4.10.7.b. menunjukkan keberadaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. UKBM yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pos Pelayanan terpadu (Posyandu), Pos Pelayanan terpadu bagi lanjut usia (Posyandu Lansia), Pos Obat desa (POD)/Warung Obat Desa (WOD), Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan pesantren (Poskestren), Dana Sehat, Kelompok Peduli Lansia, Kelompok Peduli HIV-AIDS dan Kelompok Peduli TB Paru. Secara provinsi, persentase keberadaan UKBM yang terbanyak adalah Posyandu (97%), kemudian Posyandu Lansia (80,0%), Dana Sehat (18,15) dan Peduli Lansia (20,4%), Peduli TB Paru (24,2%), Poskestren (52,2%), POD/WOD (17,4%), Peduli HIV-AIDS (12,9%) dan SBH (40,0%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Posyandu adalah 97,0 persen,. Terdapat 9 provinsi dari 14 provinsi yang seluruh puskesmasnya mempunyai Posyandu

(100%). Provinsi dengan persentase Puskesmas terendah yang ada posyandu adalah di Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat (88,9%), Kabupaten Pesawaran (91,7%).

Tabel 4.10.7.a.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Posyandu	Posyandu Lansia	POD/WOD	SBH	Poskestren
1	Lampung Barat	18	100	61.1	16.7	38.9	55.6
2	Tanggamus	22	95.5	86.4	18.2	27.3	31.8
3	Lampung Selatan	24	100	95.8	29.2	41.7	62.5
4	Lampung Timur	31	100	80.6	25.8	35.5	54.8
5	Lampung Tengah	36	88.9	66.7	16.7	69.4	52.8
6	Lampung Utara	25	100	68.0	4.0	52.0	60.0
7	Way Kanan	18	100	94.4	16.7	38.9	83.3
8	Tulang Bawang	14	100	42.9	14.3	28.6	35.7
9	Pesawaran	12	91.7	91.7	16.7	50.0	50.0
10	Pringsewu	10	100	100	20.0	80.0	90.0
11	Mesuji	8	100	100	0	0	25.0
12	Tulangbawang Barat	9	88.9	66.7	11.1	22.2	44.4
13	Kota Bandar Lampung	27	96.3	92.6	22.2	7.4	25.9
14	Kota Metro	11	100	90.9	9.1	45.5	72.7
LAMPUNG		265	97.0	80.0	17.4	40.0	52.5

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Posyandu Lansia adalah 80,0 persen. Terdapat 2 Kabupaten dan Kota seluruh puskesmasnya mempunyai Posyandu Lansia (100%) yaitu Kabupaten Pringsewu, Kota Mesuji. Sedang persentase puskesmas terendah yang ada Posyandu Lansia adalah di Kabupaten Tulang Bawang (42,9%), Kabupaten Lampung Barat (61,1%), dan Kabupaten Lampung Tengah (66,7%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada POD/WOD adalah 17,4 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada POD/WOD adalah Kabupaten Lampung Selatan (29,2%), kemudian Kabupaten Lampung Timur (25,8%) dan Kota Bandar Lampung (22,2%). Terdapat 1 Kabupaten dan Kota yang puskesmasnya tidak ada POD/WODnya yaitu Kabupaten Mesuji (0%), kemudian Kabupaten Lampung Utara (4,0%) dan Kota Metro (9,1%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada SBH adalah 40,0 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada SBH adalah Kabupaten Pringsewu (80,0%), kemudian Kabupaten Lampung Tengah (69,4%) dan Kabupaten Lampung Utara (52,0%). Terdapat 1 Kabupaten yang puskesmasnya tidak ada SBHnya yaitu Kabupaten Pringsewu, diikuti Kabupaten Kota Bandar Lampung (7,4%) dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (22,2%)

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Poskestren adalah 52,2 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada Poskestren adalah Kabupaten Pringsewu (90,0%), kemudian Kabupaten Way Kanan (83,3%) dan Kota Metro (72,7%). Terendah Kabupaten Mesuji (25,0%), kemudian Kota Bandar Lampung (25,9%) dan kabupaten Tanggamus (31,8%%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Dana Sehat 18,1 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada Dana Sehat adalah Kabupaten Lampung Timur (32,3%), kemudian Kota Bandar Lampung (25,9%) dan Kabupaten Mesuji (25,0%). Terendah di Kabupaten Pesawaran dan Tulang Bawang Barat (0%), diikuti Kota Metro (9,1%) dan Kabupaten Way Kanan (11,1%).

Tabel 4.10.7.b.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Dana Sehat	Peduli Lansia	Peduli HIV-AIDS	Peduli TB Paru
1	Lampung Barat	18	22.2	5.6	5.6	16.7
2	Tanggamus	22	13.6	13.6	4.5	13.6
3	Lampung Selatan	24	12.5	16.7	0	33.3
4	Lampung Timur	31	32.3	29.0	19.4	35.5
5	Lampung Tengah	36	19.4	22.2	8.3	36.1
6	Lampung Utara	25	16.0	24.0	12.0	28.0
7	Way Kanan	18	11.1	16.7	0	5.6
8	Tulang Bawang	14	21.4	0	0	0
9	Pesawaran	12	0	8.3	0	16.7
10	Pringsewu	10	20.0	30.0	10.0	40.0
11	Mesuji	8	25.0	25.0	12.5	25.0
12	Tulangbawang Barat	9	0	0	0	11.1
13	Kota Bandar Lampung	27	25.9	37.0	11.1	29.6
14	Kota Metro	11	9.1	36.4	0	9.1
LAMPUNG		265	18.1	20.4	7.2	24.2

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Peduli Lansia adalah 20,4 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada Peduli Lansia adalah Kota Bandar Lampung (57,0%), kemudian Kota Metro (36,4%) dan Kabupaten Pringsewu (30,0%). Terdapat 2 Kabupaten yang puskesmasnya tidak ada Peduli Lansia yaitu Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, diikuti Kabupaten Lampung Barat (5,6%) dan Pesawaran (8,3%)

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Peduli HIV-AIDS adalah 7,2 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada Poskestren adalah Kabupaten Lampung Timur (19,4%), kemudian Kabupaten Mesuji (12,5%) dan Kabupaten Lampung Utara (12,0%). Terdapat 6 Kabupaten yang puskesmasnya tidak ada Peduli HIV-AIDS yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, dan Kota Metro.

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Peduli TB Paru adalah 24,2 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada Peduli TB Paru adalah Kabupaten Pringsewu (40,0%), kemudian Kabupaten Lampung Tengah (36,1%) dan Kabupaten Lampung Timur (35,5%). Terdapat 1 Kabupaten yang puskesmasnya tidak ada Poskestren yaitu Kabupaten Tulang Bawang, diikuti Kabupaten Way Kanan (5,6%) dan Kota Metro (9,1%).

4.11. ALAT KESEHATAN (ALKES) DAN OBAT

Ketersediaan alat kesehatan dianalisis menurut: 1. Kelengkapan jenis alat yang tersedia yaitu jenis alat yang ditunjukkan oleh petugas Puskesmas dan 2. Jenis alat yang baik dan digunakan yaitu jenis alat yang ditunjukkan dan diakui alat tersebut baik dan digunakan untuk pelayanan. Analisis dikelompokkan atas 5 yaitu : 80-100 persen, 60-79 persen, 40-59 persen, 20-39 persen, dan 0- 19 persen.

4.11.1. ALKES POLIKLINIK UMUM

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Poliklinik umum yang dikumpulkan sebanyak 56 jenis.

Tabel 4.11.1.1.

Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik Umum di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kelengkapan Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik Umum				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Lampung Barat	18	11.1	27.8	16.7	16.7	27.8
2	Tanggamus	22	0	36.4	50.0	9.1	4.5
3	Lampung Selatan	24	0	4.2	45.8	50.0	0
4	Lampung Timur	31	0	19.4	54.8	25.8	0
5	Lampung Tengah	36	19.4	44.4	30.6	2.8	2.8
6	Lampung Utara	25	4.0	28.0	32.0	32.0	4.0
7	Way Kanan	18	0	5.6	33.3	33.3	27.8
8	Tulang Bawang	14	0	7.1	42.9	50.0	0
9	Pesawaran	12	8.3	33.3	25.0	33.3	0
10	Pringsewu	10	0	30.0	40.0	30.0	0
11	Mesuji	8	0	37.5	25.0	25.0	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	0	44.4	33.3	11.1	11.1
13	Kota Bandar Lampung	27	7.4	40.7	40.7	7.4	3.7
14	Kota Metro	11	0	0	72.7	27.3	0
LAMPUNG		265	4.9	26.4	39.2	23.4	6.0

Tabel 4.11.1.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat poliklinik umum. Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik umum hanya 4,9 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Lampung Tengah (19,4%), kemudian Kabupaten Pesawaran (8,3%) dan Kota Bandar Lampung (7,4%). Sementara ada 9 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Ketersediaan 80-100 persen jenis alat poliklinik umum (0%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik umum adalah 26,4 persen. Tertinggi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (44,4%), kemudian Kota Bandar Lampung (40,7%) dan Kabupaten Mesuji (37,5%). Persentase terendah di Kota Metro (0%), kemudian Kabupaten Lampung Selatan (4,2%) dan Kota Way Kanan (5,6%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Lampung yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik umum adalah 39,2% persen. Persentase Tertinggi di Kota Metro (72,7%), kemudian Kabupaten Lampung Timur (54,8%), Kabupaten Tanggamus (50,0%). Persentase terendah di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Mesuji (25,0%), kemudian Kabupaten Lampung Utara (32,0%) dan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran (33,3%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik umum adalah 23,4 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pringsewu (50,0%), kemudian Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran (33,3%). Persentase terendah di Kabupaten Lampung Tengah (2,8%), kemudian Kota Bandar Lampung (7,4%) dan Kabupaten Tanggamus (9,1%).

Persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 0-19 persen jenis alat poliklinik umum di Provinsi Lampung adalah 6,0 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Lampung Barat dan Way Kanan (27,8%), kemudian Kabupaten Mesuji (12,5%) dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%). Ada 6 Kabupaten/Kota yang terendah dengan persentase 0 persen, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, dan kota Metro.

4.11.2. ALKES POLIKLINIK KIA

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Poliklinik KIA yang dikumpulkan sebanyak 59 jenis. Tabel 4.11.2.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat poliklinik KIA. Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik KIA hanya 13,6 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Lampung Timur (35,5%), kemudian Kabupaten Lampung Barat (27,8%) dan Kabupaten Tulang Bawang (21,4%). Terendah di Kabupaten Lampung Selatan (0%), kemudian Kabupaten Lampung Utara (4,0%) dan Kabupaten Pesawaran (8,3%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 37,7 persen. Tertinggi di Kota Bandar Lampung (63,0%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (55,6%) dan Kabupaten Lampung Tengah (52,8%). Terendah di Kabupaten Mesuji (12,5%), kemudian Kota Metro (18,2%) dan Kabupaten Tulang Bawang (21,4%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 31,3 persen. Tertinggi di Kabupaten Pesawaran (58,3%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji (50,0%). Terendah di Kabupaten Lampung Barat (5,6%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Bandar Lampung (11,1%) dan Kabupaten Lampung Timur (19,4%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 14,0 persen. Tertinggi di Kota Metro (36,4%), kemudian Kabupaten Pringsewu (30,0%) dan Kabupaten Lampung Selatan (25,0%). Terendah di Kabupaten Lampung Timur (3,2%), kemudian Kabupaten Tanggamus (4,5%), dan Kabupaten Lampung Tengah (5,6%)

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 3,4 persen. Tertinggi di Kabupaten Lampung Barat (16,7%), kemudian Kabupaten Mesuji (12,5%) dan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%) . Sementara di 6 Kabupaten/Kota, sudah tidak ada Puskesmas yang persediaan Jenis alat Poliklinik KIA hanya 0-20 persen (%).

Tabel 4.11.2.1.

Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik KIA di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kelengkapan Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik KIA				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Lampung Barat	18	27.8	27.8	5.6	22.2	16.7
2	Tanggamus	22	13.6	40.9	40.9	4.5	0
3	Lampung Selatan	24	0	25.0	45.8	25.0	4.2
4	Lampung Timur	31	35.5	41.9	19.4	3.2	0
5	Lampung Tengah	36	8.3	52.8	30.6	5.6	2.8
6	Lampung Utara	25	4.0	36.0	36.0	24.0	0
7	Way Kanan	18	0	27.8	38.9	22.2	11.1
8	Tulang Bawang	14	21.4	21.4	50.0	7.1	0
9	Pesawaran	12	8.3	25.0	58.3	8.3	0
10	Pringsewu	10	20.0	30.0	20.0	30.0	0
11	Mesuji	8	12.5	12.5	50.0	12.5	12.5
12	Tulangbawang Barat	9	11.1	55.6	11.1	11.1	11.1
13	Kota Bandar Lampung	27	18.5	63.0	11.1	7.4	0
14	Kota Metro	11	0	18.2	45.5	36.4	0
LAMPUNG		265	13.6	37.7	31.3	14.0	3.4

4.11.3. ALKES PONED

Ditanyakan khusus pada Puskesmas PONED. Pada Rifaskes 2011 data Jenis Alat PONED yang dikumpulkan sebanyak 26 jenis.

Tabel 4.11.3.1, menunjukkan persentase Puskesmas PONED menurut ketersediaan jenis alat kesehatan PONED. Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 80% atau lebih jenis alat kesehatan PONED adalah 12,1 persen. Puskesmas PONED di Kabupaten Pringsewu yang memiliki ketersediaan alat kesehatan PONED 80-100 persen tertinggi (100%), kemudian Lampung Barat (37,5%), sementara 12 Kabupaten/kota tidak mempunyai lebih 80 persen jenis alat kesehatan (0%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED 36,4 persen. Hanya 6 Puskesmas PONED yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED, Tertinggi di Kabupaten Lampung Utara (60%), kemudian Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang dan Pesawaran (50,0%), dan Kota Bandar Lampung (40,0%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED adalah 24,2 persen. Dua Puskesmas PONED yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED yaitu Lampung Selatan dan Kota Metro (100%), kemudian Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Lampung Timur, Way Kanan dan Pringsewu (50,0 %), kemudian Kabupaten Lahat (20,0%), sementara 7 Kabupaten/Kota Lainnya 0 persen.

Tabel 4.11.3.1.
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Alat PONED di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kelengkapan Ketersediaan Alat PONED				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Lampung Barat	8	37.5	50.0	0	12.5	0
2	Tanggamus	1	0	0	0	100	0
3	Lampung Selatan	1	0	0	100	0	0
4	Lampung Timur	2	0	50.0	50.0	0	0
5	Lampung Tengah	1	0	0	0	100	0
6	Lampung Utara	5	0	60.0	20.0	20.0	0
7	Way Kanan	2	0	0	50.0	50.0	0
8	Tulang Bawang	2	0	50.0	0	0	50.0
9	Pesawaran	2	0	50.0	0	0	50.0
10	Pringsewu	1	100	0	0	0	0
11	Mesuji	2	0	0	50.0	0	50.0
12	Tulangbawang Barat	0	0	0	0	0	0
13	Kota Bandar Lampung	5	0	40.0	40.0	0	20.0
14	Kota Metro	1	0	0	100	0	0
LAMPUNG		33	12.1	36.4	24.2	15.2	12.1

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED adalah 15,2 persen. Lima Puskesmas PONED yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED, Tertinggi di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Tengah (100%), kemudian Kabupaten Way Kanan (50,0%) dan Lampung Utara (20,0%), sementara 9 Puskesmas tidak mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED.

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED adalah 12,1 persen. Hanya 4 Puskesmas yang

mempunyai jenis alat kesehatan Puskesmas Poned yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Pesawaran dan Mesuji (50,0%) dan Kota Bandar Lampung (20,0%), sementara Kabupaten/Kota lain tidak mempunyai kurang dari 20,0% jenis alat kesehatan Puskesmas Poned (0%).

4.11.4. ALKES IMUNISASI

Tabel 4.11.4.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat imunisasi. Jenis alat kesehatan imunisasi yang dimaksud pada laporan ini adalah Cold Box, Vaccine Carrier dan Kulkas yang dimiliki puskesmas tersebut untuk pelayanan imunisasi.

Tabel 4.11.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alkes Imunisasi
di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Alkes Imunisasi (Kulkas, Cold Box, Vaccine Carrier)
1	Lampung Barat	18	61.1
2	Tanggamus	22	45.5
3	Lampung Selatan	24	79.2
4	Lampung Timur	31	71.0
5	Lampung Tengah	36	69.4
6	Lampung Utara	25	64.0
7	Way Kanan	18	66.7
8	Tulang Bawang	14	57.1
9	Pesawaran	12	91.7
10	Pringsewu	10	80.0
11	Mesuji	8	50.0
12	Tulangbawang Barat	9	66.7
13	Kota Bandar Lampung	27	66.7
14	Kota Metro	11	72.7
LAMPUNG		265	67.2

Tabel 4.11.4.1., menunjukkan persentase Puskesmas yang mempunyai tiga jenis alat imunisasi (cold box, kulkas dan vaccine carrier) yang berfungsi. Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai ketiga jenis alat imunisasi berfungsi yaitu 67,2% persen. Tertinggi di Provinsi Kabupaten Pesawaran (91,7%), diikuti Kabupaten Pringsewu (80,0%) dan Kabupaten Lampung Selatan (79,2%). Terendah di Kabupaten Tanggamus (45,5%), kemudian Kabupaten Mesuji (50,0%) dan Kabupaten Tulang Bawang (57,1%).

4.11.5. OBAT UMUM

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat umum yang dikumpulkan sebanyak 44 jenis. Tabel 4.11.5.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Pelayanan obat umum. Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen ketersediaan pelayanan obat umum adalah 25,3 persen. Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan pelayanan obat umum Tertinggi di Kabupaten Lampung Barat (50,0%), kemudian Kabupaten Pringsewu (40,0%) kemudian Kabupaten Tanggamus (36,4%). Terendah di ota Bandar Lampung (3,7%), kemudian Kota Metro (9,1%) dan Kabupaten Lampung Utara (12,0%)

Tabel 4.11.5.1.
 Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Obat Umum di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kelengkapan Ketersediaan Obat Umum				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Lampung Barat	18	50.0	33.3	16.7	0	0
2	Tanggamus	22	36.4	63.6	0	0	0
3	Lampung Selatan	24	20.8	75.0	0	0	4.2
4	Lampung Timur	31	19.4	77.4	3.2	0	0
5	Lampung Tengah	36	25.0	72.2	2.8	0	0
6	Lampung Utara	25	12.0	84.0	4.0	0	0
7	Way Kanan	18	22.2	72.2	5.6	0	0
8	Tulang Bawang	14	78.6	21.4	0	0	0
9	Pesawaran	12	25.0	66.7	8.3	0	0
10	Pringsewu	10	40.0	60.0	0	0	0
11	Mesuji	8	12.5	87.5	0	0	0
12	Tulangbawang Barat	9	22.2	66.7	11.1	0	0
13	Kota Bandar Lampung	27	3.7	77.8	18.5	0	0
14	Kota Metro	11	9.1	81.8	9.1	0	0
LAMPUNG		265	25.3	68.7	5.7	0	0.4

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen pelayanan obat umum adalah 68,7 persen. Kabupaten yang mempunyai persediaan obat tertinggi yaitu Kabupaten Mesuji (87,5%), kemudian Kabupaten Lampung Utara (84,0%) dan Kota Metro (81,8%). Sementara puskesmas terendah yang memiliki ketersediaan pelayanan obat umum 60-79 persen yaitu Kabupaten Tulang Bawang (21,4 %) dan Kabupaten Lampung Barat (33,3%).

Persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen pelayanan obat umum Di Provinsi Lampung adalah 5,7 persen. Kabupaten yang puskesmasnya memiliki ketersediaan pelayanan obat umum 40-59 persen terbanyak adalah Kota Bandar Lampung (18,5%) dan Kabupaten Lampung Barat (16,7%). Sementara puskesmas di 5 Kabupaten/Kota tidak ada yang memiliki ketersediaan pelayanan obat umum 40-59 persen (0%), yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji.

Persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39% persen pelayanan obat umum Di Provinsi Lampung adalah 0 persen dan Puskesmas yang mempunyai <20 % pelayanan obat umum di Provinsi Lampung adalah 0,4%. Kabupaten yang hanya mempunyai pelayanan obat umum < 20% hanya kabupaten Lampung Selatan (4,2%) dan Kabupaten/kota lain tidak mempunyai <20% pelayanan obat umum.

4.11.6. OBAT PONED

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat PONED yang dikumpulkan sebanyak 17 jenis.

Tabel 4.11.6.1.
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Obat PONE D di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kelengkapan Ketersediaan Obat PONE D				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Lampung Barat	8	0	0	62.5	12.5	25.0
2	Tanggamus	1	0	0	0	0	100
3	Lampung Selatan	1	0	0	100	0	0
4	Lampung Timur	2	0	0	50.0	50.0	0
5	Lampung Tengah	1	0	0	0	100	0
6	Lampung Utara	5	0	0	20.0	60.0	20.0
7	Way Kanan	2	0	50.0	50.0	0	0
8	Tulang Bawang	2	0	50.0	0	50.0	0
9	Pesawaran	2	0	0	50.0	50.0	0
10	Pringsewu	1	0	0	0	100	0
11	Mesuji	2	0	0	50.0	50.0	0
12	Tulangbawang Barat	0	0	0	0	0	0
13	Kota Bandar Lampung	5	0	20.0	20.0	60.0	0
14	Kota Metro	1	0	0	100	0	0
LAMPUNG		33	0	9.1	39.4	39.4	12.1

Tabel 4.11.6.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Jenis obat PONE D. Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen Jenis obat PONE D 0 persen. Semua Puskesmas PONE D di Kabupaten/Kota di provinsi Lampung (0%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis obat PONE D 9,1% persen. Hanya Puskesmas PONE D di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki ketersediaan 60-79 persen Jenis obat PONE D (50%). Sementara 11 Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas PONE D yang tidak mempunyai 60-79 persen Jenis obat PONE D (0%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis obat PONE D hanya 39,4 persen. Puskesmas PONE D di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Metro yang masing-masing memiliki ketersediaan 100 persen Jenis obat PONE D. Sedangkan Kabupaten Lampung Barat 62,5% dan Kabupaten Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran dan Mesuji masing-masing memiliki ketersediaan 50,0% obat PONE D. Sementara 5 Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas PONE D lainnya tidak mempunyai 40-59 persen Jenis obat PONE D (0%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis obat PONE D adalah 39,4 persen. Tertinggi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu (100%), memiliki persediaan 20-39 persen Jenis obat PONE D. Sementara 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Way Kanan, Tulang Bawang Barat dan Kota Metro tidak mempunyai 20-39 persen jenis obat PONE D (0%).

Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas PONE D yang mempunyai persediaan jenis obat PONE D kurang dari 20 persen Jenis obat PONE D (0-19%) adalah 12,1 persen. Puskesmas PONE D di Kabupaten Tanggamus (100%) memiliki persediaan 0-19 persen Jenis obat PONE D, kemudian Kabupaten Lampung Barat (25,0%) dan Kabupaten Lampung Utara (20,0%). Sementara 11 Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas PONE D lainnya tidak ada lagi yang mempunyai Jenis obat PONE D kurang dari 20 persen (0%).

4.11.7. OBAT/ALAT KELUARGA BERENCANA (KB)

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat/Alat KB yang dikumpulkan sebanyak 11 jenis. Tabel 4.11.7.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Jenis Obat/Alat KB. Di Provinsi Lampung, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis Obat/Alat KB adalah 6,0 persen. Tertinggi di Kabupaten Lampung Selatan dan Mesuji (12,5%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat (11,1%). Terdapat 3 Kabupaten/Kota yang puskesmasnya tidak mempunyai 80 persen atau lebih jenis obat/alat KB (0%) yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kota Metro kemudian Kabupaten Lampung Timur (3,2%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 4,2 persen. Tertinggi di Kabupaten Pringsewu (20,0%), kemudian Kabupaten Lampung Barat (11,2%) dan Kabupaten Tanggamus (9,1%). Terdapat 7 Kabupaten dan Kota yang puskesmasnya tidak mempunyai 60-79 persen jenis obat/alat KB (0%) yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro (0%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 14,0 persen. Tertinggi di Kabupaten Mesuji (37,5%), kemudian Kabupaten Pringsewu (30,0%) dan Kabupaten Tanggamus (27,3%). Terendah di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Pesawaran (0%), kemudian Kabupaten Way Kanan (5,6%) dan Kabupaten Lampung Timur (6,5%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 18,5 persen. Tertinggi di Kota Metro (90,9%), kemudian Kota Bandar Lampung (59,3%) dan Kabupaten Lampung Utara (52,0%). Terendah di Kabupaten Way Kanan (5,6%), kemudian Kabupaten Mesuji (12,5%) dan Kabupaten Lampung Barat (16,7%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai 0-19 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 37,4 persen. Tertinggi di Kabupaten Way Kanan (83,3%), kemudian Kabupaten Tulang Bawang (57,1%) dan Kabupaten Lampung Barat (50%). Terendah di Kota Metro (0%), kemudian Kota Bandar Lampung (14,8%) dan Kabupaten Pringsewu (20,0%).

Tabel 4.11.7.1.
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Obat/Alat KB di Provinsi Lampung Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kelengkapan Ketersediaan Obat/Alat KB				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Lampung Barat	18	0	11.1	22.2	16.7	50.0
2	Tanggamus	22	4.5	9.1	27.3	36.4	22.7
3	Lampung Selatan	24	12.5	4.2	12.5	37.5	33.3
4	Lampung Timur	31	3.2	6.5	6.5	41.9	41.9
5	Lampung Tengah	36	8.3	0	8.3	36.1	47.2
6	Lampung Utara	25	8.0	0	16.0	52.0	24.0
7	Way Kanan	18	5.6	0	5.6	5.6	83.3
8	Tulang Bawang	14	7.1	7.1	0	28.6	57.1
9	Pesawaran	12	8.3	8.3	0	41.7	41.7
10	Pringsewu	10	0	20.0	30.0	30.0	20.0
11	Mesuji	8	12.5	0	37.5	12.5	37.5
12	Tulangbawang Barat	9	11.1	0	11.1	33.3	44.4
13	Kota Bandar Lampung	27	3.7	0	22.2	59.3	14.8
14	Kota Metro	11	0	0	9.1	90.9	0
LAMPUNG		265	6.0	4.2	14.0	38.5	37.4

BAB V

KESIMPULAN

Rifaskes Puskesmas 2011 telah menghasilkan gambaran input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang sangat kaya, rinci dan cukup valid untuk membuat gambaran atau potret fasilitas kesehatan di Puskesmas mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas.

Pada prinsipnya ditemukan bahwa komponen-komponen input (terutama SDM, sarana dan prasarana) dan proses (terutama kegiatan, pembinaan, supervisi dan monitoring) dari pelayanan kesehatan di Puskesmas masih belum seperti yang diharapkan. Unsur output sulit untuk dinilai karena validitas data output yang umumnya berdasarkan catatan dan laporan Puskesmas banyak yang kurang lengkap baik konsistensi bulan pelaporan maupun isi dari variabel yang dilaporkan.

Pada unsur input upaya kesehatan Puskesmas ditemukan bahwa baik kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta obat dan alat kesehatan yang saat ini ada di Puskesmas masih dibawah standar yang telah ditentukan. Ditemukan juga terjadi kesenjangan *supply* dan *demand* dari unsur input upaya kesehatan Puskesmas. Disamping itu digambarkan pula adanya disparitas unsur input upaya kesehatan Puskesmas antar Regional dan Provinsi, serta dimungkinkan juga antar Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa penyediaan sarana, prasarana, dan SDM yang sesuai dengan ketiga fungsi Puskesmas (pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan pembangunan berwawasan kesehatan) masih belum diperhatikan dengan semestinya.

Di Provinsi Lampung, dari 265 Puskesmas, seluruh puskesmas telah memiliki dokter, namun untuk dokter gigi masih ada 55,5% Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter gigi, 99,6% puskesmas telah memiliki tenaga perawat dan seluruh puskesmas juga telah memiliki tenaga bidan, 41,5% Puskesmas di Provinsi Lampung tidak memiliki tenaga gizi, 17,7% tidak memiliki tenaga sanitarian dan 71,3% puskesmas tidak memiliki tenaga promkes.

Dari sudut sarana prasarana, ditemukan bahwa 23% bangunan Puskesmas berada dalam kondisi rusak sedang dan berat dan 4,2% Puskesmas memiliki jenis bangunan semi permanen/tidak permanen, 27,5% puskesmas tidak memiliki sarana air bersih, dan hanya 29,1% Puskesmas tidak mempunyai ketersediaan listrik 24 jam.

Hanya 6% Puskesmas di Provinsi Lampung memiliki kelengkapan alkes poliklinik umum kurang dari 20% jumlah standar alkes poliklinik umum (56 alat). Sekitar 12,1% Puskesmas PONEC memiliki kelengkapan obat PONEC kurang dari 20%. Tidak ada (0%) Puskesmas PONEC yang memiliki kelengkapan obat PONEC $\geq 80\%$ lengkap.

Pada unsur proses upaya kesehatan Puskesmas, terjadi kesenjangan kelengkapan dan kualitas kegiatan, pelaksana program, pembinaan, monitoring dan supervisi program Puskesmas dibanding dengan standar yang sudah ditentukan dan disepakati. Ditemukan juga

disparitas proses upaya kesehatan Puskesmas tersebut diatas antar Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas. Sebagai contoh, walaupun sebanyak 95,1% Puskesmas telah memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan dan 87,2% telah melaksanakan Lokakarya Mini Bulanan, tetapi hanya 41,5% dari mereka yang melaksanakan Lokakarya Mini Tiga Bulanan.

Dilihat dari input dan proses yang menunjang tiga fungsi Puskesmas, maka input dan proses yang mendukung keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan masih jauh dari harapan. Hanya 43,4% Puskesmas di Provinsi Lampung yang memiliki petugas didalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Disamping itu pelatihan yang dibutuhkan untuk fungsi tersebut kepada tenaga pelaksanaanya kurang sekali dilakukan, hanya 22,6% petugas yang dilatih untuk kegiatan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Khusus untuk pencapaian MDG's, maka input dan proses program wajib kesehatan ibu dan anak, terutama program PONEC, masih jauh dibandingkan standar minimal yang harus dipenuhi. Hanya 12,5% Puskesmas di Provinsi Lampung yang merupakan Puskesmas PONEC, dimana 3,4% diantaranya adalah Puskesmas PONEC Non Perawatan.

Dalam manajemen pelaksanaan Rifaskes Puskesmas 2011, telah pula dilakukan validasi proses dan substansi Rifaskes Puskesmas 2011 (bersama-sama dengan RSU Pemerintahan dan Laboratorium Klinik Mandiri), oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, UNAIR dan UNHAS. Hasil validasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% langkah-langkah proses Rifaskes Puskesmas 2011 dilaksanakan sesuai proposal, pedoman, instrumen Rifaskes Puskesmas 2011 dan Rifaskes 2011 secara umum. Demikian pula variabel yang dihasilkan oleh Rifaskes 2011, 80% sesuai dengan hasil validasi yang dilakukan oleh ketiga Universitas tersebut diatas.

BAB VI

SARAN-SARAN

1. Perlu dilakukan analisis lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh Rifaskes Puskesmas 2011, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Dari hasil Rifaskes Puskesmas 2011, jelas sudah diketahui semua permasalahan dan kekurangan unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Lampung. Dengan demikian intervensi dan perbaikan pada unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas telah tergambarkan secara jelas dan gamblang tanpa harus membuat intervensi baru.
3. Perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hasil Rifaskes 2011 untuk masukan perencanaan kesehatan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu sebaiknya ada perencanaan yang terpadu didalam penggunaan dana yang sudah tersedia, baik Dana Dekonsentrasi, DAK, DAU, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan BLN.
4. Untuk perencanaan Provinsi perlu memprioritaskan masalah-masalah input dan proses yang ditemukan dari hasil data Rifaskes 2011 sehingga spesifikasi daerah bisa nampak dan efisiensi penggunaan dana bisa terjadi. Prioritas input dan proses ini akan lebih baik lagi apabila dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota.
5. Secara horisontal di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, perencanaan program-program Puskesmas tidak mungkin sempurna apabila tidak dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi antar Ditjen, Bidang dan unsur-unsur terkait yang kewenangannya secara berbeda-beda ada pada mereka, namun berhubungan erat sekali dengan program kesehatan prioritas.
6. Secara vertikal perlu kejelasan dan komitmen yang sungguh-sungguh terhadap kewenangan dan fungsi masing-masing level didalam pelaksanaan program-program kesehatan prioritas dengan integritas yang tinggi.
7. Khusus untuk pencapaian MDG's, perlu diprioritaskan, ditekankan, dan diperkuat program PONEC di seluruh Indonesia, terutama daerah DTPK.
8. Pemenuhan dan pengembangan input dan proses upaya Puskesmas yang menunjang ke tiga fungsi utama Puskesmas yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan perlu mendapatkan prioritas tinggi.
9. Kesenjangan geografi, perdesaan/perkotaan dari input dan proses upaya kesehatan Puskesmas harus segera dipikirkan pemecahannya dengan meningkatkan integritas dan kejelasan pembagian peran antara Kementerian Kesehatan, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

10. Untuk kepentingan persiapan BPJS, maka sudah jelas bahwa dari hasil Rifaskes Puskesmas 2011, perlu segera memperbaiki atau memenuhi kekurangan unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas dengan segera pada tahun 2013 seoptimal mungkin. Tanpa hal ini dilaksanakan, maka akan diragukan keberhasilan pelaksanaan BPJS yang akan dimulai pada tahun 2014 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengisian Kuesioner Puskesmas Riset Fasilitas Kesehatan, 2011
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia (Riskesdas), 2007
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2010*, 2010
- Blum, H.L. *Planning for Health*, 2nd Edition. Human Sciences Press, 1981
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, 2009
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, 2008
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, 2008
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, 2007
- Donabedian, Avedis. *Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Vol I. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment, 1980; Vol.II. The Criteria and Standards of Quality. 1982; Vol. III The Methods and Findings of Quality Assessment and Monitoring: An Illustrated Analysis. Ann Arbor: Health Administration Press, 1985.*
- Jakab, M., Preker, A., Harding, A. and Hawkins, L. *The Introduction of Market Forces in The Public Hospital Sector. From New Public Sector Management to Organizational Reform. Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper, the World Bank, 2002*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/160/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-2014, 2010

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, 2010

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, 2010

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2007

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, 2010

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009

LAMPIRAN

**SUSUNAN TIM
RIFASKES 2011
PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN

KUESIONER RIFASKES PUSKESMAS 2011